



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat;

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;

d. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah dalam rangka menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
- r. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- u. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

7.1.3. Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Posisi Geografis Kota Blitar terletak pada koordinat 112°14' - 112°28' Bujur Timur dan 08°2' - 08°8' Lintang Selatan. Kota Blitar terletak pada jarak sekitar 160 km ke arah Barat Daya terhadap Ibukota Provinsi Jawa Timur.

Kota Blitar terletak di tengah-tengah Kabupaten Blitar. Hal ini menyebabkan Kabupaten Blitar merupakan batas langsung (border) dari Kota Blitar. Secara rinci, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Garum dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Sanan Kulon dan Nglegok Kabupaten Blitar.

Kota Blitar mempunyai luas wilayah sekitar 32,59 km². Dengan luas ini, Kota Blitar menjadi kota terkecil kedua di Provinsi Jawa timur setelah Mojokerto. Kota Blitar terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Kepanjen Kidul, dan Kecamatan Sukorejo. Diantara ketiga kecamatan tersebut, Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,16 km² (37,31%), kemudian Kecamatan Kepanjen Kidul 10,50 km² (32,22%), dan yang terkecil adalah Kecamatan Sukorejo dengan luas sekitar 9,93 km² (30,47%).

Berdasarkan wilayah administrasi, yaitu terdapat 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan, Kepanjen Kidul, dan Sukorejo masing-masing terdiri dari 7 Kelurahan, adapun jumlah Kelurahan di Kota Blitar adalah 21 Kelurahan. Dari 21 Kelurahan yang ada, kelurahan terluas adalah Kelurahan Sentul dengan luas sekitar 2,68 km². Sementara kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Karangsari dan Turi, yaitu dengan luas masing-masing sekitar 0,51 km² dan 0,52 km².

Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar mencakup urusan:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pangan;
- h. lingkungan hidup;
- i. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. perhubungan;
- k. komunikasi dan informatika;
- l. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- m. penanaman modal;
- n. kepemudaan dan olah raga;
- o. perpustakaan.

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kota Blitar juga melaksanakan urusan pilihan yang mencakup:

- a. pariwisata;
- b. perdagangan.

Adapun penunjang urusan meliputi:

- a. pengawas;
- b. perencanaan;
- c. keuangan;
- d. kepegawaian

Sedangkan yang merupakan pendukung adalah:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Blitar yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

7.1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3 Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi
- 7.1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 7.2.1 Ekonomi Makro
- 7.2.2 Kebijakan Keuangan
- 7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 7.4.1 Basis Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
- 7.4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 7.4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA dan Pendapatan – LO
 - 7.4.2.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
 - 7.4.2.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
 - 7.4.2.4 Kebijakan Akuntansi Piutang
 - 7.4.2.5 Kebijakan Akuntansi Aset
 - 7.4.2.6 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
 - 7.4.2.7 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
 - 7.4.2.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
 - 7.4.2.9 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
 - 7.4.2.10 Konsolidasi Laporan Keuangan

7.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 7.5.1.1 Pendapatan LRA
 - 7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer
 - 7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
 - 7.5.1.2 Belanja
 - 7.5.1.2.1 Belanja Operasi
 - 7.5.1.2.2 Belanja Modal



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga
- 7.5.1.2.4 Belanja Transfer
- 7.5.1.3 Pembiayaan
- 7.5.1.4 SiLPA/SiKPA
- 7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Sebelumnya
 - 7.5.2.5 Lain-lain
 - 7.5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 7.5.3 Neraca
 - 7.5.3.1 Aset
 - 7.5.3.1.1 Aset Lancar
 - 7.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang
 - 7.5.3.1.3 Aset Tetap
 - 7.5.3.1.4 Akumulasi Penyusutan
 - 7.5.3.1.5 Aset Lainnya
 - 7.5.3.2 Kewajiban
 - 7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
 - 7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang
 - 7.5.3.2.3 Ekuitas
- 7.5.4 Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional
 - 7.5.4.1 Pendapatan – LO
 - 7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO
 - 7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO
 - 7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO
 - 7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO
 - 7.5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi – LO
 - 7.5.4.1.2.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
 - 7.5.4.2 Beban
 - 7.5.4.2.1 Beban Pegawai



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 7.5.4.2.2 Beban Persediaan
- 7.5.4.2.3 Beban Jasa
- 7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan
- 7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas
- 7.5.4.2.6 Beban Bunga
- 7.5.4.2.7 Beban Subsidi
- 7.5.4.2.8 Beban Hibah
- 7.5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial
- 7.5.4.2.10 Beban Penyusutan
- 7.5.4.2.11 Beban Amortisasi
- 7.5.4.2.12 Beban Transfer
- 7.5.4.2.13 Beban Lain-lain
- 7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
- 7.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- 7.5.4.5 Pos Luar Biasa
- 7.5.4.6 Surplus/Defisit – LO
- 7.5.5 Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
 - 7.5.5.5 Saldo Akhir Kas
- 7.5.6 Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 7.5.6.1 Saldo Awal Ekuitas
 - 7.5.6.2 Surplus/Defisit – LO
 - 7.5.6.3 Koreksi-koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - 7.5.6.4 Ekuitas Akhir
- 7.5.7 INFORMASI PENTING LAIN YANG DIPERLUKAN
 - 7.5.7.1 Dana Tugas Pembantuan (TP)
 - 7.5.7.2 Penerimaan Kas yang tidak Melalui RKUD
 - 7.5.7.3 Penyelesaian Kerugian Daerah
 - 7.5.7.4 Pengungkapan Informasi Permasalahan Investasi
- 7.5.8 Penutup



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.1. EKONOMI MAKRO

Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah setiap tahun adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Manfaat PDRB antara lain :

- a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah diukur dengan harga berlaku saat itu. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi, begitu juga sebaliknya. PDRB ADHB menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk daerah.
- b. Distribusi PDRB ADHB menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
- c. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- d. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- e. PDRB Atas Dasar Harga Konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan.
- f. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Tabel 1. PDRB Kota Blitar Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
(dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha/Industri	2013	2014	2015	2016	2017
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	138.647,01	151.164,69	164.008,28	172.914,90	178.373,20
2 Pertambangan dan penggalian	333,31	334,06	334,42	335,77	341,80
3 Industri Pengolahan	362.414,34	406.632,65	457.171,18	502.362,53	552.608,00
4 Pengadaan Listrik dan Gas	2.463,93	2.725,02	3.039,34	3.297,87	3.915,40
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah Daur Ulang	6.759,97	6.913,13	7.145,74	7.709,92	8.192,10
6 Konstruksi	293.658,38	339.583,80	372.228,66	414.679,81	452.641,90
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	916.321,82	1.008.152,47	1.125.713,64	1.271.622,36	1.399.424,10
8 Transportasi dan Pergudangan	154.789,11	177.165,23	198.590,43	222.264,69	247.375,30
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180.490,09	209.184,26	240.316,16	277.001,55	308.495,10
10 Informasi dan Komunikasi	443.518,49	471.362,32	505.492,54	556.924,43	607.745,00
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	410.932,17	466.896,98	526.913,23	589.209,86	640.867,60
12 Real Estate	152.044,29	163.600,24	180.103,24	197.689,16	211.459,20



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

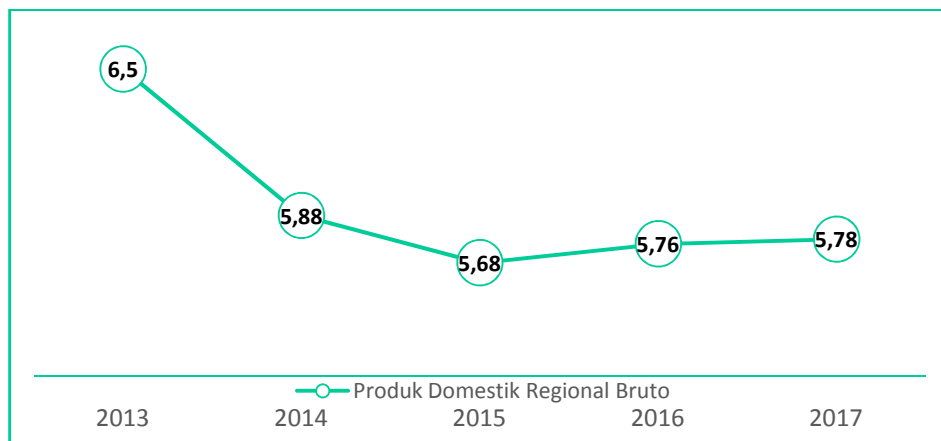
13	Jasa Perusahaan	31.929,08	33.486,58	35.624,94	38.903,43	43.617,30
	Administrasi					
14	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	294.399,76	302.985,55	317.849,27	339.763,04	360.188,60
15	Jasa Pendidikan	270.537,69	309.335,99	345.002,21	374.821,78	399.640,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73.456,70	83.520,57	92.237,32	100.880,98	110.234,80
17	Jasa Lainnya	196.812,93	221.240,58	247.357,38	261.904,66	277.244,10
PDRB		3.929.509,10	4.354.056,10	4.819.089,50	5.331.286,70	5.802.368,10

Sektor perdagangan mendominasi dengan nilai Rp1.399.424.100.000,00. Semakin dominannya sektor perdagangan mencerminkan karakteristik sebagai sebuah wilayah perkotaan.

Karakteristik sebagai wilayah perkotaan juga semakin diperkuat dengan berkembangnya sektor jasa. Sektor jasa keuangan dan asuransi merupakan penyumbang terbesar kedua, sebesar Rp640.867.600.000,00. Semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan dan kesadaran pentingnya asuransi semakin mendorong peningkatan sektor ini.

Sementara itu, sektor informasi menduduki posisi tiga besar penyumbang PDRB Kota Blitar dengan nilai sebesar Rp607.745.000.000,00. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kebutuhan komunikasi dan informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Tabel 2.
Pertumbuhan PDRB Kota Blitar



Pertumbuhan PDRB Kota Blitar dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan angka fluktuatif dan cenderung terjadi penurunan jika mengacu pada tahun 2013. Pada mulanya nilai PDRB tahun 2013 cukup tinggi, yaitu 6,50, kemudian terjadi penurunan senilai 5,88 pada tahun 2014 dan seterusnya berturut-turut merangkak naik kembali sebesar 5,78 pada tahun 2017.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

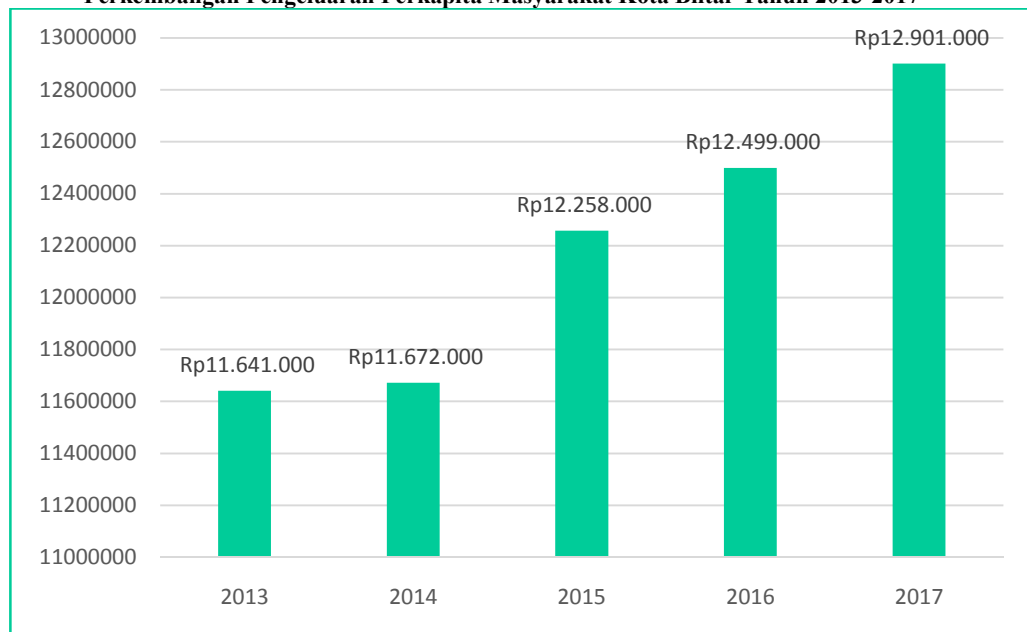
Tabel 3.
Komponen IPM, IPM Kota Blitar, dan IPM Jawa Timur 2013 - 2017

Komponen IPM	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	72,69	72,7	73	73,09	73,17
Harapan Lama Sekolah	13,15	13,51	13,53	14	14,01
Rata-Rata Lama Sekolah	9,53	9,81	9,87	9,88	9,89
Daya Beli	11.641	11.672	12.258	12.499	12.910
IPM Kota Blitar	74,53	75,26	76	76,71	77,1
IPM Jawa Timur	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27

Sumber : BPS Kota Blitar, 2017

Secara Umum IPM Kota Blitar masuk dalam kategori tinggi. IPM Kota Blitar selalu diatas IPM Jawa Timur. Pada Tahun 2017 IPM Kota blitar 77,10 dan IPM Jawa Timur 70,27. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Blitar lebih baik dibandingkan rata-rata kesejahteraan Kabupaten/Kota lainnya di lingkup Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Blitar Tahun 2013-2017



Standar hidup masyarakat Kota Blitar direpresentasikan dengan komponen pengeluaran perkapita yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Kondisi ini dibuktikan dengan pengeluaran perkapita masyarakat yang semakin meningkat.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.
Capaian Indikator Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2012– 2016

Indikator		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,52	6,50	5,88	5,68	5,76
2	Tingkat Inflasi (%)	4,63	8,05	7,49	1,71	1,30
3	PAD terhadap PDRB (%)	2,48	2,51	2,36	2,51	2,47
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,55	6,22	5,71	3,80	3,39
5	Kemiskinan (%)	6,75	7,42	7,15	7,29	7,18
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,53	74,53	75,26	76,00	76,71
7	Indeks Gini	0,38	0,40	0,35	0,34	-

Sumber : BPS Kota Blitar, 2016

Tabel tersebut menunjukkan fluktuasi perkembangan kondisi indikator makro ekonomi Kota Blitar pada tahun 2012 hingga 2016. Merujuk pada variabel indikator makro ekonomi yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi dapat diketahui bahwa mulai tahun 2012 hingga 2013 terdapat angka pertumbuhan ekonomi yang stabil diatas 6,00% sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional, walaupun pada tahun 2014 hingga 2016 stagnan di kisaran 5,00%. Salah satu faktor penyebab stagnannya perekonomian daerah adalah perlambatan ekonomi nasional karena *recovery* perekonomian global juga masih berjalan dengan lambat. Oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih tajam dalam membuat kebijakan-kebijakan yang mampu memacu percepatan perekonomian daerah.

Pada variabel kedua yaitu tingkat inflasi juga menunjukkan tren yang fluktuatif. Untuk data inflasi Kota Blitar merujuk pada inflasi Kota Kediri karena Kota Blitar berada di wilayah Koordinasi Kantor Bank Indonesia Kota Kediri, dan yang diukur hanya inflasi Kota Kediri. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 dan 2014 terjadi inflasi yang relatif tinggi, yaitu 8,05% dan 7,49%. Namun, di periode 2015 dan 2016 tingkat inflasi relatif rendah yaitu 1,71% dan 1,30%. Hal ini mengindikasikan kerjasama antar daerah dan antar organisasi perangkat daerah semakin efektif.

Selanjutnya, pada variabel ketiga yaitu tingkat rasio PAD terhadap PDRB mengalami peningkatan tipis dari tahun 2012 hingga 2013. Peningkatan tersebut tidak berlangsung lama karena kembali menurun di tahun 2014 menjadi 2,36%. Penurunan tersebut berlanjut di tahun 2015 menjadi 2,51%. Kemudian di tahun 2016 kembali meningkat sebesar 2,47%. Penurunan di tahun 2014 dan 2015 tersebut selaras dengan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Kota Blitar. Variabel ini dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan kemandirian suatu daerah. Selain itu, dapat pula dijadikan indikator sejauh mana perekonomian daerah mampu memberikan *multiplier effect* pada pendapatan daerah melalui pajak daerah maupun retribusi daerah. Kemudian, pendapatan daerah akan diinjeksikan kembali pada perekonomian daerah melalui belanja program-program pembangunan.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar menunjukkan fluktuasi, dimana TPT pada tahun 2013 meningkat relatif tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Namun, pada tahun-tahun berikutnya cenderung mengalami penurunan dan sampai tahun 2015 TPT sebesar 3,80%. Penurunan TPT ini dapat dijadikan sebagai indikasi keberhasilan program-



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

program pemerintah Kota Blitar dalam menstimulus pembukaan lapangan kerja baru di Kota Blitar. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus memperluas kesempatan kerja sehingga akan menyerap pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Dengan berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Blitar diharapkan mampu mereduksi tingkat kemiskinan. Sampai dengan tahun 2016, tingkat kemiskinan Kota Blitar mencapai 7,18%. Angka ini menurun dari tahun 2015 yang sebesar 7,29%. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Blitar relatif mampu mereduksi jumlah penduduk miskin meskipun relatif kecil penurunannya. Namun, di masa mendatang dengan program pembangunan yang lebih fokus diharapkan dapat mempercepat penurunan kemiskinan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar juga sejalan dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan dengan penurunan Indeks Gini. Indeks Gini Kota Blitar selama periode 2012 sampai dengan 2015 terus mengalami penurunan dari 0,38 di tahun 2012 menjadi 0,34 di tahun 2015. Penurunan Indeks Gini ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Blitar dalam melakukan pemerataan pembangunan.

7.2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

a. Umum

Atas dasar arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 – 2021 dan RKPD Tahun 2017 (Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2017), serta dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi makro Kota Blitar, maka APBD tahun 2018 baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan diarahkan untuk (1) Mendukung terwujudnya sasaran pembangunan tahunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD tahun 2018, (2) Menjamin kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar secara terpadu dan sinergis, (3) Menjamin kontinuitas pelaksanaan program pembangunan daerah khususnya program dan kegiatan pembangunan strategis yang menjadi fundamen pembangunan perekonomian daerah baik secara makro maupun mikro.

Uraian Kebijakan Umum APBD tahun 2018 secara garis besar meliputi kebijakan umum bidang pendapatan, kebijakan umum bidang belanja dan kebijakan umum bidang pembiayaan pada bagian dibawah ini.

Sedangkan Perubahan APBD 2018 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 maupun dampak perubahan kebijakan lainnya yang harus diadopsi pada PAK.

b. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah mencakup 3 komponen yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terus dioptimalkan untuk mendukung pendanaan prioritas program setiap tahun dengan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Di tengah keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah harus diimbangi dengan berbagai upaya antara lain :



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pembenahan manajemen penerimaan PAD, melakukan evaluasi terhadap pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan, menetapkan target pendapatan berdasarkan potensi pendapatan baru.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dengan tidak mengurangi fungsi yang berorientasi pada pelayanan.
- 4) Melakukan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan antar OPD penghasil PAD.

Dalam koridor strategi pengembangan perekonomian Kota Blitar, selama ini dikenal sebuah strategi yang dinamakan sebagai “Pendapatan Terbuka” yaitu sebuah upaya untuk menggabungkan pendapatan pemerintah dan masyarakat melalui proses sinergitas kegiatan antar sektor sehingga menimbulkan sebuah proses *multiplier effect* secara terus menerus dan berlanjut yang pada ujungnya menghasilkan “pendapatan” berupa segala bentuk investasi baik yang berupa uang tunai maupun barang yang beredar dalam kegiatan perekonomian riil ditengah kehidupan masyarakat.

c. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2018

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kota Blitar diarahkan agar pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam rangka diversifikasi, efisiensi dan efektifitas penggalan sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan porsi pendapatan yang diperoleh melalui berbagai upaya baik dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi daerah maupun usaha – usaha lain yang sah. Melalui langkah intensifikasi yang dilakukan secara kreatif dan inovatif, pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada, dan sedapat mungkin mengurangi beban masyarakat. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sehingga besarnya akan sangat tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah pusat serta program-program inovatif yang ditawarkan kepada pemerintah.

Peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari asli daerah harus selalu diupayakan secara sungguh-sungguh melalui proses intensifikasi dan ekstensifikasi secara proporsional, realistis dan obyektif. Dalam implementasinya, upaya ini tetap berpedoman dan mengedepankan prinsip-prinsip dasar pelayanan yang tidak memberatkan warga masyarakat. Kebijakan PAD dimaksud tetap diarahkan dengan titik berat pada:



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan Pendapatan Daerah;
- 2) Optimalkan Penerimaan PAD melalui : membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatannon-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 3) Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- 4) Optimalisasi kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 5) Peningkatan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- 6) Penetapan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* perekonomian;
- 7) Pelembagaan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan pendapatan daerah;
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran proses pengelolaan pendapatan daerah;
- 10) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- 11) Meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

d. Kebijakan Umum Belanja

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan rutin, antara lain : belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan kepada partai politik serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun 2018. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

e. Strategi Pengendalian Belanja Daerah Tahun 2018

Strategi pengendalian belanja daerah Kota Blitar tahun 2018 dititik beratkan kepada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Blitar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan tetap melakukan sinkronisasi dengan program/kegiatan di RPJMD Kota Blitar.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (*performance budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian hasil.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain meliputi:

- 1) Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar lainnya.
- 4) Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar, baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost* dan *variable cost* secara terukur.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2018 menekankan pada upaya pemantapan ekonomi kreatif yang dapat menyerap tenaga kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas produksi dan daya saing pelaku ekonomi dan infrastruktur daerah dalam memanfaatkan peluang pasar bebas ASEAN atau MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

f. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait dengan pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA) tahun sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, terutama kepada BUMD.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

7.2.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Dari sisi pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi pendapatan dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp894.409.176.023,96 jika dibandingkan dengan target sebesar Rp844.692.292.324,05 melebihi anggaran sebesar Rp49.716.883.699,91. Pelampauan pendapatan daerah tersebut berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sebesar Rp163.026.005.752,93 atau 104,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp155.482.930.452,05, dan dari Pendapatan Transfer dengan realisasi Rp714.475.849.626,00 atau 106,35% dari anggaran sebesar Rp671.799.441.872,00. Sedangkan untuk Lain – lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp16.907.320.645,03 atau hanya 97,11% dari target sebesar Rp17.409.920.000,00.

Sebaliknya Belanja OPD terealisasi sebesar Rp811.042.753.123,83 atau 83,42% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp972.204.365.136,51. Realisasi belanja yang kurang dari anggaran sebesar 16,58% disebabkan karena



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

kebutuhan riil OPD dalam mengemban misi daerah untuk melayani masyarakat telah menggunakan pendekatan prioritas dan akuntabel serta dapat menekan belanja yang bukan prioritas daerah.

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dari uraian di atas dapat kami rinci untuk pendapatan pada tabel berikut :

Tabel 6. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% (Pelampauan / dibawah anggaran)
1	PENDAPATAN	844.692.292.324,05	894.408.910.752,39	105,89
1.1	Pendapatan Asli Daerah	155.482.930.452,05	163.025.740.481,36	104,85
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	35.848.612.510,00	40.501.229.760,26	112,98
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.195.822.115,00	9.940.599.576,00	108,10
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.104.657.721,40	1.104.657.721,40	100,00
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	109.333.838.105,65	111.479.253.423,70	101,96
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	671.799.441.872,00	714.475.849.626,00	106,35
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	594.543.550.372,00	626.534.717.922,00	105,38
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	37.720.072.975,00	33.311.778.801,00	88,31
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	38.534.466.000,00	67.464.332.495,00	175,08
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	421.212.306.000,00	421.212.306.000,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	97.076.705.397,00	104.546.300.626,00	107,69
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	100,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	64.255.891.500,00	74.941.131.704,00	116,63
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62.503.361.500,00	73.188.601.704,00	117,10
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.752.530.000,00	1.752.530.000,00	100,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	17.409.920.000,00	16.907.320.645,03	97,11
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.409.920.000,00	16.907.320.645,03	97,11
1.3.2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	844.692.292.324,05	894.408.910.752,39	105,89



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sedangkan realisasi belanja daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Pelampauan/ Dibawah Anggaran
2	BELANJA	972.204.365.136,51	811.042.753.123,83	83,42
2.1	BELANJA OPERASI	750.828.942.181,23	650.851.431.086,17	86,68
2.1.1	Belanja Pegawai	321.362.714.936,26	274.035.428.694,50	85,27
2.1.2	Belanja Barang	375.992.469.444,97	329.255.542.203,67	87,57
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	26.391.359.685,00	24.368.685.958,00	92,34
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	26.582.398.155,00	22.691.789.730,00	85,36
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	499.999.960,00	499.984.500,00	99,99
2.2	BELANJA MODAL	219.355.772.955,28	160.034.400.213,66	72,96
2.2.1	Belanja Tanah	157.517.800,00	138.767.500,00	88,10
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	69.408.556.907,28	51.554.910.344,41	74,28
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	84.940.190.569,00	45.978.095.429,99	54,13
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	58.825.311.534,00	57.003.831.744,26	96,90
2.2.5	Belanja Aset tetap lainnya	3.636.634.265,00	3.439.456.815,00	94,58
2.2.6	Belanja Aset lainnya	2.387.561.880,00	1.919.338.380,00	80,39
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	144.678.144,00	7,23
2.4	BELANJA TRANSFER	19.650.000,00	12.243.680,00	62,31
Jumlah Belanja		972.204.365.136,51	811.042.753.123,83	83,42

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa optimalisasi kegiatan yang dibiayai APBD dalam mengimplementasikan otonomi daerah mampu memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat.

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 Basis Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2018, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi menggunakan basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Biasanya, basis akrual untuk LO mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Anggaran yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kota Bitar dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Kota Blitar disusun dengan periode pelaporan yaitu tahunan, pada akhir tahun akan didapatkan Laporan LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Metode akuntansi yang digunakan Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2017 sebagai tahun ketiga pelaksanaan (implementasi) akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kami yakin dalam pelaksanaan pasti masih ada kekurangan sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Guna mendapatkan prinsip konsistensi maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang berdampak pada adanya dampak kumulatif.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Blitar dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

7.4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis dimana pengukurannya dalam akuntansi wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kota Blitar sebagai berikut:

7.4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Blitar, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau diterima di OPD atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi, maka dana tidak ditransfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/gubernur ke daerah perihal jumlah hak perolehan daerah. Dana transfer dalam penyampaian pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Blitar yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima dengan pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- b. Pendapatan LRA

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

- c. Pendapatan LO

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi. Selain itu untuk pendapatan yang diterima oleh OPD/Unit Kerja tidak melalui RKUD diakui sebagai pendapatan sepanjang OPD/Unit Kerja yang bersangkutan melaporkan atas penerimaan dana dimaksud dan atau timbulnya pengesahan pendapatan dan belanja.

Transaksi keuangan yang tidak dapat dicatat secara bruto, antara lain adalah :

- a. Jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemerintah Kota Blitar) yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.
- b. Upah pungut yang dipotong oleh penyeter (akibat kerja sama) misalnya Upah Pungut PPJU yang langsung dipotong oleh PLN. Realisasi penerimaan harus dicatat secara bruto (termasuk upah pungut).
- c. Komisi/Potongan/Rabat diakui sebagai pendapatan meskipun langsung mengurangi pengeluaran yang dilakukan Pemda. Dengan demikian SP2D atas pengeluaran tersebut berfungsi juga sebagai bukti penerimaan.

7.4.2.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Blitar untuk pembayaran gaji pegawai dalam membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan realisasi klasifikasi yang diterapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah, apabila dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

7.4.2.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Blitar, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kota Blitar terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kota Blitar, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kota Blitar, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

7.4.2.4 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

a. Klasifikasi Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas :

1) Pungutan :

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas :

- a) Piutang Pajak Daerah yang timbul atas pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Dapat diketahui dari Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain tentang penetapan pajak daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
- b) Piutang Retribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada atau ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain tentang penetapan retribusi yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
- c) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya karena potensi PAD lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, dan sebagainya.

2) Perikatan yaitu piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, seperti:

- a) Pemberian pinjaman, merupakan piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/D, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya.
- b) Penjualan, piutang yang timbul dapat dari pemindahtanganan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Kemitraan, piutang pemerintah timbul jika terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, tanggal pelaporan keuangan per 31 Desember, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d) Pemberian fasilitas/jasa, piutang timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Ketika hak pemerintah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca.

Pengakuan piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diterima; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

Sedangkan pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- Pemberian pinjaman, dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- Penjualan, diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- Kemitraan, diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- Pemberian fasilitas/jasa, diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Besaran tarif penyusutan piutang ditentukan dari penilaian kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 8.Tingkat Kolektibilitas Piutang Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Tahun)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2	Piutang Retribusi	Lancar	KL	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/D	Lancar	K L	R	R	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	R	Macet
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	Lancar	K L	R	R	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	R	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	R	Macet
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	R	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	R	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	R	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	R	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	R	Macet

Sedangkan penyisihan piutang sesuai tabel berikut :

Tabel 9.Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun Anggaran 2018

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
A	Lancar	0 %
B	Kurang Lancar	10 %
C	Diragukan	50 %
D	Macet	100 %

7.4.2.5.Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Blitar, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa :

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pendekatan dalam pengakuan beban persediaan, yaitu:

- Dalam pendekatan aset, beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi, dengan maksud untuk persediaan-persediaan yang penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, dinas kesehatan dan puskesmas maupun di sekretariat OPD.
- Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan, dengan maksud persediaan-persediaan yang penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan OPD.

Persediaan, diukur dengan menggunakan yaitu :

- Metode Perpetual:

Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, utamanya untuk persediaan obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan termasuk didalamnya UPTD Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Dalam ini pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

- Metode Periodik :

Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Metode ini digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD.

Persediaan dinilai dengan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(FIFO), atau barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali dikeluarkan, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. Selain itu dengan metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Untuk persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Persediaan dicatat sebesar:

- a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan untuk barang yang berasal dari anggaran belanja modal dengan nilai per unit di bawah Rp500.000,00 atau aset tetap yang harga perolehannya dibawah nilai minimum kapitalisasi yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, tidak disajikan di neraca, namun tetap dicatat dalam daftar aset tetap ekstrakomtabel.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi Non Permanen di Pemerintah Kota Blitar adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi dan UM kepada kelompok masyarakat, usaha mikro dan koperasi di wilayah Kota Blitar. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Penyisihan Investasi Non Permanen yang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kategori dari investasi non permanen, yaitu:

- a. Lancar
Investasi Non Permanen dikategorikan lancar apabila tidak terdapat tunggakan baik angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- b. Dalam Perhatian Khusus
Investasi Non Permanen dikategorikan DPK apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 3 bulan.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. Kurang Lancar
Investasi Non Permanen dikategorikan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 bulan sampai dengan 4 bulan.
- d. Diragukan
Investasi Non Permanen dikategorikan diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 4 bulan sampai dengan 6 bulan.
- e. Macet
Investasi Non Permanen dikategorikan macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 bulan.
Adapun besarnya penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 10. Penyisihan Dana Bergulir

No	Kategori Penyaluran Dana Bergulir	% Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	Lancar	0%
2	Dalam Perhatian Khusus	5%
3	Kurang Lancar	15%
4	Diragukan	40%
5	Macet	70%

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kota Blitar adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

- a. PD. BPR Artha Praja
- b. PDAM

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Blitar atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal, bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- 4) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 5) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

selama masa manfaat aset yang bersangkutan dengan metode garis lurus (*straight line method*).

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria manfaat ekonomi atas aset tetap dan nilai rupiah pengeluaran. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai perolehan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- 3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan
- 4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 11.Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.1	Tanah	Seluruhnya
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
01	Alat-alat Besar	20.000.000,00
02	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.000.000,00
03	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	500.000,00
04	Alat-alat angkutan air bermotor	1.000.000,00
05	Alat-alat angkutan air tidak bermotor	500.000,00
06	Alat-alat angkutan udara	1.000.000,00
07	Alat-alat Bengkel	500.000,00
08	Alat-alat ukur	500.000,00
09	Alat-alat Pertanian	500.000,00
10	Alat-alat Peternakan	500.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
11	Alat-alat Perikanan	500.000,00
12	Alat Kantor	500.000,00
13	Meubelair	500.000,00
14	Alat pengukur waktu	500.000,00
15	Alat pembersih	500.000,00
16	Alat pendingin	500.000,00
17	Alat Dapur	500.000,00
18	Alat Rumah Tangga	500.000,00
19	Komputer	500.000,00
20	Alat Studio	500.000,00
21	Alat-alat Komunikasi	500.000,00
22	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
23	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
24	Alat Persenjataan/Keamanan	500.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
01	Bangunan Gedung tempat kerja	Seluruhnya
02	Bangunan Gedung tempat tinggal	Seluruhnya
03	Bangunan Menara	Seluruhnya
04	Bangunan Lainnya	Seluruhnya
05	Bangunan Bersejarah	Seluruhnya
06	Bangunan Tugu Peringatan	Seluruhnya
07	Bangunan Candi	Seluruhnya
08	Rambu-rambu	500.000,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi terdiri atas:	
01	Jalan	Seluruhnya
02	Jembatan	Seluruhnya
03	Bangunan Air	Seluruhnya
04	Instalasi	Seluruhnya
05	Jaringan	Seluruhnya
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
01	Buku	Seluruhnya
02	Terbitan	Seluruhnya
03	Barang-Barang Perpustakaan	Seluruhnya
04	Barang Bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga	Seluruhnya
05	Alat olahraga lainnya	200.000,00
06	Hewan/Ternak dan Tumbuhan (ikan, hewan, tanaman)	500.000,00
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- 4) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 12.Kapitalisasi Pengeluaran Belanja yang Menambah Nilai Aset

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.3.1	Tanah	Seluruhnya
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
01	Alat-alat Besar	10.000.000,00
02	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.000.000,00
03	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	500.000,00
04	Alat-alat angkutan air bermotor	1.000.000,00
05	Alat-alat angkutan air tidak bermotor	500.000,00
06	Alat-alat angkutan udara	1.000.000,00
07	Alat-alat Bengkel	500.000,00
08	Alat-alat ukur	500.000,00
09	Alat-alat Pertanian	500.000,00
10	Alat-alat Peternakan	500.000,00
11	Alat-alat Perikanan	500.000,00
12	Alat Kantor	500.000,00
13	Meubelair	500.000,00
14	Alat pengukur waktu	500.000,00
15	Alat pembersih	500.000,00
16	Alat pendingin	500.000,00
17	Alat Dapur	500.000,00
18	Alat Rumah Tangga	500.000,00
19	Komputer	500.000,00
20	Alat Studio	500.000,00
21	Alat-alat Komunikasi	500.000,00
22	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
23	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
24	Alat Persenjataan/Keamanan	500.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
01	Bangunan Gedung tempat kerja	12.500.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
	02 Bangunan Gedung tempat tinggal	12.500.000,00
	03 Bangunan Menara	12.500.000,00
	04 Bangunan Lainnya	12.500.000,00
	05 Bangunan Bersejarah	12.500.000,00
	06 Bangunan Tugu Peringatan	12.500.000,00
	07 Bangunan Candi	12.500.000,00
	08 Rambu-rambu	12.500.000,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi terdiri atas:	
	01 Jalan	12.500.000,00
	02 Jembatan	12.500.000,00
	03 Bangunan Air	12.500.000,00
	04 Instalasi	12.500.000,00
	05 Jaringan	12.500.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
	01 Buku	Tidak dikapitalisasi
	02 Terbitan	Tidak dikapitalisasi
	03 Barang-Barang Perpustakaan	Tidak dikapitalisasi
	04 Barang Bercorak Kebudayaan/Kesenian/alat olahraga	Tidak dikapitalisasi
	05 Alat olahraga lainnya	Tidak dikapitalisasi
	06 Hewan/Ternak dan Tumbuhan	Tidak dikapitalisasi
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau masih dalam proses pengerjaan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Biaya Rencana Pembangunan berupa kegiatan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan, namun apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisik pada aset bersangkutan. Konstruksi Dalam Pengerjaan



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ini apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

7.4.2.6. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Dana cadangan diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya, dan pembentukannya didasarkan pada perencanaan yang matang. Pembentukan dan peruntukan dana cadangan didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Dana cadangan diakui pada saat SP2D LS Pembentukan dana cadangan. Sedangkan pengukurannya sesuai nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Hasil dari yang diperoleh dari dana cadangan diukur sebesar nominal yang diterima.

7.4.2.7. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a. Bangun Guna Serah (BGS);
- b. Bangun Serah Guna (BSG);
- b. Kerja Sama Pemanfaatan;
- c. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan diluar entitas. Adapun jenis-jenis Aset Tak Berwujud antara lain *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak paten dan hak cipta, hasil kajian, pengembangan dan *heritage* ATB (ATB yang memiliki nilai sejarah/budaya, film/seni).

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Blitar karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lainnya diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya berupa pendapatan atau penghematan belanja yang dapat diukur dengan andal telah diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya dalam pengerjaan jika jangka waktu perolehannya melebihi satu tahun anggaran atau melewati tanggal pelaporan. Sebagai *intangible asset work in progress*.

Aset lainnya diukur dan dinilaisebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Surat Keputusan Pembebanan/SKTJM setelah dikurangi dengan setoran, harga perolehan. Khusus untuk ATB utamanya *software* dan hasil kajian/penelitian/pengembangan memiliki masa manfaat 5 tahun dan dilakukan amortasi secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

7.4.2.8. Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Blitar.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan selain itu kewajiban yang akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- 1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- 4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kota Blitar menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Blitar pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang Pemerintah Kota Blitar yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kota Blitar baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas Pemerintah Kota Blitar yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang Perhitungan Fihak Ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.4.2.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Dalam rangka implementasi Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya disajikan pada laporan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Laporan atas Keuangan

Perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan dalam Catatan Laporan atas Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.

7.4.2.10. Konsolidasi Laporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Blitar sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan (Dalam hal ini BPKAD selaku BUD).

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah (SKPD/OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kota Blitar sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD/OPD dan PPKD.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K SKPD dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atau transaksi keuangan, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kota Blitar merupakan entitas pelaporan yang berkewajiban memberikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan mencakup seluruh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran(PA/KPA) yang terdiri dari 28 OPD dan 39 Unit Kerja.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

7.5.1.1. PENDAPATAN LRA

Realisasi Pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp894.409.176.023,96 atau 105,89% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan sebesar Rp844.692.292.324,05. Realisasi Pendapatan Tahun 2018 naik 5,11% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp850.942.358.240,98. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 sebesar Rp163.026.005.752,93 atau 104,85 % dari anggaran sebesar Rp155.482.930.452,05. Realisasi PAD Tahun 2018 turun sebesar 16,30% dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2017 sebesar Rp194.764.731.102,98. Adapun rincian penerimaan PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1. Pajak Daerah	35.848.612.510,00	40.501.229.760,26	38.995.899.848,70

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018 sebesar Rp40.501.229.760,26 atau 112,98% dari anggaran sebesar Rp35.848.612.510,00 yang naik 3,86% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun 2017 sebesar Rp38.995.899.848,70. Adapun rincian penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak	SKPD	2018			Realisasi 2017
			Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Hotel	BPKAD	848.222.720,00	1.004.623.397,00	118,44	954.620.274,00
2	Pajak Restoran	BPKAD	2.700.000.000,00	3.609.361.813,26	133,68	2.968.419.359,00
3	Pajak Hiburan	BPKAD	519.534.000,00	982.745.204,00	189,16	349.029.350,00
4	Pajak reklame	BPKAD	575.000.000,00	639.066.975,00	111,14	526.152.478,70
5	Pajak Penerangan Jalan	BPKAD	9.873.850.550,00	9.893.741.919,00	100,20	9.056.411.342,00
6	Pajak Parkir	BPKAD	273.357.600,00	295.382.400,00	108,06	203.070.900,00
7	Pajak Air Tanah	BPKAD	58.647.640,00	62.973.960,00	107,38	65.954.560,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	BPKAD	11.000.000.000,00	11.789.303.518,00	107,18	11.305.368.601,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	BPKAD	10.000.000.000,00	12.224.030.574,00	122,24	13.566.872.984,00
Jumlah			35.848.612.510,00	40.501.229.760,26	112,98	38.995.899.848,70



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kenaikan ini disebabkan optimalnya pemungutan dan pelunasan pendapatan atas pajak oleh Wajib Pajak serta adanya penambahan potensi objek pajak yang bisa dijadikan sumber pendapatan di Tahun 2018. Naiknya pendapatan pajak hotel dikarenakan adanya kesadaran masyarakat pemilik rumah sewa, rumah kost dalam membayar pajak, selain meningkatnya hunian hotel di kota Blitar. Demikian pula terdapat potensi pajak yang dinamikanya ditentukan oleh pasar, kegiatan roda ekonomi masyarakat seperti pajak reklame, pajak parkir untuk itu perlu dijaga dan ditumbuh kembangkan situasi kondisi dan dinamika perekonomian yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2. Retribusi Daerah	9.195.822.115,00	9.940.599.576,00	7.776.649.664,00

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018 sebesar Rp9.940.599.576,00 atau 108,10% dari anggaran sebesar Rp9.195.822.115,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018 naik 27,82 % dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun 2017 sebesar Rp7.776.649.664,00. Adapun rincian penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Retribusi	SKPD	2018			Realisasi 2017
			Anggaran	Realisasi	%	
A.	Retribusi Jasa Umum		4.936.237.640,00	5.069.468.847,00	102,70	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.543.601.440,00	1.431.093.447,00	92,71	1.106.138.722,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	138.028.000,00	130.517.000,00	94,56	82.183.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	Dinas Perhubungan	1.650.000.000,00	1.728.902.000,00	104,78	1.018.648.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.022.205.000,00	1.099.613.000,00	107,57	1.003.247.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	450.000.000,00	486.334.200,00	108,07	524.569.900,00
6	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	Dinas Lingkungan Hidup	14.200.000,00	16.420.000,00	115,63	5.505.000,00
7	Retribusi Pengolahan limbah cair	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.500.000,00	11.555.000,00	110,05	10.500.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	30.399.200,00	31.244.200,00	102,78	0,00
9	Sewa Alat-alat Berat/Walls	Dinas Pekerjaan Umum dan	12.000.000,00	25.150.000,00	209,58	33.700.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis Retribusi	SKPD	2018			Realisasi 2017
			Anggaran	Realisasi	%	
		Penataan Ruang				
10	Pelayanan Pemeriksaan Lab kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	65.304.000,00	108.640.000,00	166,36	72.300.000,00
Jumlah A			4.936.237.640,00	5.069.468.847,00	102,70	3.856.791.622,00
B.	Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	OPD Penghasil	1.533.661.075,00	1.833.405.445,00	119,54	1.699.829.616,00
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	115.200.000,00	169.775.984,00	147,37	275.091.816,00
3	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	140.710.300,00	140.860.500,00	100,11	122.476.000,00
4	Retribusi Tempat khusus paker	OPD Penghasil	673.295.000,00	708.436.000,00	105,22	435.339.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	93.750.000,00	181.967.000,00	194,10	92.919.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	136.760.000,00	192.042.500,00	140,42	166.280.000,00
7	Retribusi Jasa Informasi dan Penyiaran	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	58.000.000,00	58.012.000,00	100,02	57.459.000,00
8	Retribusi Memasuki Kawasan Wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.133.700.000,00	1.112.441.000,00	98,12	755.800.000,00
Jumlah B			3.885.076.375,00	4.338.928.429,00	111,68	3.605.194.432,00
C.	Retribusi Perijinan Tertentu					
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	372.897.400,00	530.625.300,00	142,30	299.865.950,00
2	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	13.537.660,00
3	Retribusi Ijin Trayek	Dinas Perhubungan	1.610.700,00	1.577.000,00	97,91	1.260.000,00
Jumlah C			374.508.100,00	532.202.300,00	142,11	314.663.610,00
Jumlah keseluruhan (A+B+C)			9.195.822.115,00	9.940.599.576,00	108,10	7.776.649.664,00

Kenaikan retribusi daerah yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2017, yaitu 27,82% antara lain dari retribusi Jasa Kesehatan yang naik sebesar 29,38% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, disebabkan adanya kebijakan dari BPJS untuk menggunakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas),



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sehingga layanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terdapat upaya penertiban parkir umum tepi jalan dan himbauan untuk tidak memberikan uang parkir jika tidak mendapat karcis parkir resmi berhologram dari juru parkir, serta undian karcis parkir berhadiah. Dari Retribusi Memasuki Kawasan Wisata juga terdapat peningkatan sebesar 47,19%, hal ini disebabkan ramainya kunjungan wisatawan ke Makam Bung Karno dan *event-event* yang digelar di Parkiran PIPP. Dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terdapat peningkatan sebesar 76,95% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, dengan pemohon yang berasal dari perumahan Griya Jati Permai II.

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.104.657.721,40	1.104.657.721,40	1.053.268.431,76

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 sebesar Rp1.104.657.721,40 atau 100% dari anggaran. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 naik 4,88% dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2017 sebesar Rp1.053.268.431,76. Kenaikan ini berasal dari penerimaan laba penyertaan pada PT Bank Jatim dan PD BPR Artha Praja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penerimaan *cash dividen*/bagian laba tahun buku 2017 yang dibayarkan pada Tahun 2018 atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim sebesar Rp749.130.404,40. Deviden tersebut telah ditransfer pada tanggal 22 Maret 2018.
- b. Penerimaan *cash dividen*/bagian laba Tahun 2017 yang dibayarkan pada Tahun 2018 atas Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Praja sebesar Rp355.527.317,00 yang dibayarkan tanggal 9 April 2018.

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
4. Lain-lain PAD yang Sah	109.333.838.105,65	111.479.518.695,27	146.938.913.158,52

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2018 sebesar Rp111.479.518.695,27 atau 101,96% dari anggaran sebesar Rp109.333.838.105,65. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2018 turun 24,13% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2017 sebesar Rp146.938.913.158,52. Penurunan ini disebabkan Dana BOS yang pada tahun 2017 masuk kedalam Lain-lain PAD yang Sah, kemudian tahun 2018 dipindahkan ke Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 15 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	2018			Realisasi 2017
			Anggaran	Realisasi	%	
A	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan					
1	Penjualan hasil penebangan pohon	DLH	13.800.000,00	13.860.000,00	100,43	16.700.000,00
2	Penjualan hasil pertanian	DKPP	80.455.150,00	78.003.750,00	96,95	81.098.950,00
3	Penjualan hasil perikanan	DKPP	23.400.000,00	44.610.000,00	190,64	24.200.000,00
Jumlah A			117.655.150,00	136.473.750,00	115,99	121.998.950,00
B	Jasa Giro (B)					
1	Jasa Giro Kas Daerah	BPKAD	1.760.000.000,00	2.586.722.297,83	146,97	2.727.276.365,01
2	Jasa Giro BOS	SD/SMP	0,00	0,00	0,00	37.745.993,24
Jumlah B			1.760.000.000,00	2.586.722.297,83	146,97	2.765.022.358,25
C	Bunga Deposito					
1	Bank Jatim	BPKAD	200.000.000,00	302.876.712,26	151,44	309.383.561,60
2	Bank BNI 46	BPKAD	136.000.000,00	179.112.645,00	131,70	167.960.321,00
3	Bank Mandiri	BPKAD	126.000.000,00	180.453.410,00	143,22	191.499.973,00
4	Bank BRI	BPKAD	61.536.951,00	109.668.513,00	178,22	0,00
Jumlah C			523.536.951,00	772.111.280,26	147,48	668.843.855,60
D	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai tukar Rupiah					
1	Lain – lain/(Pembulatan Gaji)	BPKAD	0,00	5.049,00	0,00	5.345,00
Jumlah D			0,00	5.049,00	0,00	5.345,00
E	Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan					
1	Bidang Pendidikan	BPKAD	101.660.662,40	101.660.662,40	100,00	149.700.000,00
2	Bidang Pekerjaan Umum	BPKAD	169.282.460,45	175.089.542,89	103,43	448.812.047,41
3	Bidang Lingkungan Hidup	BPKAD	0,00	17.877,80	0,00	58.750.437,57
4	Bidang Otoda	BPKAD	3.245,00	10.171.137,00	3.134,40	0,00
Jumlah E			270.946.367,85	286.939.220,09	105,90	657.262.484,98
F	Pendapatan denda Pajak (F)					
1	PBB P2	BPKAD	0,00	26.873.672,00	0,00	32.554.614,00
Jumlah F			0,00	26.873.672,00	0,00	32.554.614,00
G	Pendapatan Denda Retribusi (G)					
1	Jasa Umum	Disparbud	110.000.000,00	134.675.000,00	156,77	120.275.000,00
2	Jasa Usaha	Disparbud	0,00	37.848.000,00	0,00	29.634.000,00
Jumlah G			110.000.000,00	172.523.000,00	156,77	149.909.000,00
H	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan					
1	Hasil Eksekusi	DPM PTSP	0,00	2.642.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	SKPD	2018			Realisasi 2017
			Anggaran	Realisasi	%	
	Jaminan atas Pebongkaran Reklame					
Jumlah H			0,00	2.642.000,00	0,00	0,00
I	Pendapatan dari Pengembalian					
1	Pendapatan dari Pengembalian dari Kelebihan Belanja	BPKAD	442.191.938,84	444.239.932,84	100,46	248.579.608,14
.. Jumlah I			442.191.938,84	444.239.932,84	100,46	248.579.608,14
J	Pendapatan Fasilitas Sosial dan Umum					
	Fasilitas Sosial	Dispera	102.465.000,00	109.075.665,00	106,45	116.112.393,50
	Fasilitas Umum	Dispera	978.312.610,00	1.024.398.283,00	104,71	399.957.000,00
Jumlah J			1.080.777.610,00	1.133.473.948,00	104,88	516.069.393,50
K	Pendapatan dari BLUD		100.000.000.000,00	100.820.369.771,53	100,82	119.443.418.471,75
L	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UMKM/Koperasi	Dinkop	105.003.106,96	58.132.307,99	55,95	125.790.327,15
2	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari KPUK/BNI 46	Dinkop	1.395.660,00	1.395.660,00	100,00	9.320.147,00
Jumlah L			106.398.766,96	59.527.967,99	55,95	141.041.907,92
M	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP					
1	Dana kapitasi JKN FKTP UPTD Kes. Kec. Kep. Kidul		1.224.000.000,00	1.247.015.100,00	101,88	1.179.369.900,00
2	Dana kapitasi JKN FKTP UPTD Kes. Kec. Sukorejo		1.466.712.000,00	1.369.026.000,00	93,34	1.416.658.800,00
3	Dana kapitasi JKN FKTP UPTD Kes. Kec. Sananwetan		1.749.600.000,00	1.856.138.250,00	106,09	1.741.863.900,00
Jumlah M			4.440.312.000,00	4.472.179.350,00	100,72	4.337.892.600,00
N	Pendapatan Denda Lain-lain PAD Yang Sah		359.321,00	14.750.000,00	4.104,96	1.813.070,00
O	BPJS Non Kapitasi		481.660.000,00	467.920.300,00	97,15	378.097.500,00
P	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA		0,00	505.489,73	0,00	0,00
Q	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Pajak					
1	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	21.976.565,00	0,00	1.184.400,00
2	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah		0,00	4.000,00	0,00	48.600,00
3	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang Sah		0,00	2.269.101,00	0,00	2.111.047,50
Jumlah Q			0,00	24.249.666,00	0,00	3.344.047,00
R	Pendapatan atas jasa informasi dan penyiaran		0,00	58.012.000,00	0,00	0,00
S	Dana Bantuan Operasional Sekolah		0,00	0,00	0,00	17.478.920.000,00
Jumlah Lain-Lain PAD (A s/d S)			109.333.838.105,65	111.479.518.695,27	101,96	146.938.913.158,52



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ke depan perlu ditingkatkan lagi terkait dengan sistem pengendalian intern terhadap pelaksanaan kegiatan, agar dapat ditekan adanya denda keterlambatan maupun pengembalian baik secara kuantitas jenis maupun nilai.

7.5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018 sebesar Rp714.475.849.626,00 atau 106,35% dari anggaran sebesar Rp671.799.441.872,00. Transfer Tahun 2018 naik 8,80% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2017 sebesar Rp656.177.627.138,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat—Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat—Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	594.543.550.372,00	626.534.717.922,00	562.579.364.596,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat—Dana Perimbangan Tahun 2018 sebesar Rp626.534.717.922,00 atau 105,38% dari anggaran sebesar Rp594.543.550.372,00. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2018 naik 11,37% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp562.579.364.596,00.

**Tabel 16 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2018**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Dana Bagi Hasil Pajak	37.720.072.975,00	33.311.778.801,00	88,31	33.778.174.632,00
	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	4.193.164.000,00	3.995.603.608,00	95,29	3.769.381.242,00
	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21	19.830.366.000,00	15.634.320.193,00	78,84	15.921.476.769,00
	Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	13.696.542.975,00	13.681.855.000,00	99,89	14.087.316.621,00
b.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	38.534.466.000,00	67.464.332.495,00	175,08	16.587.434.797,00
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	228.126.000,00	250.178.053,00	109,67	143.143.376,00
	Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	701.234.591,00	74,36	447.937.200,00
	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	37.332.232.000,00	62.568.101.586,00	167,60	13.675.201.526,00
	Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi	0,00	3.009.167.031,00	0,00	2.244.229.259,00
	Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	30.365.000,00	31.203.994,00	102,76	18.057.860,00
	Bagi Hasil Pertambangan Umum	716.000,00	814.447.240,00	113.749,61	58.865.576,00
c.	Dana Alokasi Umum (DAU)	421.212.306.000,00	421.212.306.000,00	100,00	421.212.306.000,00
d.	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK)	97.076.705.397,00	104.546.300.626,00	107,69	56.005.704.091,00
	DAK Bidang Pendidikan	4.723.986.880,00	4.723.986.880,00	100,00	14.049.791.796,00
	DAK Bidang Kesehatan	8.595.461.016,00	10.836.389.900,00	126,07	11.282.637.000,00
	DAK Bidang Infrastruktur	17.189.028.999,00	25.060.350.000,00	145,79	17.338.351.695,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
	Jalan/Jembatan				
	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	2.197.802.000,00	2.211.111.700,00	100,61	4.010.848.000,00
	DAK Bidang Air Minum	600.113.000,00	600.113.000,00	100,00	3.512.911.600,00
	DAK Bidang Sanitasi	1.334.000.000,00	1.574.339.200,00	118,02	1.991.800.000,00
	DAK Bidang Pertanian	648.750.000,00	648.750.000,00	100,00	1.553.935.000,00
	DAK Bidang Lingkungan Hidup	475.840.150,00	475.840.150,00	100,00	0,00
	DAK Bidang Perdagangan	0,00	0,00	0,00	925.929.000,00
	DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	2.565.795.000,00	2.365.755.000,00	92,20	0,00
	DAK Bidang Pasar	2.945.392.500,00	2.832.276.100,00	96,16	0,00
	DAK Bidang Pariwisata	1.821.926.000,00	1.821.926.000,00	100,00	1.339.500.000,00
	DAK Bidang Sanitasi (Penugasan)	1.819.500.150,00	1.819.500.150,00	100,00	0,000,00
e.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	52.159.149.711,00	49.575.962.555,00	95,05	34.995.745.076,00
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.967.695.359,00	3.967.695.359,00	100,00	4.896.142.900,00
	Dana Alokasi Khusus Tunjangan Profesi Guru	43.521.121.000,00	42.132.720.844,00	96,81	27.735.730.776,00
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan	2.038.496.050,00	2.038.496.050,00	100,00	877.547.400,00
	Dana Alokasi Khusus Jaminan Persalinan	1.194.787.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional KB	631.945.082,00	631.945.082,00	100,00	296.260.000,00
	Dana Alokasi Khusus Tambahan Penghasilan Guru	90.900.000,00	90.900.000,00	100,00	509.850.000,00
	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan	714.205.220,00	714.205.220,00	100,00	680.214.000,00
	Jumlah a+b+c+d+e	594.543.550.372,00	626.534.717.922,00	105,38	562.579.364.596,00

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	7.500.000.000,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp13.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat—Lainnya Tahun 2018 naik sebesar 73,33,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp7.500.000.000,00. Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 17 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
Tahun Anggaran 2018**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Insentif Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
	Jumlah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
3. Transfer Pemerintah Provinsi	64.255.891.500,00	74.941.131.704,00	86.098.262.542,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sebesar Rp74.941.131.704,00 atau 116,63% dari anggaran sebesar Rp64.255.891.500,00. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2018 turun 12,96% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp86.098.262.542,00. Adapun rincian Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 18 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
Tahun Anggaran 2018**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62.503.361.500,00	73.188.601.704,00	117,10	74.576.332.542,00
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.056.262.600	21.659.047.141,00	126,99	20.039.352.885,00
	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.610.456.200	11.012.387.462,00	94,85	10.533.851.036,00
	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.514.161.500,00	15.492.389.614,00	99,86	15.158.103.535,00
	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	174.890.350,00	203.947.369,00	116,61	215.413.064,00
	Bagi Hasil Pajak Rokok	18.147.590.850,00	24.820.830.118,00	136,77	28.629.612.022,00
2	Bantuan Keuangan Provinsi	1.752.530.000,00	1.752.530.000,00	100,00	11.521.930.000,00
	Jumlah	64.255.891.500,00	74.941.131.704,00	116,63	86.098.262.542,00

7.5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1. Pendapatan Hibah	17.409.920.000,00	16.907.320.645,03	0,00

Jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2018 Rp16.907.320.645,03 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp0,00. Nilai pendapatan hibah tersebut merupakan Dana BOS SD dan SMP. Rincian Dana BOS pada UPT Satuan Pendidikan SMP dan SD Negeri sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 19 Pendapatan Hibah (Dana BOS)

(dalam Rupiah)

No.	Sekolah	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	SMPN 1	911.400.000,00	896.974.146,21	98,42	0,00
2	SMPN 2	911.000.000,00	894.744.541,82	98,22	0,00
3	SMPN 3	858.600.000,00	1.003.548.092,01	116,88	0,00
4	SMPN 4	1.032.800.000,00	986.571.612,09	95,52	0,00
5	SMPN 5	1.033.400.000,00	758.558.858,04	73,40	0,00
6	SMPN 6	807.600.000,00	735.417.787,44	91,06	0,00
7	SMPN 7	748.200.000,00	839.392.023,14	112,19	0,00
8	SMPN 8	828.800.000,00	797.679.825,87	96,25	0,00
9	SMPN 9	893.800.000,00	870.349.878,32	97,38	0,00
10	SDN Turi 2	205.920.000,00	194.444.030,12	94,43	0,00
11	SDN Sukorejo 1	79.840.000,00	78.569.335,65	98,41	0,00
12	SDN Sukorejo 2	49.280.000,00	48.825.502,36	99,08	0,00
13	SDN Sukorejo 3	137.120.000,00	131.898.213,10	96,19	0,00
14	SDN Tlumpu	178.240.000,00	167.133.718,54	93,85	0,00
15	SDN Turi 1	157.280.000,00	144.558.336,26	91,91	0,00
16	SDN Blitar	335.200.000,00	320.686.058,66	95,67	0,00
17	SDN Pakunden 2	520.960.000,00	492.344.047,72	94,51	0,00
18	SDN Karangsari 1	97.600.000,00	99.284.182,48	101,73	0,00
19	SDN Karangsari 2	166.240.000,00	159.094.799,58	95,70	0,00
20	SDN Karangsari 3	161.120.000,00	158.253.493,10	98,22	0,00
21	SDN Tanjungsari 2	195.360.000,00	187.873.515,19	96,17	0,00
22	SDN Tanjungsari 1	207.200.000,00	198.704.986,09	95,90	0,00
23	SDN Pakunden 1	179.520.000,00	168.478.284,10	93,85	0,00
24	SDN Sentul 1	172.960.000,00	172.393.490,98	99,67	0,00
25	SDN Sentul 2	350.080.000,00	348.931.088,01	99,67	0,00
26	SDN Sentul 3	196.320.000,00	184.040.544,18	93,75	0,00
27	SDN Sentul 4	163.360.000,00	159.651.454,05	97,73	0,00
28	SDN Tanggung 1	130.080.000,00	123.534.640,01	94,97	0,00
29	SDN Tanggung 2	125.120.000,00	126.789.087,18	101,33	0,00
30	SDN Bendo 1	205.600.000,00	195.940.362,73	95,30	0,00
31	SDN Bendo 2	235.520.000,00	243.171.002,93	103,25	0,00
32	SDN Kepanjenlor 3	133.120.000,00	127.116.085,31	95,49	0,00
33	SDN Ngadirejo 1	155.520.000,00	145.967.387,91	93,86	0,00
34	SDN Ngadirejo 2	86.880.000,00	82.603.204,16	95,08	0,00
35	SDN Kepanjenlor 2	359.360.000,00	359.390.922,64	100,01	0,00
36	SDN Kepanjenlor 1	194.240.000,00	180.323.619,89	92,84	0,00
37	SDN Kepanjenkidul 2	252.160.000,00	251.226.364,83	99,63	0,00
38	SDN Kepanjenkidul 1	148.640.000,00	139.869.255,32	94,10	0,00
39	SDN Kauman 3	149.920.000,00	152.857.483,21	101,96	0,00
40	SDN Kauman 2	132.640.000,00	132.739.229,73	100,07	0,00
41	SDN Sananwetan 3	300.160.000,00	309.637.779,98	103,16	0,00
42	SDN Sananwetan 2	405.920.000,00	401.250.381,56	98,85	0,00
43	SDN Bendogerit 1	511.360.000,00	499.591.684,59	97,70	0,00
44	SDN Bendogerit 2	167.360.000,00	158.773.266,86	94,87	0,00
45	SDN Gedog 1	139.040.000,00	137.388.638,71	98,81	0,00
46	SDN Gedog 2	108.000.000,00	103.549.321,20	95,88	0,00
47	SDN Sananwetan 1	263.200.000,00	254.852.197,72	96,83	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Sekolah	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
48	SDN Klampok	325.920.000,00	310.623.372,65	95,31	0,00
49	SDN Plosokerep 1	87.360.000,00	94.124.558,18	107,74	0,00
50	SDN Plosokerep 2	144.960.000,00	139.696.231,13	96,37	0,00
51	SDN Rembang 1	134.880.000,00	127.817.132,18	94,76	0,00
52	SDN Rembang 2	187.520.000,00	175.287.862,36	93,48	0,00
53	SDN Gedog 3	60.320.000,00	61.041.693,57	101,20	0,00
54	SDN Karangtengah 1	274.080.000,00	282.509.958,44	103,08	0,00
55	SDN Karangtengah 2	131.680.000,00	129.968.823,95	98,70	0,00
56	SDN Karangtengah 3	111.840.000,00	106.118.090,28	94,88	0,00
57	SDN Karangtengah 4	168.320.000,00	155.159.160,71	92,18	0,00
Jumlah		17.409.920.000,00	16.907.320.645,03	97,11	0,00

Realisasi Pendapatan Per SKPD TA. 2018

Realisasi Pendapatan pada masing-masing SKPD se Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel20 Rincian Realisasi Pendapatan Per SKPD
Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dinas Pendidikan	93.380.000,00	98.850.000,00	105,86	17.567.099.878,89
2	Dinas Kesehatan	2.116.865.440,00	2.032.953.747,00	96,04	1.578.742.222,00
3	UPT Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	1.224.000.000,00	1.247.015.100,00	101,88	1.179.369.900,00
4	UPT Puskesmas Kecamatan Sukorejo	1.466.712.000,00	1.369.026.000,00	93,34	1.416.658.800,00
5	UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan	1.749.600.000,00	1.856.138.250,00	106,09	1.741.863.900,00
6	RSUD Mardi Waluyo	100.000.000.000,00	100.820.369.771,53	100,82	119.443.418.471,75
7	Dinas Perumahan Rakyat	469.665.000,00	379.414.159,46	80,78	530.446.411,00
8	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	384.897.400,00	555.775.300,00	144,40	333.604.550,00
9	Dinas Perhubungan	2.305.788.000,00	2.405.924.700,00	104,34	1.720.307.400,00
10	Dinas Kominfo & Statistik	58.000.000,00	58.012.000,00	100,02	57.459.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	203.046.000,00	174.339.000,00	85,86	129.969.160,00
12	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	110.000.000,00	134.675.000,00	122,43	120.275.000,00
13	Dinas Koperasi & UM	70.210.000,00	58.132.307,99	82,80	125.790.327,15
14	Kecamatan Kepanjenkidul	289.077.235,00	289.192.800,00	100,04	11.350.000,00
15	Kecamatan Sukorejo	245.074.810,00	244.624.810,00	99,82	100.000,00
16	Kecamatan Sananwetan	305.000.000,00	311.551.551,00	102,15	650.000,00
17	BPKAD	729.355.855.449,05	777.338.023.647,98	106,58	700.999.300.838,19
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,	234.505.150,00	341.480.750,00	145,62	235.127.950,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	302.670.000,00	343.974.500,00	113,65	281.689.000,00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.871.540.290,00	2.302.049.000,00	123,00	1.652.873.000,00
21	Dinas Perdagangan & Perindustrian	1.797.905.550,00	2.000.262.834,00	111,26	1.766.912.666,00
22	Bagian Umum Setda	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00
23	Dinas Penanaman Modal, TK, & PTSP	35.000.000,00	43.890.795,00	125,40	45.849.766,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
Jumlah		844.692.292.324,05	894.409.176.023,96	105,89	850.942.358.240,98

7.5.1.2. BELANJA DAN TRANSFER

Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2018 sebesar Rp811.042.753.123,83 atau 83,42% dari anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp972.204.365.136,51. Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2018 naik sebesar 3,41% dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp784.297.309.172,26. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

7.5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 sebesar Rp650.851.431.086,17 atau 86,68% dari anggaran sebesar Rp750.828.942.181,23. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 naik sebesar 6,82% dibandingkan dengan Belanja Operasi Tahun 2017 sebesar Rp609.276.448.921,90. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1. Belanja Pegawai	321.362.714.936,26	274.035.428.694,50	283.014.934.938,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 sebesar Rp274.035.428.694,50 atau 85,27% dari anggaran sebesar Rp321.362.714.936,26. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 turun 3,17% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 sebesar Rp283.014.934.938,00. Adapun rincian Belanja Pegawai Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
A	Belanja Tidak Langsung				
1	Gaji dan Tunjangan	267.613.734.351,27	231.608.655.859,00	86,55	231.101.266.865,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	38.603.502.431,99	29.679.775.219,00	76,88	17.199.991.039,00
3	Belanja Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.429.500.000,00	4.402.333.500,00	99,39	3.314.924.000,00
4	Insentif pemungutan Pajak Daerah	1.792.430.626,00	1.532.281.984,00	85,49	1.205.251.467,09
5	Insentif pemungutan Retribusi Daerah	478.476.107,00	316.799.201,50	66,21	157.257.191,50
Jumlah A		312.917.643.516,26	267.539.845.763,50	85,50	252.978.690.562,59



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
B	Belanja Langsung				
1	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	4.194.529.000,00
2	Belanja Pegawai BLUD	7.114.714.620,00	6.238.195.931,00	87,68	25.250.477.309,00
3	Belanja Pegawai BOS	1.330.356.800,00	257.387.000,00	19,35	591.238.066,41
Jumlah B		8.445.071.420,00	6.495.582.931,00	76,92	30.036.244.375,41
Jumlah Total (A+B)		321.362.714.936,26	274.035.428.694,50	85,27	283.014.934.938,00

Nilai Belanja Pegawai sebesar Rp274.035.428.694,50 sudah termasuk Belanja Pegawai BLUD – non APBDRSUD Mardi Waluyo sebesar Rp6.238.195.931,00. Belanja tidak langsung pegawai selain untuk gaji yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah pasti jumlahnya, ada belanja pegawai yang realisasinya tergantung beberapa syarat tertentu seperti kehadiran pegawai untuk Tambahan Penghasilan kepada Pegawai (TPP) dan prestasi/kinerja untuk insentif pajak daerah.

Belanja pegawai mengalami penurunan karena ada perubahan penganggaran atas belanja jasa pelayanan RSD Mardi Waluyo dari belanja pegawai BLUD ke belanja barang dan jasa BLUD.

Tambahan Penghasilan PNS hanya terealisasi sebesar 76,88% karena:

- Dinas Pendidikan ada penurunan daftar guru yang belum tersertifikasi sedangkan guru yang telah menerima sertifikasi tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan PNS.
- Dinas Kesehatan memberikan Tambahan Penghasilan PNS untuk pegawai fungsional khusus di UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul, Sukorejo, dan Sananwetan hanya selisih dari jumlah Tambahan Penghasilan PNS dan jasa pelayanan.

	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Barang	375.992.469.444,97	329.255.542.203,67	305.220.889.063,90

Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 sebesar Rp329.255.542.203,67 atau 87,57% dari anggaran sebesar Rp375.992.469.444,97. Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 naik sebesar 7,87% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Tahun 2017 sebesar Rp305.220.889.063,90. Belanja Barang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program dan bahan pakai habis, bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas serta belanja pemeliharaan. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 22 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018
(Sebelum Konversi)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Honorarium PNS	2.429.573.300,00	2.079.213.000,00	85,58	2.382.353.400,00
2	Honorarium Non PNS	3.308.195.880,00	3.044.661.311,00	92,03	2.871.836.002,00
3	Belanja Bahan Pakai Habis	11.872.106.710,00	10.944.772.373,00	92,19	10.893.134.647,00
4	Belanja Bahan/Material	11.241.613.224,00	10.563.697.907,00	93,97	25.318.335.877,00
5	Belanja Jasa Kantor	73.440.874.665,00	67.969.686.824,32	92,55	63.322.660.431,00
6	Belanja Premi Asuransi	22.974.675.648,72	7.131.229.880,00	31,04	6.546.276.134,00
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.242.475.260,00	3.481.262.039,00	82,06	3.398.057.743,00
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.574.981.265,00	9.151.805.790,00	86,54	8.339.478.100,00
9	Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	888.439.250,00	690.658.500,00	77,74	656.556.943,00
10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	578.970.900,00	468.648.400,00	80,95	383.920.500,00
11	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.853.731.820,00	5.158.876.945,00	88,13	4.478.435.838,00
12	Belanja Makanan dan Minuman	24.831.052.668,00	22.033.337.030,00	88,73	19.283.758.000,00
13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	499.655.300,00	429.802.700,00	86,02	2.711.990.748,00
14	Belanja Pakaian Kerja	1.696.191.280,00	1.669.401.105,00	98,42	1.564.098.500,00
15	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.308.804.250,00	4.188.109.950,00	97,20	3.591.917.000,00
16	Belanja Perjalanan Dinas	34.874.474.686,00	31.560.809.149,99	90,50	29.982.120.360,50
17	Belanja Kursus, pelatihan, Sosialisasi dan BinteK/Sosialisasi	7.569.188.500,00	6.915.777.943,96	91,37	3.161.684.200,00
18	Belanja Pemeliharaan	17.003.425.327,00	16.232.459.160,00	95,47	11.164.821.781,00
19	Belanja Jasa Konsultasi	6.638.778.650,00	6.048.158.168,00	91,10	4.124.655.350,00
20	Belanja Hibah Barang/Jasa	6.157.073.685,00	6.056.859.958,00	98,37	2.086.520.000,00
21	Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga	19.604.798.155,00	18.707.114.730,00	95,42	468.755.000,00
22	Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.761.553.160,00	1.744.697.985,00	99,04	858.124.182,00
23	Belanja Materi Pendidikan dan Perlengkapan Sekolah	10.855.864.525,00	7.953.863.000,00	73,27	10.105.594.350,00
24	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	867.025.250,00	785.225.000,00	90,57	712.750.000,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.666.612.322,25	89.358.103.387,78	93,41	68.859.503.196,39
26	Belanja Barang Non Kapitalisasi	1.462.272.140,00	1.368.445.167,00	93,58	1.446.859.006,00
27	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	7.701.172.736,00	5.368.514.959,52	69,71	5.263.881.829,50
28	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.850.760.728,00	12.914.324.528,10	100,49	13.798.084.945,51
Jumlah		401.754.341.284,97	354.019.516.891,67	88,12	307.776.164.063,90

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp24.763.974.688,00 dikonversi menjadi Belanja hibah dan belanja bantuan sosial karena merupakan belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yaitu hibah dan bantuan sosial berupa barang. Belanja Barang dan Jasa yang dikonversi ke Belanja Hibah sebesar Rp6.056.859.958,00 dan ke Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp18.707.114.730,00. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 pada Pasal 21 yang disebutkan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Atas dasar tersebut maka untuk hibah barang yang ada di Organisasi Perangkat Daerah dikonversi sesuai dengan peraturan dimaksud. Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2018 setelah dikonversi sebagai berikut:

**Tabel 23 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018
(Setelah Konversi)**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Honorarium PNS	2.429.573.300,00	2.079.213.000,00	85,58	2.382.353.400,00
2	Honorarium Non PNS	3.308.195.880,00	3.044.661.311,00	92,03	2.871.836.002,00
3	Belanja Bahan Pakai Habis	11.872.106.710,00	10.944.772.373,00	92,19	10.893.134.647,00
4	Belanja Bahan/Material	11.241.613.224,00	10.563.697.907,00	93,97	25.318.335.877,00
5	Belanja Jasa Kantor	73.440.874.665,00	67.969.686.824,32	92,55	63.322.660.431,00
6	Belanja Premi Asuransi	22.974.675.648,72	7.131.229.880,00	31,04	6.546.276.134,00
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.242.475.260,00	3.481.262.039,00	82,06	3.398.057.743,00
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.574.981.265,00	9.151.805.790,00	86,54	8.339.478.100,00
9	Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	888.439.250,00	690.658.500,00	77,74	656.556.943,00
10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	578.970.900,00	468.648.400,00	80,95	383.920.500,00
11	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.853.731.820,00	5.158.876.945,00	88,13	4.478.435.838,00
12	Belanja Makanan dan Minuman	24.831.052.668,00	22.033.337.030,00	88,73	19.283.758.000,00
13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	499.655.300,00	429.802.700,00	86,02	2.711.990.748,00
14	Belanja Pakaian Kerja	1.696.191.280,00	1.669.401.105,00	98,42	1.564.098.500,00
15	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.308.804.250,00	4.188.109.950,00	97,20	3.591.917.000,00
16	Belanja Perjalanan Dinas	34.874.474.686,00	31.560.809.149,99	90,50	29.982.120.360,50
17	Belanja Kursus, pelatihan, Sosialisasi dan BinteK/Sosialisasi	7.569.188.500,00	6.915.777.943,96	91,37	3.161.684.200,00
18	Belanja Pemeliharaan	17.003.425.327,00	16.232.459.160,00	95,47	11.164.821.781,00
19	Belanja Jasa Konsultasi	6.638.778.650,00	6.048.158.168,00	91,10	4.124.655.350,00
20	Belanja Hibah Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.761.553.160,00	1.744.697.985,00	99,04	858.124.182,00
23	Belanja Materi Pendidikan dan Perlengkapan Sekolah	10.855.864.525,00	7.953.863.000,00	73,27	10.105.594.350,00
24	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	867.025.250,00	785.225.000,00	90,57	712.750.000,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.666.612.322,25	89.358.103.387,78	93,41	68.859.503.196,39
26	Belanja Barang Non Kapitalisasi	1.462.272.140,00	1.368.445.167,00	93,58	1.446.859.006,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
27	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	7.701.172.736,00	5.368.514.959,52	69,71	5.263.881.829,50
28	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.850.760.728,00	12.914.324.528,10	100,49	13.798.084.945,51
Jumlah		375.992.469.444,97	329.255.542.203,67	87,57	305.220.889.063,90

Belanja premi asuransi hanya terealisasi sebesar 31,04% karena sampai dengan akhir tahun 2018, Program *Universal Health Coverage* masih dalam proses pendataan peserta Jaminan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan. Program *Universal Health Coverage* adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Dinas Kesehatan menargetkan TA 2019 proses pendataan selesai dan disetujui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Belanja barang dan jasa BLUD mengalami kenaikan karena ada perubahan penganggaran atas belanja jasa pelayanan kesehatan dari belanja pegawai BLUD ke barang dan jasa BLUD.

	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Bunga Tahun 2018 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00.

	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00.

	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5. Belanja Hibah	26.391.359.685,00	24.368.685.958,00	18.275.705.500,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018 sebesar Rp24.368.685.958,00 atau 92,34% dari anggaran sebesar Rp26.391.359.685,00 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018 naik 33,34% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2017 sebesar Rp18.275.705.500,00. Adapun rincian Belanja Hibah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018
(Setelah Konversi)

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	675.000.000,00
2	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	7.978.000.000,00	7.565.900.000,00	94,83	8.348.145.500,00
3	Hibah kepada Kelompok/anggota masyarakat	7.318.686.000,00	6.428.726.000,00	87,84	3.314.640.000,00
4	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	4.137.600.000,00	3.517.200.000,00	85,01	3.851.400.000,00
5	Belanja Hibah Barang/Jasa	6.157.073.685,00	6.056.859.958,00	98,37	2.086.520.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah	26.391.359.685,00	24.368.685.958,00	92,34	18.275.705.500,00
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus. Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kota Blitar adalah sebesar Rp24.368.685.958,00. Realisasi tersebut termasuk belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp6.056.859.958,00 yang dikonversi sebagai Belanja Hibah. Rincian penerima hibah tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	800.000.000,00
	Belanja Hibah kepada TNI	400.000.000,00
	Belanja Hibah kepada POLRI	400.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	7.565.900.000,00
	Belanja Hibah kepada KONI	5.500.000.000,00
	Belanja Hibah kepada KORPRI	498.000.000,00
	Belanja Hibah kepada PRAMUKA	415.000.000,00
	Belanja Hibah kepada PMI	150.000.000,00
	Belanja Hibah kepada BNK	350.000.000,00
	Belanja Hibah kepada MUI	100.000.000,00
	Belanja Hibah kepada PIH	200.000.000,00
	Belanja Hibah kepada DEKOPINDA	150.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Akademi Komunitas	102.900.000,00
	Belanja Hibah kepada IPHI	50.000.000,00
	Belanja Hibah kepada PGRI	50.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	6.428.726.000,00
	Belanja Hibah Kepada Madin dan Guru Swasta (BPPDGS)	1.240.050.000,00
	Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta	4.663.676.000,00
	Belanja Hibah kepada Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Jemaat Blitar	100.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Musholla Al Huda	25.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Musholla Bung Karno	25.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Langgar Wakaf Darus Salam Maduran	25.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Musholla Al Mubarak	25.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Langgar Al Ikhwan	25.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Masjid Al Falakh	25.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Musholla Baitur Rochim	25.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Musholla Al Hidayah	25.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Huda	30.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Iman	20.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Langgar Shobari	20.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Realisasi
	Belanja Hibah kepada Mushola Baitul Mukmin	15.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Mushola Ar Ridho	25.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Masjid Al Mutaqin	40.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Masjid Hidayatullah	75.000.000,00
4	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	3.517.200.000,00
	Belanja Hibah PAUD ABA IV	13.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD BINA INSANI	19.200.000,00
	Belanja Hibah PAUD CERIA	18.600.000,00
	Belanja Hibah PAUD HARMONI	8.400.000,00
	Belanja Hibah PAUD HIDAYATULLAH	37.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD ALAM AL-GHIFARI	38.400.000,00
	Belanja Hibah PAUD AR-ROHMAH VII	17.400.000,00
	Belanja Hibah PAUD TIARA BUNDA	13.200.000,00
	Belanja Hibah PAUD PERWARI	8.400.000,00
	Belanja Hibah PAUD QURROTA AYUN	13.200.000,00
	Belanja Hibah PAUD SABANA	7.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD SABILA MANDIRI	38.400.000,00
	Belanja Hibah PAUD SAINT HANNA	43.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD SANTA MARIA	10.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD TAB SYUHADA HAJI	93.000.000,00
	Belanja Hibah PAUD TUNAS BANGSA	7.200.000,00
	Belanja Hibah PAUD AR-ROHMAH XII	10.800.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU HARAPAN KITA	12.000.000,00
	Belanja Hibah POS PAUD ARIES	9.000.000,00
	Belanja Hibah POS PAUD MUSTOKOWENI	13.800.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU KERANTIL	16.200.000,00
	Belanja Hibah TP KENANGA	12.600.000,00
	Belanja Hibah TP LEO	19.200.000,00
	Belanja Hibah TP PELANGI BANGSA	15.600.000,00
	Belanja Hibah TP RAJAWALI	18.000.000,00
	Belanja Hibah TPA BUAH HATI	15.000.000,00
	Belanja Hibah TK ABA IV	27.000.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH CABEAN 1	29.400.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH CABEAN 2	19.800.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH GEDOG 2	44.400.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH II PLOSOKEREP	93.600.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH IV GEDOG 1	34.200.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH IX KARANGTENGAH	30.600.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH KLAMPOK 1	34.800.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH KLAMPOK 2	50.400.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Realisasi
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH XII SANANWETAN	24.000.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH XI BENDOGERIT	49.800.000,00
	Belanja Hibah TK AL-HIDAYAH XXVIII SANANWETAN II	54.000.000,00
	Belanja Hibah TK ALAM AL GHIFARI	88.800.000,00
	Belanja Hibah TK BUDI UTOMO	16.800.000,00
	Belanja Hibah TK K SANTA MARIA	79.200.000,00
	Belanja Hibah TK KARTIKA IV - 43	30.000.000,00
	Belanja Hibah TK KEMALA BHAYANGKARI 44	26.400.000,00
	Belanja Hibah TK KRISTEN HARMONI	33.600.000,00
	Belanja Hibah TK KUNCUP MELATI	27.600.000,00
	Belanja Hibah TK PANCASILA	23.400.000,00
	Belanja Hibah TK PERTIWI	51.600.000,00
	Belanja Hibah TK PKK 1 BENDOGERIT	14.400.000,00
	Belanja Hibah TK SABANA	9.000.000,00
	Belanja Hibah TK SAINT HANNA	55.200.000,00
	Belanja Hibah TK TRISULA 2	10.200.000,00
	Belanja Hibah KB ARROHMAH	21.000.000,00
	Belanja Hibah TPA TAB SYUHADA HAJI	10.800.000,00
	Belanja Hibah TPA ABA IV	17.400.000,00
	Belanja Hibah TPA ALAM GHIFARI	9.000.000,00
	Belanja Hibah PAUD TAAM AL IKHLAS	25.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD AL HIDAYAH SUKOREJO	13.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD AL-AZHAR	9.600.000,00
	Belanja Hibah PAUD AL-IKHLASH	7.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD ANUGRAH	7.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD AR ROHMAH V WAHID HASYIM	8.400.000,00
	Belanja Hibah PAUD BEN TAQWA	11.400.000,00
	Belanja Hibah PAUD BINTANG FAJAR	11.400.000,00
	Belanja Hibah PAUD CERAH	13.200.000,00
	Belanja Hibah PAUD DARUSSALAM	9.600.000,00
	Belanja Hibah PAUD DHARMA WANITA	15.000.000,00
	Belanja Hibah PAUD HARAPAN BANGSA	14.400.000,00
	Belanja Hibah PAUD MALAABUS SIBYAN	7.200.000,00
	Belanja Hibah PAUD PELANGI	18.600.000,00
	Belanja Hibah PAUD RAHAYU	7.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD SAYANG BUNDA	25.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD YOS SUDARSO	7.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD ZAHRA ARROHMAH III	8.400.000,00
	Belanja Hibah PAUD AR ROHMAH IX DIMORO	11.400.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU ADENIUM	7.200.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Realisasi
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU BLIMBING 1	12.000.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU MANGGAR INDAH	18.000.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU PUSPASARI	13.200.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU ARYO BLITAR	25.800.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU KUSUMA BANGSA	21.000.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU POS PAUD ASAHAN	12.600.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU FLAMBOYAN	10.800.000,00
	Belanja Hibah TK AL-HIDAYAH XXI JAUSENAN	13.200.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH 17 TANJUNGSARI	22.200.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH 2 KARANGSARI	23.400.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH DARUSSALAM 2	19.800.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH SUKOREJO	49.800.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH TLUMPU	76.800.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH VI WAHID HASYIM	43.200.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH VIII DARUSSALAM	58.800.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH XXII BLITAR	67.200.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH XXV AL HIKMAH DIMORO	24.000.000,00
	Belanja Hibah TK DHARMA WANITA TANJUNGSARI	40.800.000,00
	Belanja Hibah TK HARAPAN BANGSA	36.000.000,00
	Belanja Hibah TK ISLAM BEN TAQWA	40.800.000,00
	Belanja Hibah TK K YOS SUDARSO	46.800.000,00
	Belanja Hibah TK PKK 1 SUKOREJO	15.000.000,00
	Belanja Hibah TK PKK 2 SUKOREJO	15.000.000,00
	Belanja Hibah TK PKK KELURAHAN TURI	9.600.000,00
	Belanja Hibah TK TRISULA 7	12.600.000,00
	Belanja Hibah TPA HARAPAN BANGSA	7.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD ABA I	10.200.000,00
	Belanja Hibah PAUD ABA II	11.400.000,00
	Belanja Hibah PAUD ABA III	19.200.000,00
	Belanja Hibah PAUD ISTIQOMATURROHMAH	22.200.000,00
	Belanja Hibah PAUD MEKAR BANGSA	18.000.000,00
	Belanja Hibah PAUD NURUL HUDA	16.200.000,00
	Belanja Hibah PAUD LAB. UNIVERSITAS NEGERI MALANG KOTA BLITAR	16.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD SURYA AGUNG	9.000.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU KELUD	10.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD SRIGADING	10.800.000,00
	Belanja Hibah PAUD DINAR NASYIAH	10.200.000,00
	Belanja Hibah PAUD ARROHMAH	11.400.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU ANGGREK	8.400.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU DELIMA	7.200.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Realisasi
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU MELATI I	9.000.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU MELATI II	13.800.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU MELATI III	13.200.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU MELATI IV	11.400.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU MELATI VII	10.800.000,00
	Belanja Hibah POS PAUD SARTIKA	18.000.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU MAWAR	7.800.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU MELATI VI	11.400.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU MELATI BENDO	7.200.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU SAWUNGALING 1	18.000.000,00
	Belanja Hibah TAMAN POSYANDU PERMATA BUNDA	9.600.000,00
	Belanja Hibah TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL	72.000.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH BENDO	31.200.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH DARUL FARQI	12.600.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH DAWUHAN	30.000.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH KAUMAN	114.600.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH NGADIREJO	94.200.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH TANGGUNG	43.200.000,00
	Belanja Hibah TK AL HIDAYAH XXIV SENTUL	33.600.000,00
	Belanja Hibah TK DHARMA WANITA 2 TANGGUNG	9.600.000,00
	Belanja Hibah TK HIDAYATURROHMAH	45.000.000,00
	Belanja Hibah TK IDHATA KOTA BLITAR	21.000.000,00
	Belanja Hibah TK LABORATORIUM UM	42.000.000,00
	Belanja Hibah TK PKK 1 SENTUL	25.200.000,00
	Belanja Hibah TK PKK 2 NGADIREJO	12.000.000,00
	Belanja Hibah TK PKK 2 SENTUL	24.000.000,00
	Belanja Hibah TK TRISULA 1	18.000.000,00
	Belanja Hibah TAB AL KAUTSAR	15.000.000,00
	Belanja Hibah TPA ARROHMAH	9.600.000,00
	Belanja Hibah TPA ABA 1	8.400.000,00
	Belanja Hibah KB PAUD BIYUNG EMBAN	8.400.000,00
	Belanja Hibah PAUD HARAPAN BUNDA	9.000.000,00
5	Belanja Hibah Barang/Jasa	6.056.859.958,00
	Dinas Pendidikan	3.418.663.308,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.415.994.150,00
	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	222.202.500,00
Jumlah		24.368.685.958,00

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
6. Belanja	26.582.398.155,00	22.691.789.730,00	2.264.934.920,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Realisasi
----	--------	-----------

Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 sebesar Rp22.691.789.730,00 atau 85,36% dari anggaran sebesar Rp26.582.398.155,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 turun sebesar 901,87% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp2.264.934.920,00. Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 26 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018
(Setelah Konversi)**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.440.000.000,00	2.247.500.000,00	92,11	1.554.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Santunan kematian	2.000.000.000,00	1.223.200.000,00	61,16	0,00
3	Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya	1.000.000.000,00	283.950.000,00	28,40	242.179.920,00
4	Belanja Bantuan Sosial Santunan Anak yatim	275.080.000,00	230.025.000,00	83,62	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial Khusus Siswa miskin	1.262.520.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	19.604.798.155,00	18.707.114.730,00	95,42	468.755.000,00
Jumlah		26.582.398.155,00	22.691.789.730,00	85,36	2.264.934.920,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22.691.789.730,00 diantaranya termasuk bantuan sosial berupa barang belanja barang dan jasa sebesar Rp18.707.114.730,00 yang dikonversi ke Belanja Bantuan Sosial. Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2012, bahwa belanja bantuan sosial diberikan untuk mengurangi dan mengatasi agar masyarakat tidak terkena, menyandang masalah sosial, dan atau risiko sosial. Oleh karena itu bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana baik secara individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. Beberapa contoh bantuan sosial pada tahun 2018 misalnya santunan kematian, santunan anak yatim/piatu, beras fakir miskin, bantuan korban bencana alam/kebakaran, dan lain sebagainya.

Belanja bantuan sosial mengalami kenaikan dari tahun lalu dikarenakan adanya perubahan penganggaran atas Rastra (Beras Sejahtera) atau bantuan pangan non tunai dari rekening bahan makanan dan minuman ke belanja bantuan sosial.

	<u>Anggaran 2018 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2018 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2017 (Rp)</u>
7. Belanja Bantuan Keuangan	499.999.960,00	499.984.500,00	499.984.500,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018 sebesar Rp499.984.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp499.999.960,00. Tidak ada perubahan nilai



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

realisasi antara Tahun 2018 dan Tahun 2017 yaitu tetap sebesar Rp499.984.500,00.

Tabel 27 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	499.999.960,00	499.984.500,00	100,00	499.984.500,00
Jumlah		499.999.960,00	499.984.500,00	100,00	499.984.500,00

Adapun rincian bantuan keuangan kepada partai politik sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Penerima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No.	Partai Politik	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	224.404.130,00	224.404.000,00	100,00	224.404.000,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	76.202.650,00	76.200.000,00	100,00	76.200.000,00
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	47.817.080,00	47.817.000,00	100,00	47.817.000,00
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	40.373.580,00	40.373.500,00	100,00	40.373.500,00
5	Partai Demokrat (PD)	32.807.960,00	32.800.000,00	99,98	32.800.000,00
6	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	21.829.120,00	21.829.000,00	100,00	21.829.000,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	19.206.540,00	19.206.000,00	100,00	19.206.000,00
8	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	19.065.120,00	19.065.000,00	100,00	19.065.000,00
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	18.293.780,00	18.290.000,00	99,98	18.290.000,00
Jumlah		499.999.960,00	499.984.500,00	100,00	499.984.500,00

Adapun tiga besar penerima bantuan keuangan kepada partai politik antara lain PDIP, Gerindra, dan PKB dan paling rendah penerima bantuan adalah PKS.

7.5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp160.034.400.213,66 atau 72,96% dari anggaran sebesar Rp219.355.772.955,28. Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 turun 8,55% dibandingkan dengan Belanja Modal Tahun 2017 sebesar Rp174.989.696.378,36. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2018 sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Belanja Modal TA 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Tanah	157.517.800,00	138.767.500,00	88,10	1.180.056.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	69.408.556.907,28	51.554.910.344,41	74,28	42.171.266.474,36
3	Belanja Gedung dan Bangunan	84.940.190.569,00	45.978.095.429,99	54,13	57.446.496.869,52
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	58.825.311.534,00	57.003.831.744,26	96,90	69.541.682.154,48



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.636.634.265,00	3.439.456.815,00	94,58	4.164.189.780,00
6	Belanja Aset Lainnya	2.387.561.880,00	1.919.338.380,00	80,39	486.005.100,00
Jumlah		219.355.772.955,28	160.034.400.213,66	72,96	174.989.696.378,36

Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 termasuk di dalamnya Belanja Modal BLUD-RSUD Mardi Waluyo Tahun 2018 sebesar Rp147.863.999.056,49 yang terdiri dari:

a. Belanja Modal BLUD - dana APBD	Rp	46.666.122.784,43
b. Belanja Modal BLUD – non APBD	Rp	101.197.879.272,06
Jumlah Belanja Modal BLUD	Rp	147.863.999.056,49

dan termasuk di dalamnya Belanja Modal BOS Tahun 2018 sebesar Rp3.579.497.515,00 yang terdiri dari:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Rp	1.325.335.150,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	Rp	63.283.500,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BOS	Rp	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Rp	2.184.378.865,00
Belanja Modal Aset Lainnya BOS	Rp	6.500.000,00
Jumlah Belanja Modal BOS	Rp	3.579.497.515,00

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1. Belanja Tanah	157.517.800,00	138.767.500,00	1.180.056.000,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun 2018 sebesar Rp138.767.500,00 atau 88,10% dari anggaran sebesar Rp157.517.800,00. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2018 turun 88,24% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah Tahun 2017 sebesar Rp1.180.056.000,00. Rincian Belanja Modal pengadaan tanah pada tabel berikut ini:

Tabel 30 Rincian Belanja Modal Tanah Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	2018			Realisasi 2017
			Anggaran	Realisasi	%	
1	Tanah lapangan parkir	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	1.180.056.000,00
2	Tanah Untuk Bangunan Air	Dinas Lingkungan Hidup	157.517.800,00	138.767.500,00	88,10	0,00
Jumlah			157.517.800,00	138.767.500,00	88,10	1.180.056.000,00

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2. Belanja	69.408.556.907,28	51.554.910.344,41	42.171.266.474,36



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Peralatan
dan Mesin**

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2018 sebesar Rp51.554.910.344,41 atau 74,28% dari anggaran sebesar Rp69.408.556.907,28. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2018 naik 22,25% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp42.171.266.474,36. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Alat-alat Berat	169.777.000,00	166.126.000,00	97,85	0,00
2	Alat Bantu	1.119.152.030,00	1.047.373.559,00	93,59	1.086.159.416,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6.004.423.690,00	5.666.895.154,70	94,38	1.802.824.500,00
4	Alat-alat angkutan Darat tidak bermotor	3.827.315.100,00	3.817.147.500,00	99,73	11.340.027.800,00
5	Alat-alat Bengkel/Mesin	339.864.000,00	335.316.394,00	98,66	126.967.700,00
6	Alat Bengkel Tak Bermesin	67.241.800,00	63.664.300,00	94,68	49.606.800,00
7	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	357.188.200,00	348.965.400,00	97,70	19.500.000,00
8	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	103.214.290,00	97.164.750,00	94,14	75.772.825,00
9	Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.920.577.733,00	2.551.563.896,00	87,37	983.628.602,00
10	Komputer	20.341.372.586,00	9.310.030.475,00	45,77	3.531.162.896,00
11	Mebeulair	292.353.100,00	282.972.550,00	96,79	175.339.000,00
12	Peralatan Dapur/Rumah Tangga	4.930.563.995,00	4.555.330.906,00	92,39	2.794.242.725,00
13	Alat-alat Studio	2.809.565.375,00	2.682.856.150,00	95,49	1.458.612.334,00
14	Alat-alat Komunikasi	690.017.550,00	631.732.208,00	91,55	294.396.766,00
15	Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alat-alat Ukur	3.244.686.500,00	1.937.152.200,00	59,70	20.825.000,00
17	Alat-alat Kedokteran	9.667.120.401,00	9.484.634.969,43	98,11	11.584.843.971,80
18	Alat Kesehatan	142.935.000,00	135.385.000,00	94,72	24.460.000,00
19	Alat-alat Laboratorium	126.490.000,00	121.510.454,00	96,06	76.042.300,00
20	Alat-alat Laboratorium Penunjang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	199.698.650,00
21	Alat-alat Keamanan	1.725.929.702,00	1.667.489.875,00	96,61	1.345.352.776,00
22	Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	301.802.200,00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.819.520.486,00	5.326.263.453,28	68,11	4.070.842.303,56
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.709.248.369,28	1.325.335.150,00	48,92	809.157.909,00
Jumlah		69.408.556.907,28	51.554.910.344,41	74,28	42.171.266.474,36

Anggaran 2018
(Rp)

Realisasi 2018
(Rp)

Realisasi 2017
(Rp)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Belanja Gedung dan Bangunan	84.940.190.569,00	45.978.095.429,99	57.446.496.869,52
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp45.978.095.429,99 atau 54,13% dari anggaran sebesar Rp84.940.190.569,00. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2018 turun sebesar 19,96% dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2017 sebesar Rp57.446.496.869,52 Adapun rincian Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017
(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	72.476.230.069,00	43.808.565.429,99	60,45	54.632.994.194,52
2	Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	249.145.000,00
3	Konstruksi Pagar/Gapura/Taman Menara	956.698.000,00	895.532.000,00	93,61	931.741.300,00
4	Rambu-rambu Lalu Lintas	973.483.000,00	968.856.000,00	99,52	835.576.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	178.823.250,00
6	Konstruksi Gedung dan Bangunan BLUD	10.449.980.000,00	226.858.500,00	2,17	556.213.625,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	68.799.500,00	63.283.500,00	91,98	62.003.500,00
Jumlah		84.940.190.569,00	45.978.095.429,99	54,13	57.446.496.869,52

	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	58.825.311.534,00	57.003.831.744,26	69.541.682.154,48

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2018 sebesar Rp57.003.831.744,26 atau 96,90% dari anggaran sebesar Rp58.825.311.534,00. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2018 turun 18,03% dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2017 sebesar Rp69.541.682.154,48. Adapun rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan 2017
(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Jalan	30.638.216.644,00	30.283.634.777,26	98,84	37.351.887.461,00
2	Jembatan	618.993.000,00	537.677.000,00	86,86	544.881.750,00
3	Jaringan Air (Irigasi)	5.354.677.000,00	5.309.970.350,00	99,17	9.574.744.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
4	Instalasi Telepon	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	30.826.721,00
5	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	13.492.263.387,00
6	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	635.001.000,00	631.795.000,00	99,50	3.926.020.574,90
7	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.661.562.670,00	7.588.648.200,00	99,05	217.991.710,00
8	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	18.000.000,00	17.825.000,00	99,03	28.275.000,00
9	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	199.053.000,00	196.118.000,00	98,53	31.630.000,00
10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air tanah	598.722.000,00	596.882.000,00	99,69	220.682.000,00
11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	95.175.000,00	47.960.000,00	50,39	833.864.150,58
12	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	10.882.889.400,00	10.742.009.747,00	98,71	35.155.000,00
13	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	48.500.000,00	48.175.000,00	99,33	45.450.000,00
14	Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan	2.032.521.820,00	961.136.670,00	47,29	3.162.260.400,00
15	Belanja Modal Jalan Instalasi Jaringan BOS	0,00	0,00	0,00	45.750.000,00
Jumlah		58.825.311.534,00	57.003.831.744,26	96,90	69.541.682.154,48

	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	3.636.634.265,00	3.439.456.815,00	4.164.189.780,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp3.439.456.815,00 atau 94,58% dari anggaran sebesar Rp3.636.634.265,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 turun 17,40% dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp4.164.189.780,00. Adapun rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Buku Perpustakaan	708.935.000,00	684.079.950,00	96,49	426.004.500,00
2	Barang-Barang Perpustakaan	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga	527.749.500,00	502.223.000,00	95,16	2.115.100.400,00
4	Hewan/Ternak dan Tanaman	36.275.000,00	36.275.000,00	100,00	70.805.000,00
5	Tanaman Hias	32.825.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.328.489.765,00	2.184.378.865,00	93,81	1.552.279.880,00
Jumlah		3.636.634.265,00	3.439.456.815,00	94,58	4.164.189.780,00

	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
6. Belanja Aset Lainnya	2.387.561.880,00	1.919.338.380,00	486.005.100,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp1.919.338.380,00 atau 80,39% dari anggaran sebesar Rp2.387.561.880,00. Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2018 turun 294,92% dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lainnya Tahun 2017 sebesar Rp486.005.100,00. Adapun rincian penerimaan Belanja Aset Lainnya Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Software, DED, Kajian	2.118.457.880,00	1.864.383.380,00	88,01	485.410.100,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	255.604.000,00	48.455.000,00	18,96	0,00
3	Belanja Modal Aset Lainnya BOS	13.500.000,00	6.500.000,00	48,15	595.000,00
Jumlah		2.387.561.880,00	1.919.338.380,00	80,39	486.005.100,00

7.5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	144.678.144,00	31.163.872,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018 sebesar Rp144.678.144,00 atau 7,23% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018 naik 364,25% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2017 sebesar Rp31.163.872,00.

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp144.678.144,00 terdiri dari:

- a. Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kejadian Luar Biasa Difteri (KLB) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2018 Rp107.933.000,00;
- b. Pembayaran Belanja Tidak Terduga KLB Tahap II Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2018 Rp36.745.144,00.

7.5.1.2.4. Transfer

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1. Belanja Bagi Hasil Retribusi	19.650.000,00	12.243.680,00	0,00

Realisasi Belanja Transfer merupakan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2018 sebesar Rp12.243.680,00 atau 68,00% dari anggaran sebesar Rp19.650.000,00. Realisasi Bagi Hasil Retribusi Tahun 2018 naik 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi adalah pembayaran Dana Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah atas pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang kepada Kabupaten Malang.

Realisasi Belanja Per SKPD TA. 2018

Realisasi Belanja pada masing-masing SKPD di Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 36 Rincian Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	%	Realisasi 2017
----	------	------	---	----------------



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan	237.990.627.596,28	188.249.381.789,10	79,10	198.293.882.615,92
2	Dinas Kesehatan	68.463.222.402,72	44.114.308.600,00	64,44	39.729.725.381,00
3	RSUD Mardi Waluyo	172.670.188.006,71	147.863.999.056,49	85,63	134.839.735.575,75
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.443.631.780,00	58.316.663.469,26	96,48	84.717.969.177,50
5	Dinas Perumahan Rakyat	13.855.206.150,00	13.181.575.686,70	95,14	10.031.303.787,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.571.570.712,00	8.663.347.306,00	90,51	5.792.451.814,00
7	Dinas Perhubungan	23.709.086.599,00	21.429.259.709,50	90,38	19.745.230.750,50
8	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	21.497.115.564,00	10.273.198.658,00	47,79	5.561.188.313,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	29.915.061.446,00	27.219.614.519,99	90,99	26.071.237.550,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.882.222.662,00	6.163.372.273,00	89,55	4.783.145.274,00
11	Dinas Sosial	26.803.554.314,00	25.353.664.396,00	94,59	22.361.367.099,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.558.619.042,00	4.088.906.827,00	89,70	3.923.424.246,00
13	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	7.439.773.539,00	6.786.369.925,00	91,22	5.153.381.263,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja	12.879.781.727,00	11.765.276.416,00	91,35	10.315.834.664,00
15	Sekretariat Daerah	42.530.485.487,81	36.789.299.672,01	86,50	38.048.795.124,00
16	Sekretariat DPRD	27.005.701.462,00	23.852.557.116,00	88,32	20.413.130.441,00
17	Inspektorat Daerah	7.967.603.902,00	6.726.593.904,00	84,42	4.504.647.063,00
18	Kecamatan Kepanjenkidul	16.348.238.020,33	15.996.133.052,64	97,85	13.276.459.584,50
19	Kecamatan Sukorejo	16.205.237.126,33	15.181.142.000,00	93,68	12.879.827.312,50
20	Kecamatan Sananwetan	15.526.175.503,33	14.859.812.451,68	95,71	14.157.270.464,00
21	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.180.240.520,00	6.520.157.985,00	90,81	4.911.960.080,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	15.160.112.714,00	12.160.203.237,96	80,21	13.499.362.276,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	51.646.483.135,00	41.719.681.783,00	80,78	34.326.384.107,59
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PPdan KB	9.371.389.483,00	7.557.615.374,00	80,65	7.753.985.055,00
25	Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	4.823.279.945,00	4.441.993.865,50	92,09	3.817.913.163,00
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.747.045.288,00	12.835.418.097,00	93,37	10.901.741.913,00
27	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20.313.057.332,00	15.705.539.134,00	77,32	15.190.983.721,00
28	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	9.034.932.730,00	8.653.249.615,00	95,78	5.497.093.894,00
29	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	18.664.720.947,00	14.574.417.204,00	78,09	13.797.877.463,00
Jumlah		972.204.365.136,51	811.042.753.123,83	83,42	784.297.309.172,26

7.5.1. 3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
(Rp)	(Rp)	(Rp)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Penerimaan 130.512.072.812,46 130.738.072.378,33 64.549.149.325,70
Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp130.738.072.378,33 atau 100,17% dari anggaran sebesar Rp130.512.072.812,46. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 naik 102,54% dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017 sebesar Rp64.549.149.325,70. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	129.194.198.394,42	129.223.082.686,32	100,02
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.317.874.418,04	1.514.989.692,01	114,96
Jumlah		130.512.072.812,46	130.738.072.378,33	100,17

2. Pengeluaran Anggaran 2018 Realisasi 2018 Realisasi 2017
Pembiayaan (Rp) (Rp) (Rp)
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018 naik 50,00% dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Rp1.500.000.000,00 sebagai investasi pada PDAM Kota Blitar dan sebesar Rp1.500.000.000,00 ditempatkan di PD BPR Artha Praja.

7.5.1. 4. SiLPA/SiKPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu tahun anggaran. Realisasi SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp211.104.495.278,46 atau lebih besar 63,38% jika dibandingkan dengan saldo SiLPA Tahun 2017 sebesar Rp129.194.198.394,42. Perhitungan SiLPA Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Total Pendapatan Tahun 2018	Rp	894.409.176.023,96
b. Total Belanja Tahun 2018	Rp	811.042.753.123,83
c. Surplus/(Defisit) (a-b)	Rp	83.366.422.900,13
d. Pembiayaan Neto	Rp	127.738.072.378,33
SiLPA (c+d)	Rp	211.104.495.278,46

Jumlah SiLPA sebesar Rp211.104.495.278,46 terdiri dari:

a. Kas di Kas Daerah (giro dan deposito)	Rp	191.485.363.908,07
b. Kas di BLUD – RSD Mardi Waluyo	Rp	17.177.448.413,71



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

c.	Kas di Kapitasi JKN Puskesmas Kepanjenkidul	Rp	49.400.351,00
d.	Kas di Kapitasi JKN Puskesmas Sananwetan	Rp	153.378.106,00
e.	Kas di Kapitasi JKN Puskesmas Sukorejo	Rp	162.408.172,00
f.	Kas di Kas BOSNAS	Rp	2.082.743.069,59
Dikurangi :			
g.	Utang PFK BOS (pajak yang belum disetor TA 2018)	Rp	(6.246.741,91)
SiLPA		Rp	211.104.495.278,46



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) periode tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan komponen laporan keuangan yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan selain Laporan Arus Kas, yang terdiri dari pos-pos yang mencakup:

7.5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	129.194.198.394,42	62.482.372.794,13

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp129.194.198.394,42 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017.

7.5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Penggunaan SAL	129.225.195.222,19	63.715.979.878,44

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp129.225.195.222,19 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2017 yang dipergunakan untuk pos-pos Pembiayaan tahun berjalan.

7.5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
SILPA	211.104.495.278,46	129.194.198.394,42

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp211.104.495.278,46 merupakan penjumlahan dari nominal Pembiayaan Net sebesar Rp127.738.072.378,33 dengan Surplus Anggaran sebesar Rp83.366.422.900,13.

7.5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00.

7.5.2.5. Lain – lain

Pos Lain-lain pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2018 sebesar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp0,00.

7.5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	211.075.610.986,56	129.194.198.394,42
Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp211.075.610.986,56 yang merupakan penjumlahan Subtotal (1-2) yaitu Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, dengan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Pos Lain-lain.		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.3. NERACA

7.5.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non-lancar.

7.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BOSNAS, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di Kapitasi JKN, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi, Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah, Piutang Bunga, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Belanja Dibayar Dimuka, Asuransi Dibayar Dimuka, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Kas Daerah	191.485.363.908,07	105.168.681.738,89

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp191.485.363.908,07 atau naik 82% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp105.168.681.738,89. Rincian Kas di Kas Daerah sebagai berikut :

Tabel 38 Rincian Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Bank Penyimpan	No. Rekening	Tahun 2018	Tahun 2017
A. Giro:				
1	Bank Jatim (BPD)	141015672	178.485.363.908,07	94.168.681.738,89
2	Bank Jatim (BPD) DAK	141015681	0,00	0,00
Jumlah A			178.485.363.908,07	94.168.681.738,89
B. Deposito:				
1	Bank Jatim	BB.205.01.00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2	Bank BNI	0372831044	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3	Bank BNI	0372825542	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4	Bank Mandiri	100-01-0002047678-4	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5	Bank Mandiri	900-01-0002047669-5	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6	Bank Mandiri	100-01-0002047644-9	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
7	Bank BRI	009010093894013	2.000.000.000,00	0,00
Jumlah B			13.000.000.000,00	11.000.000.000,00
Jumlah Total (A+B)			191.485.363.908,07	105.168.681.738,89

Saldo deposito per 31 Desember 2018 senilai Rp13.000.000.000,00 di empat Bank yaitu Bank Jatim sebanyak 1 (satu) lembar dengan nilai Rp5.000.000.000,00, Bank BNI sebanyak 2 (dua) lembar dengan nilai Rp1.000.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00, Bank Mandiri sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing senilai



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp1.000.000.000,00, dan Bank BRI sebanyak 1 (satu) lembar dengan nilai Rp2.000.000.000,00. Seluruh deposito tersebut merupakan deposito jangka pendek satu bulan.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	104.682.000,00	8.108.769,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp104.682.000,00 atau naik 1190,97% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.108.769,00. Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari pengembalian belanja yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2018. Pengembalian belanja tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari dan Februari Tahun 2019. Adapun Kas di Bendahara Pengeluaran tidak termasuk komponen SiLPA. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

**Tabel 39 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2018 dan 2017**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	0,00	59.500,00	PPh 21
2	Bappeda	0,00	339.319,00	PPN
3	Kecamatan Sukorejo	0,00	101.200,00	PPN
4	Dispendukcapil	0,00	8.750,00	PPh 21
5	BPKAD	104.282.000,00	7.200.000,00	Pengembalian kelebihan Dana Hibah Kesekolah Swasta dan Akademi Komunitas
6	BPKAD	400.000,00	400.000,00	Pengembalian kelebihan Dana Bansos Kematian
Jumlah		104.682.000,00	8.108.769,00	

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
3. Kas BOSNAS	2.082.743.069,59	1.919.021.273,59

Saldo Kas BOSNAS per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.082.743.069,59 atau naik 8,53% dibandingkan dengan saldo Kas BOSNAS per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.919.021.273,59. Kas BOSNAS merupakan penerimaan saldo akhir per 31 Desember 2018 yang terdiri dari uang tunai dan saldo di rekening bank sekolah yang diterima melalui rekening BOS sekolah. Rincian Kas BOSNAS pada UPT Satuan Pendidikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 40 Rincian Saldo Kas
pada Bendahara Bosnas per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Nama Sekolah	Tunai	Bank	Jumlah
1	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1	0,00	440.392.928,64	440.392.928,64
2	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2	4.469.485,00	119.333.348,55	123.802.833,55
3	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 3	0,00	492.077.397,18	492.077.397,18
4	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4	0,00	138.224.660,75	138.224.660,75
5	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 5	8.979,32	147.966.655,66	147.975.634,98
6	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 6	0,00	167.804.342,97	167.804.342,97
7	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7	134,00	274.251.228,65	274.251.362,65
8	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8	0,00	152.645.855,06	152.645.855,06
9	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 9	0,00	14.183.238,90	14.183.238,90
10	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tlumpu	0,00	211.889,92	211.889,92
11	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukorejo 1	0,00	71.942,59	71.942,59
12	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukorejo 2	0,00	465.310,40	465.310,40
13	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukorejo 3	0,00	5.454.749,90	5.454.749,90
14	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Turi 1	1.808.525,16	134.051,34	1.942.576,50
15	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Turi 2	0,00	6.754.161,24	6.754.161,24
16	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Blitar	0,00	285.039,92	285.039,92
17	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karang Sari 1	0,00	157.868,58	157.868,58
18	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karang Sari 2	500,00	8.687.552,41	8.688.052,41
19	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karang Sari 3	9,00	3.914.428,80	3.914.437,80
20	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tanjungsari 1	0,00	4.130.867,57	4.130.867,57
21	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tanjungsari 2	153.493,00	408.142,16	561.635,16
22	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Pakunden 1	1.720.800,00	84.681,46	1.805.481,46
23	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Pakunden 2	0,00	7.164.556,12	7.164.556,12
24	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 1	0,00	4.863.021,60	4.863.021,60
25	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 2	3.735.329,91	10.127.305,83	13.862.635,74
26	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 3	0,00	1.521.489,93	1.521.489,93
27	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 4	0,00	5.394.631,03	5.394.631,03
28	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tanggung 1	0,00	67.851,58	67.851,58
29	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tanggung 2	0,00	1.004.675,88	1.004.675,88
30	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendo 1	0,00	145.860,94	145.860,94
31	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendo 2	0,00	9.313.998,84	9.313.998,84
32	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Ngadirejo 1	0,00	1.617.764,60	1.617.764,60
33	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Ngadirejo 2	3.823,00	637.694,48	641.517,48
34	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenlor 1	0,00	716.610,37	716.610,37
35	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenlor 2	0,00	1.829.974,62	1.829.974,62
36	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenlor 3	0,00	1.093.779,66	1.093.779,66
37	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenkidul 1	1.204.542,00	296.848,86	1.501.390,86
38	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenkidul 2	4.652.244,00	180.175,71	4.832.419,71
39	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kauman 1	0,00	80.956,35	80.956,35
40	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kauman 2	0,00	5.066.079,27	5.066.079,27
41	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 1	27,00	7.360.533,64	7.360.560,64
42	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 2	0,00	6.989.245,75	6.989.245,75
43	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 3	0,00	361.689,63	361.689,63
44	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendogerit 1	1,00	907.623,19	907.624,19



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Sekolah	Tunai	Bank	Jumlah
45	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendogerit 2	125.139,48	86.214,79	211.354,27
46	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Rembang 1	0,00	114.198,39	114.198,39
47	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Rembang 2	0,00	258.012,59	258.012,59
48	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Klampok	0,00	829.358,33	829.358,33
49	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Plosokerep 1	0,00	1.115.640,39	1.115.640,39
50	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Plosokerep 2	4.949,00	98.271,76	103.220,76
51	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Gedog 1	3.025.010,00	1.884.554,10	4.909.564,10
52	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Gedog 2	55,00	7.533.341,11	7.533.396,11
53	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Gedog 3	0,00	194.024,18	194.024,18
54	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri UPT Satuan Pendidikan Karangtengah 1	0,00	438.639,36	438.639,36
55	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 2	2.439.323,00	193.879,02	2.633.202,02
56	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 3	105.325,00	341.708,98	447.033,98
57	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 4	0,00	1.814.822,19	1.814.822,19
Jumlah		23.457.693,87	2.059.285.375,72	2.082.743.069,59

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
4. Kas di Bendahara Penerimaan	134.359.900,63	92.816.085,95

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp134.359.900,63 atau naik 30,92 % dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp92.816.085,95. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan atas pungutan Pendapatan Asli Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 41 Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2018 dan 2017**

(dalam Rupiah)				
No	Uraian	SKPD	2018	2017
1	Kas di Bendahara Penerimaan pada PPKD rekening Dana Bergulir BNI 46 rek : 0055308986 terdiri dari jasa giro Rp5.490.676 dan Pendapatan atas biaya kartu Rp1.300.428, serta Rp 1.346,10 atas pendapatan bunga pada rekening penampungan dalir BPR Artha Praja yang dikelola oleh Bagian Perekonomian dan Kesra Setda Kota Blitar	BPKAD (PPKD)	6.792.450,10	16.684.091,00
2	Kas di bendahara Penerimaan pada PPKD rekening Dana Bergulir BNI 46 rek : 0053545590	BPKAD (PPKD)	0,00	1.400.373,00
3	Kas di bendahara Penerimaan (Jasa Giro) pada Dinas Perumahan Rakyat rekening penampungan jaminan penyewa rusunawa rek : 0141032780 .	Dinas Perumahan Rakyat	67.468,85	1.322.519,15
4	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.045.000,00	7.762.000,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	Dinas Pariwisata		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	SKPD	2018	2017
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	dan Kebudayaan	4.488.000,00	3.700.000,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	RSUD Mardi Waluyo	100.489.693,00	61.947.102,00
7	Kas di Bendahara Penerimaan BPKAD	BPKAD	0,00	0,80
8	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atas investasi Rp5.596.120,69, Pendapatan Bunga Dana Bergulir Rp895.379,32, dan Pendapatan bunga tabungan Rp605.788,67 pada rekening penampungan dalir	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	7.097.288,68	0,00
9	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	11.380.000,00	0,00
Jumlah			134.359.900,63	92.816.085,95

Selain tersebut diatas, terdapat rekening penampungan jaminan penyewa rusunawa pada Bank Jatim Cabang Blitar nomor rekening 0141032780 yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat. Saldo rekening per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp128.767.468,85, termasuk jasa giro sebesar Rp67.468,85.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
5. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	17.177.448.413,71	21.299.699.428,25

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD Mardi Waluyo per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.177.448.413,71 atau turun sebesar 19,35% dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2017 sebesar Rp21.299.699.428,25.

Tabel 42 Mutasi Kas di BLUD Tahun 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	2018	2017
Saldo awal	21.299.699.428,25	593.317.390,45
Pendapatan BLUD 2018	100.820.369.771,53	119.443.418.471,75
Jumlah	122.120.069.199,78	120.036.735.862,20
Belanja BLUD (diluar APBD) 2018	(101.197.876.271,82)	(98.737.036.433,95)
Penyetoran SiLPA Ke Kas Daerah	(3.744.744.514,25)	0,00
Saldo Kas di BLUD	17.177.448.413,71	21.299.699.428,25

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
6. Kas di Kapitasi JKN	365.186.629,00	834.582.065,00

Saldo Kas di Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2018 sebesar Rp365.186.629,00. Saldo Kas di Kapitasi JKN per 31 Desember 2017 turun 56,24% dibandingkan dengan saldo Kas di Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional per 31 Desember 2017 sebesar Rp834.582.065,00. Saldo kas di Kapitasi JKN merupakan sisa dana JKN pada tiga Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Awal JKN (31/12/2017)	Rp 834.582.065,00
Pendapatan Kapitasi JKN	Rp 4.472.179.350,00
Belanja	<u>(Rp 4.941.574.786,00)</u>
Sisa Dana JKN (31/12/2018)	Rp 365.186.629,00

Tabel 43 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana JKN pada FKTP Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No	Nama FKTP	No Rekening	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Sisa
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	UPT Puskesmas Sananwetan	0141031601	183.657.756,00	1.856.138.250,00	1.886.417.900,00	153.378.106,00
2	UPT Puskesmas Sukorejo	0141031635	376.460.983,00	1.369.026.000,00	1.583.078.811,00	162.408.172,00
3	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	0141031571	274.463.326,00	1.247.015.100,00	1.472.078.075,00	49.400.351,00
Jumlah			834.582.065,00	4.472.179.350,00	4.941.574.786,00	365.186.629,00

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
7. Piutang Pajak	7.887.300.285,50	7.064.009.620,00

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.887.300.285,50 atau naik 10,44% dibandingkan dengan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.064.009.620,00. Piutang Pajak dicatat berdasarkan nilai nominal ketetapan pajak yang belum dilunasi Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak	SKPD	2018	2017
1	Pajak Hotel	BPKAD	116.904.229,00	108.727.675,00
2	Pajak Reklame	BPKAD	19.704.620,50	15.866.680,00
3	Pajak Rumah Makan	BPKAD	285.725.230,00	212.325.915,00
4	Pajak Katering	BPKAD	4.320.146,00	0,00
5	Pajak Hiburan	BPKAD	262.781.650,00	59.067.100,00
6	Pajak Air Tanah	BPKAD	11.403.817,00	10.685.297,00
7	Pajak Parkir	BPKAD	41.953.850,00	31.265.750,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	BPKAD	6.266.607.752,00	5.804.285.117,00
9	Pajak Penerangan Jalan Umum	BPKAD	877.898.991,00	821.786.086,00
Jumlah			7.887.300.285,50	7.064.009.620,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun 1996-2013 terdapat piutang yang belum divalidasi sebesar Rp4.066.836.564,00 merupakan piutang pelimpahan dari KPP Pratama Blitar berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-151/WPJ.12/KP.12/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan atas data piutang PBB P2, dari total data NOP tahun 1996 sampai dengan tahun 2008 sebanyak 77.695 NOP dengan nilai Rp2.678.830.871,00, telah dilakukan verifikasi lapangan sebanyak 17.605 NOP dengan nilai Rp557.234.827,00 sehingga yang belum diverifikasi lapangan sebanyak 60.090 NOP dengan nilai Rp2.121.596.044,00, sedangkan berdasarkan data tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terdapat 4.252 NOP dengan nilai Rp1.388.005.693,00, telah diverifikasi lapangan sebanyak 854 NOP dengan nilai Rp231.978.597,00 dan yang belum diverifikasi lapangan sebanyak 3.398 NOP dengan nilai Rp1.156.027.096,00. Hasil verifikasi diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 45 Hasil Verifikasi Lapangan atas Data Piutang PBB P2

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah NOP	Nilai Piutang	Keterangan
A. Tahun Pajak 1997 – 2008			
Telah diverifikasi lapangan	17.605	557.234.827,00	Pelaksanaan validasi pada Tahun 2018
Belum diverifikasi lapangan	60.090	2.121.596.044,00	Validasi akan dilaksanakan pada Tahun 2019
Nilai Piutang yang harus diverifikasi (A)	77.695	2.678.830.871,00	
B. Tahun Pajak 2009 – 2013			
Telah diverifikasi lapangan	854	231.978.597,00	Pelaksanaan validasi pada Tahun 2018
Belum diverifikasi lapangan	3.398	1.156.027.096,00	Validasi akan dilaksanakan pada Tahun 2019
Nilai Piutang yang harus diverifikasi (B)	4.252	1.388.005.693,00	
Jumlah Nilai Piutang yang harus diverifikasi (A + B)	81.947	4.066.836.564,00	
Jumlah Nilai Piutang yang harus diverifikasi berdasarkan BAST		4.016.247.988,00	
Selisih		50.588.576,00	Pelunasan Pembayaran



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian mutasi piutang pajak pada Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Desember 2018
1	Pajak Hotel	108.727.675,00	113.461.464,00	105.284.910,00	116.904.229,00
2	Pajak Reklame	15.866.680,00	3.837.940,50	0,00	19.704.620,50
3	Pajak Rumah Makan	193.388.667,00	214.309.112,00	121.972.549,00	285.725.230,00
4	Pajak Katering	18.937.248,00	4.320.146,00	18.937.248,00	4.320.146,00
5	Pajak Hiburan	59.067.100,00	248.365.650,00	44.651.100,00	262.781.650,00
6	Pajak Air Tanah	10.685.297,00	7.174.295,00	6.455.775,00	11.403.817,00
7	Pajak Parkir	31.265.750,00	26.808.150,00	16.120.050,00	41.953.850,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	5.804.285.117,00	542.148.934,00	79.826.299,00	6.266.607.752,00
9	Pajak Penerangan Jalan Umum	821.786.086,00	877.898.991,00	821.786.086,00	877.898.991,00
Jumlah		7.064.009.620,00	2.038.324.682,50	1.215.034.017,00	7.887.300.285,50

Piutang Pajak sebagaimana tercantum pada tabel diatas dirinci menurut umur piutangnya sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Pengelompokan Umur Piutang Pajak 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 5 Tahun	>5 Tahun
1	Pajak Hotel	116.904.229,00	113.461.464,00	1.135.000,00	1.287.765,00	1.020.000,00
2	Pajak Reklame	19.704.620,50	3.837.940,50	15.866.680,00	0,00	0,00
3	Pajak Rumah Makan	285.725.230,00	214.309.112,00	10.275.000,00	48.535.999,00	12.605.119,00
4	Pajak Katering	4.320.146,00	4.320.146,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Hiburan	262.781.650,00	248.365.650,00	174.000,00	13.142.000,00	1.100.000,00
6	Pajak Air Tanah	11.403.817,00	7.174.295,00	153.530,00	4.075.992,00	0,00
7	Pajak Parkir	41.953.850,00	26.808.150,00	267.000,00	14.878.700,00	0,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	6.266.607.752,00	560.200.708,00	820.385.221,00	876.501.502,00	4.009.520.321,00
9	Pajak Penerangan Jalan Umum	877.898.991,00	877.898.991,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		7.887.300.285,50	2.056.376.456,50	848.256.431,00	958.421.958,00	4.024.245.440,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengelompokan umur piutang tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
8. Piutang Retribusi	6.864.141.715,00	7.134.523.049,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.864.141.715,00 atau turun 3,94% dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.134.523.049,00. Piutang Retribusi dicatat berdasarkan nilai nominal tagihan retribusi yang belum terealisasi per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	Terdiri dari :		
	Sewa Toko Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100.051.000,00	76.951.000,00
	Sewa lahan Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.402.000,00	0,00
	Sewa kios kebonrojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.100.000,00	0,00
	Sewa Kios Shopping Center – Dinas Perdagangan dan Perindustrian	44.851.000,00	44.851.000,00
	Sewa Tanah Jl. Kelud, Jl. A.Yani, Jl. Dr. Wahidin – Dinas Perdagangan dan Perindustrian	227.561.300,00	221.528.600,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mayang – Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11.930.000,00	8.690.000,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mastrip – Dinas Perdagangan dan Perindustrian	22.600.000,00	22.000.000,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Kelud – Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.380.000,00	22.770.000,00
	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi – BPKAD	10.285.000,00	10.285.000,00
	Sewa kios souvenir MBK – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	77.008.000,00	77.008.000,00
	Sewa kios terminal MBK – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	41.848.000,00	41.848.000,00
	Sewa kios los PIPP – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.820.000,00	1.820.000,00
	Sewa Sumber Udel – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	415.000.000,00
	Sewa Kios Terminal – Dinas Perhubungan	274.555.000,00	274.555.000,00
	Penjualan Traktor dan Pemberian Kredit pertanian – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.922.700,00	19.922.700,00
	Sewa Hunian Rusunawa – Dinas Perumahan Rakyat	183.425.000,00	97.025.000,00
	Sewa Kantin – Dinas Pendidikan	0,00	5.675.000,00
	Sewa Tanah Reklame - Dinas Penanaman Modal,TK,&PTSP	109.650,00	0,00
	Fying Fox - DLH	500.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2018	2017
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan – Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.653.887.445,00	5.662.463.429,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Sewa GOR – Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.635.000,00	1.470.000,00
4	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	148.792.850,00	128.158.550,00
5	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian – Dinas Lingkungan Hidup	2.477.770,00	2.477.770,00
6	Retribusi Ijin Trayek – Dinas Perhubungan	0,00	24.000,00
Jumlah		6.864.141.715,00	7.134.523.049,00

Rincian mutasi piutang retribusi adalah sebagai berikut :

Tabel 49 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Desember 2018
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	Terdiri dari :				
	Sewa Toko Stadion Suprijadi	76.951.000,00	23.100.000,00	0,00	100.051.000,00
	Sewa lahan Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	10.402.000,00	0,00	10.402.000,00
	Sewa kios kebonrojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
	Sewa Kios Shopping Center	44.851.000,00	0,00	0,00	44.851.000,00
	Sewa Tanah Jl. Kelud, Jl. A.Yani, Jl. Dr. Wahidin	221.528.600,00	6.032.700,00	0,00	227.561.300,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mayang	8.690.000,00	4.320.000,00	1.080.000,00	11.930.000,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mastrip	22.000.000,00	600.000,00		22.600.000,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Kelud	22.770.000,00	1.200.000,00	3.590.000,00	20.380.000,00
	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi	10.285.000,00	0,00	0,00	10.285.000,00
	Sewa kios souvenir MBK	77.008.000,00	0,00	0,00	77.008.000,00
	Sewa kios terminal MBK	41.848.000,00	0,00	0,00	41.848.000,00
	Sewa kios los PIPP	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	Sewa Sumber Udel	415.000.000,00	0,00	415.000.000,00	0,00
	Sewa Kios Terminal	274.555.000,00	0,00	0,00	274.555.000,00
	Penjualan Traktor dan Pemberian Kredit pertanian	19.922.700,00	0,00	0,00	19.922.700,00
	Sewa Hunian Rusunawa	97.025.000,00	165.100.000,00	78.700.000,00	183.425.000,00
	Sewa Kantin	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Desember 2018
	Sewa Tanah Reklame - Dinas Penanaman Modal, TK, & PTSP	0,00	109.650,00	0,00	109.650,00
	Flying Fox – DLH	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	5.662.463.429,00	1.600.000,00	10.175.984,00	5.653.887.445,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Sewa GOR	1.470.000,00	3.530.000,00	1.365.000,00	3.635.000,00
4	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	128.158.550,00	111.206.000,00	90.571.700,00	148.792.850,00
5	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	2.477.770,00	0,00	0,00	2.477.770,00
6	Retribusi Ijin Trayek	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Jumlah		7.134.523.049,00	335.800.350,00	606.181.684,00	6.864.141.715,00

Piutang Retribusi telah dikelompokkan sesuai umur piutang sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Pengelompokan Umur Piutang Retribusi 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	s/d 3 Tahun	>3 Tahun
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
	Terdiri dari :					
	Sewa Toko Stadion Suprijadi	100.051.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	76.951.000,00
	Sewa lahan Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.402.000,00	10.402.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sewa kios kebonrojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sewa Kios Shopping Center	44.851.000,00	0,00	0,00	0,00	44.851.000,00
	Sewa Tanah Jl. Kelud, Jl. A.Yani, Jl. Dr. Wahidin	227.561.300,00	6.032.700,00	0,00	1.982.700,00	219.545.900,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mayang	11.930.000,00	4.320.000,00	540.000,00	1.620.000,00	5.450.000,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mastrip	22.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Kelud	20.380.000,00	1.200.000,00	0,00	1.740.000,00	17.440.000,00
	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi	10.285.000,00	0,00	0,00	0,00	10.285.000,00
	Sewa kios souvenir MBK	77.008.000,00	0,00	0,00	0,00	77.008.000,00
	Sewa kios terminal MBK	41.848.000,00	0,00	0,00	0,00	41.848.000,00
	Sewa kios los PIPP	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	Sewa Tanah Reklame - Dinas Penanaman Modal, TK, & PTSP	109.650,00	109.650,00	0,00	0,00	0,00
	Sewa Kios Terminal	274.555.000,00	0,00	0,00	0,00	274.555.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	s/d 3 Tahun	>3 Tahun
	Penjualan Traktor dan Pemberian Kredit pertanian	19.922.700,00	0,00	0,00	0,00	19.922.700,00
	Sewa Hunian Rusunawa	183.425.000,00	165.100.000,00	17.100.000,00	1.225.000,00	0,00
	Flying Fox – DLH	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	5.653.887.445,00	1.600.000,00	23.550.000,00	131.850.000,00	5.496.887.445,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Sewa GOR	3.635.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	148.792.850,00	111.206.000,00	3.166.500,00	12.319.800,00	22.100.550,00
5	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	2.477.770,00	0,00	0,00	429.000,00	2.048.770,00
6	Retribusi Ijin Trayek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.864.141.715,00	335.800.350,00	44.356.500,00	151.166.500,00	6.332.818.365,00

9. Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi

31 Desember 2018
(Rp)

5.024.336.392,00

31 Desember 2017
(Rp)

13.203.867.540,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.024.336.392,00 turun sebesar 162,80% dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.203.867.540,00. Adapun rincian nilai piutang tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi
per 31 Desember 2017 dan 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	3.854.770.631,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	2.022.739.834,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	2.797.221.629,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	38.157.895,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	5.024.336.392,00	4.490.977.551,00
Jumlah		5.024.336.392,00	13.203.867.540,00

Tabel 52 Rincian Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Desember 2018
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.854.770.631,00	0,00	3.854.770.631,00	0,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.022.739.834,00	0,00	2.022.739.834,00	0,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.797.221.629,00	0,00	2.797.221.629,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Desember 2018
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	38.157.895,00	0,00	38.157.895,00	0,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	4.490.977.551,00	5.024.336.392,00	4.490.977.551,00	5.024.336.392,00
	Jumlah	13.203.867.540,00	5.024.336.392,00	13.203.867.540,00	5.024.336.392,00

Tabel 53 Rincian Pengelompokan Umur Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 5 Tahun	>5 Tahun
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	5.024.336.392,00	5.024.336.392,00	0,00	0,00	0,00
	Total	5.024.336.392,00	5.024.336.392,00	0,00	0,00	0,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
10. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	82.087.000,00	121.923.000,00

Saldo Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp82.087.000,00 merupakan Bagian Lancar Pinjaman kepada PDAM berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 23 tanggal 3 Oktober 2002. Saldo Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Tabel 54 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Surat Pinjaman	Bagian Lancar 2018 (Rp)	Bagian Lancar 2017 (Rp)	Keterangan
1	No. 23 Tahun 2002	82.087.000,00	121.923.000,00	Pinjaman yang diberikan Rp820.870.000,00
	Jumlah	82.087.000,00	121.923.000,00	

Pada tahun 2018 terdapat Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah yang direklasifikasi menjadi Investasi Non Permanen (Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah) sebesar Rp39.836.000,00. Pinjaman dimaksud berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 06 Tahun 2001 dengan pemberian pinjaman sebesar Rp532.000.000,00 dengan nilai pokok pinjaman yang sudah jatuh tempo dan dikategorikan macet per 31 Desember 2018 sebesar Rp39.836.000,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Adapun rincian mutasi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Mutasi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Desember 2018
1	Piutang PDAM	121.923.000,00	0,00	39.836.000,00	82.087.000,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	121.923.000,00	0,00	39.836.000,00	82.087.000,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
11. Piutang Bunga	129.362.340,00	116.273.970,00

Saldo Piutang Bunga per 31 Desember 2018 sebesar Rp129.362.340,00. Saldo ini merupakan Piutang Bunga PDAM berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 06 Tahun 2001 tanggal 26 Nopember 2001 dan Nomor 23 Tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002, terdiri dari Piutang Bunga yang telah jatuh tempo pada 31 Desember 2018. Adapun rincian mutasi piutang bunga dan pengelompokan umur piutang sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Mutasi Piutang Bunga Tahun 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Desember 2018
Piutang Bunga PDAM	116.273.970,00	13.088.370,00	0,00	129.362.340,00
Jumlah	116.273.970,00	13.088.370,00	0,00	129.362.340,00

Tabel 57 Pengelompokan Umur Piutang Bunga per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 5 Tahun	>5 Tahun
Piutang Bunga PDAM	129.362.340,00	12.313.050,00	24.626.100,00	36.939.150,00	55.484.040,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
12. Piutang Lainnya	33.713.730.684,72	25.305.657.391,91

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp33.713.730.684,72 atau naik 24,94% dibandingkan dengan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp25.305.657.391,91 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 58 Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Piutang BPJS Kesehatan Non Kapitasi - Dinas Kesehatan	87.030.000,00	140.182.600,00
2	Piutang BLUD, terdiri dari :		
	- Jamkesda Kota (BLUD)	0,00	0,00
	- Piutang PT KAI (BLUD)	0,00	313.785,00
	- Piutang yayasan kesehatan PT. TELKOM (BLUD)	2.139.630,00	5.089.311,00
	- Piutang Pasien Umum (BLUD)	225.868.793,00	216.809.783,00
	- Piutang BPJS (BLUD)	28.410.224.588,00	20.581.343.548,00
	- Piutang Inhealth (BLUD)	23.295.116,00	0,00
	- Piutang LPSK (BLUD)	0,00	1.663.675,00
	- Piutang taspen (BLUD)	0,00	0,00
	- Piutang BPJS Ketenagakerjaan (BLUD)	0,00	5.991.659,00
	- Piutang ATM Mandiri (BLUD)	0,00	11.625.000,00
	- Piutang Bakordik (BLUD)	47.936.000,00	73.987.000,00
	- Piutang Jasa Raharja (BLUD)	119.419.957,00	178.749.625,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, terdiri dari :		
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UMKM/Koperasi – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	815.220.377,55	867.463.940,59
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari KPUK/BNI 46 - BPKAD	164.982.732,73	164.982.732,73
	- Pinjaman Dana Bergulir - BPR Jatim – Bagian Perekonomian Setda	3.176.200,00	3.176.200,00
4	Piutang Denda, terdiri dari :		
	Piutang Denda Pajak - PBB – BPKAD	2.346.593.548,00	2.367.086.014,00
	Pendapatan Denda Retribusi, terdiri dari :		
	- Piutang Denda Sewa water Park Sumber Udel – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	24.400.000,00
	- Piutang Denda Sewa ATM Mandiri – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	7.368.000,00
	- Piutang Denda Sewa Kios Bedak Jl. Mayang – Dinas Perdagangan dan Perindustrian	32.400,00	32.400,00
	- Piutang Denda Sewa /Bedak Jl. Kelud – Dinas Perdagangan dan Perindustrian	34.800,00	34.800,00
	- Piutang Denda Sewa Tanah Jl. A Yani – Dinas Perdagangan dan Perindustrian	39.654,00	39.654,00
	- Piutang Denda Sewa Kios Kebonrojo – Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45.000,00	45.000,00
	- Piutang Denda Sewa Kios Stadion – Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.484.000,00	1.484.000,00
5	Piutang Jasa Giro, terdiri dari :		
	- Piutang Jasa Giro Bank Jatim - BPKAD	235.363.240,43	187.086.200,07
	- Piutang Jasa Giro Bank Jatim - rusunawa – Dinas Perumahan Rakyat	63.521,68	65.760,31
	- Piutang Jasa Giro Bank BNI - atas bunga deposito – BPKAD	403,00	528,00
6	Piutang Bunga Deposito, terdiri dari :		
	- Rekening Deposito pada Bank Jawa Timur - BPKAD	12.945.205,48	24.417.808,21



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2018	2017
	- Rekening Deposito pada Bank BNI 46 – BPKAD	2.301.369,86	14.013.699,00
	- Rekening Deposito pada Bank Mandiri – BPKAD	10.273.972,60	15.032.876,00
	- Rekening Deposito pada Bank BRI – BPKAD	1.183.561,64	0,00
7	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah:		
	- Fasilitas Rusunawa – Dinas Perumahan Rakyat	116.933.538,00	57.644.476,00
	- Fasilitas Umum - BGS Blitar Square – BPKAD	160.000.000,00	0,00
	- Fasilitas Umum - ATM PT Bank Mandiri – BPKAD	1.978.000,00	0,00
8	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD:		
	PD BPR ARTHA PRAJA – BPKAD	394.288.318,00	355.527.317,00
9	Penjualan hasil Pertanian -Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.647.700,00	0,00
10	Piutang Pengembalian Kelebihan Belanja	528.229.057,75	0,00
Jumlah		33.713.730.684,72	25.305.657.391,91

Rincian mutasi Piutang Lainnya sebagai berikut:

Tabel 59 Rincian Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Desember 2018
1	Piutang BPJS Kesehatan Non Kapitasi	140.182.600,00	87.030.000,00	140.182.600,00	87.030.000,00
2	Piutang BLUD, terdiri dari :				
	- Jamkesda Kota (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang PT KAI (BLUD)	313.785,00	13.156.708,00	13.470.493,00	0,00
	- Piutang yayasan kesehatan PT. TELKOM (BLUD)	5.089.311,00	62.541.068,00	65.490.749,00	2.139.630,00
	- Piutang Pasien Umum (BLUD)	216.809.783,00	9.313.940,00	254.930,00	225.868.793,00
	- Piutang BPJS (BLUD)	20.581.343.548,00	85.756.125.432,00	77.927.244.392,00	28.410.224.588,00
	- Piutang Inhealth (BLUD)	0,00	23.295.116,00	0,00	23.295.116,00
	- Piutang LPSK (BLUD)	1.663.675,00	0,00	1.663.675,00	0,00
	- Piutang taspen (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang BPJS Ketenagakerjaan (BLUD)	5.991.659,00	97.634.040,00	103.625.699,00	0,00
	- Piutang ATM Mandiri (BLUD)	11.625.000,00	0,00	11.625.000,00	0,00
	- Piutang Bakordik BLUD	73.987.000,00	265.536.000,00	291.587.000,00	47.936.000,00
	- Piutang Jasa Raharja BLUD	178.749.625,00	1.487.282.564,00	1.546.612.232,00	119.419.957,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, terdiri dari :				
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UMKM/Koperasi	867.463.940,59	5.888.744,95	58.132.307,99	815.220.377,55
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari KPUK/BNI 46	164.982.732,73	0,00	0,00	164.982.732,73
	- Pinjaman Dana Bergulir - BPR Jatim	3.176.200,00	0,00	0,00	3.176.200,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Desember 2018
4	Piutang Denda, terdiri dari:				
	Piutang Denda Pajak - PBB	2.367.086.014,00	1.860.144,00	22.352.610,00	2.346.593.548,00
	Pendapatan Denda Retribusi, terdiri dari:				
	- Piutang Denda Sewa water Park Sumber Udel	24.400.000,00	0,00	24.400.000,00	0,00
	- Piutang Denda Sewa ATM Mandiri	7.368.000,00	0,00	7.368.000,00	0,00
	- Piutang Denda Sewa Kios Bedak Jl. Mayang	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
	- Piutang Denda Sewa/ Bedak Jl. Kelud	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
	- Piutang Denda Sewa Tanah Jl. A Yani	39.654,00	0,00	0,00	39.654,00
	- Piutang Denda Sewa Kios Kebonrojo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	- Piutang Denda Sewa Kios Stadion	1.484.000,00	0,00	0,00	1.484.000,00
5	Piutang Jasa Giro, terdiri dari:				
	- Piutang Jasa Giro Bank Jatim (BPKAD)	187.086.200,07	235.363.240,43	187.086.200,07	235.363.240,43
	- Piutang Jasa Giro Bank Jatim - rusunawa (BPKAD)	65.760,31	63.521,68	65.760,31	63.521,68
	- Piutang Jasa Giro Bank BNI - atas bunga deposito (BPKAD)	528,00	403,00	528,00	403,00
6	Piutang Bunga Deposito, terdiri dari:				
	- Rekening Deposito pada Bank Jawa Timur	24.417.808,21	12.945.205,48	24.417.808,21	12.945.205,48
	- Rekening Deposito pada Bank BNI 46	14.013.699,00	2.301.369,86	14.013.699,00	2.301.369,86
	- Rekening Deposito pada Bank Mandiri	15.032.876,00	10.273.972,60	15.032.876,00	10.273.972,60
	- Rekening Deposito pada Bank BRI	0,00	1.183.561,64	0,00	1.183.561,64
7	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah				
	- Fasilitas Umum Blitar Square (BPKAD)	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
	- Fasilitas Umum – ATM Bank Mandiri	0,00	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00
	- Fasilitas Rusunawa	57.644.476,00	95.408.435,00	36.119.373,00	116.933.538,00
8	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD				
	PD BPR ARTHA PRAJA	355.527.317,00	394.288.318,00	355.527.317,00	394.288.318,00
9	Penjualan Hasil Pertanian-Dinas Pertanian	0,00	2.647.700,00	0,00	2.647.700,00
10	Piutang Pengembalian Kelebihan Belanja	0,00	528.229.057,75	0,00	528.229.057,75
Jumlah		25.305.657.391,91	89.254.346.542,39	80.846.273.249,58	33.713.730.684,72



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Piutang Jamkesda pada Laporan Keuangan BLUD RSUD Mardi Waluyo per 31 Desember 2018 sebesar Rp521.550.900,00 tidak dimunculkan pada Laporan Keuangan Konsolidasi karena merupakan piutang antar SKPD.

Piutang Lainnya telah dikelompokkan sesuai umur Piutang sebagai berikut:

Tabel 60 Pengelompokan Umur Piutang Lainnya per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Umur Piutang			
			0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 5 Tahun	>5 Tahun
1	Piutang BPJS Kesehatan Non Kapitasi	87.030.000,00	87.030.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang BLUD, terdiri dari :					
	- Piutang yayasan kesehatan PT. TELKOM (BLUD)	2.139.630,00	2.139.630,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang Pasien Umum (BLUD)	225.868.793,00	32.644.500,00	673.200,00	112.370.507,00	80.180.586,00
	- Piutang BPJS (BLUD)	28.410.224.588,00	28.410.224.588,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang Inhealth (BLUD)	23.295.116,00	23.295.116,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang Bakordik BLUD	47.936.000,00	47.936.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang Jasa Raharja BLUD	119.419.957,00	119.419.957,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, terdiri dari :					
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UMKM/Koperasi	815.220.377,55	16.665.874,00	9.724.029,14	44.895.504,61	743.934.969,80
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari KPUK/BNI 46	164.982.732,73	164.982.732,73	0,00	0,00	0,00
	- Pinjaman Dana Bergulir - BPR Jatim	3.176.200,00	0,00	0,00	0,00	3.176.200,00
4	Piutang Denda, terdiri dari :					
	Piutang Denda Pajak - PBB	2.346.593.548,00	1.860.144,00	40.693.965,00	379.469.636,00	1.924.569.803,00
	Pendapatan Denda Retribusi terdiri dari :					



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Umur Piutang			
			0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 5 Tahun	>5 Tahun
	- Piutang Denda Sewa Kios Bedak Jl. Mayang	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
	- Piutang Denda Sewa /Bedak Jl. Kelud	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
	- Piutang Denda Sewa Tanah Jl. A Yani	39.654,00	0,00	39.654,00	0,00	0,00
	- Piutang Denda Sewa Kios Kebonrojo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Piutang Denda Sewa Kios Stadion	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00	0,00	0,00
5	Piutang Jasa Giro, terdiri dari :					
	- Piutang Jasa Giro Bank Jatim (BPKAD)	235.363.240,43	235.363.240,43	0,00	0,00	0,00
	- Piutang Jasa Giro Bank Jatim - rusunawa (Dinas Perumahan Rakyat)	63.521,68	63.521,68	0,00	0,00	0,00
	- Piutang Jasa Giro Bank BNI - atas bunga deposito (BPKAD)	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Bunga Deposito, terdiri dari :					
	- Rekening Deposito pada Bank Jawa Timur	12.945.205,48	12.945.205,48	0,00	0,00	0,00
	- Rekening Deposito pada Bank BNI 46	2.301.369,86	2.301.369,86	0,00	0,00	0,00
	- Rekening Deposito pada Bank Mandiri	10.273.972,60	10.273.972,60	0,00	0,00	0,00
	- Rekening Deposito pada Bank BRI	1.183.561,64	1.183.561,64	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah					
	- Fasilitas Rusunawa	116.933.538,00	95.408.435,00	21.265.208,00	259.895,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Umur Piutang			
			0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 5 Tahun	>5 Tahun
	- Fasilitas Umum - BGS Blitar Square - BPKAD	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Fasilitas Umum - ATM PT Bank Mandiri- BPKAD	1.978.000,00	1.978.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	394.288.318,00	394.288.318,00	0,00	0,00	0,00
9	Penjualan Hasil Pertanian	2.647.700,00	2.647.700,00	0,00	0,00	0,00
10	Piutang Pengembalian Kelebihan Belanja	528.229.057,75	528.229.057,75	0,00	0,00	0,00
Jumlah		33.713.730.684,72	30.350.881.327,17	73.992.256,14	536.995.542,61	2.751.861.558,80

		31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Tak	(14.105.294.107,81)	(13.418.012.312,11)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan pengelompokkan umur Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah dan Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2018 sebesar (Rp14.105.294.107,81) atau naik 4,87% dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2017 sebesar (Rp13.418.012.312,11) Hal ini disebabkan karena banyaknya piutang yang umurnya lebih dari 3 dan 5 tahun belum dilunasi sehingga mengakibatkan besarnya kenaikan Penyisihan Piutang Tak Tertagih di Tahun 2018. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagaimana tabel berikut:

Tabel 61 Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Umur Piutang			
			0 s.d 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 s.d 5 Tahun	>5 Tahun
1	Piutang Pajak	7.887.300.285,50	2.056.376.456,50	848.256.431,00	958.421.958,00	4.024.245.440,00
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	4.588.282.062,10	0,00	84.825.643,10	479.210.979,00	4.024.245.440,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Umur Piutang			
			0 s.d 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 s.d 5 Tahun	>5 Tahun
2	Piutang Retribusi	6.864.141.715,00	335.800.350,00	44.356.500,00	151.166.500,00	6.332.818.365,00
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.412.837.265,00	0,00	4.435.650,00	75.583.250,00	6.332.818.365,00
3	Piutang Dana Bagi Hasil	5.024.336.392,00	5.024.336.392,00	0,00	0,00	0,00
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	82.087.000,00	82.087.000,00	0,00	0,00	0,00
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Lainnya	33.713.730.684,72	30.350.881.327,17	73.992.256,14	536.995.542,61	2.751.861.558,79
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	3.027.758.555,71	0,00	7.399.225,61	268.497.771,31	2.751.861.558,79
6	Piutang Bunga PDAM	129.362.340,00	12.313.050,00	24.626.100,00	36.939.150,00	55.484.040,00
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	76.416.225,00	0,00	2.462.610,00	18.469.575,00	55.484.040,00
Jumlah Piutang		53.700.958.417,22	37.861.794.575,67	991.231.287,14	1.683.523.150,61	13.164.409.403,79
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		14.105.294.107,81	0,00	99.123.128,71	841.761.575,31	13.164.409.403,79
Net Realizable Value (NRV)		39.595.664.309,41	37.861.794.575,67	892.108.158,43	841.761.575,30	0,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
14. Belanja Dibayar Di Muka	17.950.000,00	9.354.166,67

Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah. Belanja Dibayar diMuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.950.000,00 nilai tersebut dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 62 Rincian Belanja Dibayar DiMuka per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam Rupiah)

No	SKPD	Belanja	2018	2017
1	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	Belanja sewa domain/hosting internet	187.500,00	187.500,00
2	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika	Belanja sewa domain/hosting internet	10.762.500,00	0,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Belanja sewa domain/hosting internet	7.000.000,00	833.333,33
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja sewa domain/hosting internet	0,00	8.333.333,34
Jumlah			17.950.000,00	9.354.166,67

31 Desember 2018
(Rp)

31 Desember 2017
(Rp)

16. Persediaan

14.774.078.093,89

15.951.128.374,21

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan. Saldo per jenis persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.774.078.093,89 adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Daftar Persediaan per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	APBD	BOS	Total
1	Persediaan Alat Tulis kantor	515.128.766,00	2.529.400,00	517.658.166,00
2	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	426.752.219,00	246.500,00	426.998.719,00
3	Persediaan Perangko, Materai, dan benda Pos Lainnya	132.000,00	330.000,00	462.000,00
4	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih/Alat RT	248.621.578,00	1.654.375,00	250.275.953,00
5	Persediaan Pengisian Tabung Gas	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
6	Persediaan Bahan Pengharum Ruangan	415.000,00	0,00	415.000,00
7	Persediaan Tabung Oksigen	600.000,00	0,00	600.000,00
8	Persediaan Dokumentasi	26.770.000,00	0,00	26.770.000,00
9	Persediaan Bahan Baku Bangunan	71.875.000,00	0,00	71.875.000,00
10	Persediaan Bahan/bibit Tanaman	114.183.700,00	0,00	114.183.700,00
11	Persediaan Bibit Ternak	44.582.500,00	0,00	44.582.500,00
12	Persediaan Bahan Obat-obatan	7.477.872.496,85	39.000,00	7.477.911.496,85
13	Persediaan Bahan Kimia	1.020.403.544,83	0,00	1.020.403.544,83
14	Bahan Praktek dan Percontohan	1.365.000,00	72.500,00	1.437.500,00
15	Persediaan Bahan Makanan dan Minuman	188.571.631,00	0,00	188.571.631,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Persediaan	APBD	BOS	Total
16	Persediaan Tas Pelatihan/Pembungkus (Packing)	108.000,00	0,00	108.000,00
17	Persediaan Bahan Kesehatan	2.328.970.397,96	0,00	2.328.970.397,96
18	Persediaan Makanan dan Minuman Ternak	67.000,00	0,00	67.000,00
19	Persediaan Pembungkus Obat/Farmasi/Bahan Kimia	10.776.000,00	0,00	10.776.000,00
20	Persediaan Publikasi	39.178.000,00	0,00	39.178.000,00
21	Persediaan Cetak	829.780.325,25	610.000,00	830.390.325,25
22	Persediaan Penggandaan	350.000,00	0,00	350.000,00
23	Persediaan Pakaian Dinas, Harian (PDH)	47.317.915,00	0,00	47.317.915,00
24	Persediaan Atribut Pakaian Dinas	11.136.650,00	0,00	11.136.650,00
25	Persediaan Perlengkapan dan Atribut Pakaian Kerja Lapangan	1.034.700,00	0,00	1.034.700,00
26	Persediaan Pakaian Batik Tradisional/Bercorak Kesenian	2.704.900,00	0,00	2.704.900,00
27	Persediaan Pakaian Olahraga	10.165.100,00	0,00	10.165.100,00
28	Persediaan Pakaian Pasien	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00
29	Persediaan Perlengkapan dan Atribut Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	3.624.000,00	0,00	3.624.000,00
30	Persediaan Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat	3.020.825,00	0,00	3.020.825,00
31	Persediaan Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.306.952.070,00	0,00	1.306.952.070,00
32	Persediaan Materi Pendidikan Siswa	9.083.000,00	0,00	9.083.000,00
33	Persediaan Pakaian Seragam Siswa	4.642.000,00	0,00	4.642.000,00
34	Persediaan Ikat Pinggang/Sabuk Siswa	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00
35	Persediaan Kaos Kaki Siswa	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00
36	Persediaan Perlengkapan dan Atribut Pakaian Siswa	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
37	Persediaan Tas Siswa	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
38	Persediaan Study Set Siswa	960.000,00	0,00	960.000,00
39	Persediaan Buku Tulis Siswa	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
Jumlah		14.767.471.318,89	6.606.775,00	14.774.078.093,89

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Blitar menerima Hibah Persediaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3.140.905.653,00 dengan rincian:

- Dinas Kesehatan Rp2.644.560.401,00 terdiri dari Bahan Obat-obatan sebesar Rp1.110.352.036,00 dan Bahan Kesehatan sebesar Rp1.534.208.365,00;



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp101.973.932,00 berupa Barang/Jasa selain Hibah dan Bansos yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp5.548.820,00 berupa Bahan Obat-Obatan;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp28.644.000,00 berupa Cetak; dan
- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Rp360.178.500,00 berupa Barang/Jasa selain Hibah dan Bansos yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.

7.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp24.674.861.064,12 atau naik 1,47% dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp24.311.381.102,08. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
1. Investasi Non Permanen	2.222.148.363,54	3.461.866.549,06

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.222.148.363,54 atau turun 55,79% dibandingkan dengan saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.461.866.549,06. Investasi Non Permanen Tahun 2018 berupa Investasi pada Dana Bergulir dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.828.990.155,72 dan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp778.619.000,00. *NRV* Investasi Non Permanen disajikan sebagai berikut:

Tabel 64 Rincian Saldo Investasi Non Permanen Tahun 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	2018	2018
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	778.619.000,00	574.609.000,00
Investasi Dana Bergulir	5.828.990.155,72	7.349.843.100,08
Jumlah Investasi (Harga Perolehan)	6.607.609.155,72	7.924.452.100,08
Penyisihan Investasi tak Tertagih	(4.385.460.792,18)	(4.462.585.551,02)
Net Realizable Value (NRV)	2.222.148.363,54	3.461.866.549,06

Perhitungan atas penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 2018 sebesar Rp(4.385.460.792,18) adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 65 Klasifikasi Penyisihan Investasi Non Permanen

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Kategori					Jumlah
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
A.	Investasi Dana Bergulir						
1	Pemberdayaan Masyarakat Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	95.030.000,00	95.030.000,00
2	Penyaluran Modal Kerja Pemberdayaan UKM melalui BPR Jatim Cabang Blitar	0,00	0,00	0,00	0,00	40.071.250,00	40.071.250,00
3	Penyaluran Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil melalui BNI 46	898.235,00	0,00	0,00	0,00	549.101.765,00	550.000.000,00
4	Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UM	0,00	35.414.722,81	7.916.502,61	9.999.920,21	5.090.557.760,10	5.143.888.905,72
	Jumlah Investasi Dana Bergulir	898.235,00	35.414.722,81	7.916.502,61	9.999.920,21	5.774.760.775,10	5.828.990.155,72
	% penyisihan	0%	5%	15%	40%	70%	
	Penyisihan investasi dana bergulir	0,00	1.770.736,14	1.187.475,39	3.999.968,08	4.042.332.542,57	4.049.290.722,19
B.	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah						
1.	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (PDAM)	164.174.000,00	164.174.000,00	82.087.000,00	82.087.000,00	286.097.000,00	778.619.000,00
	% penyisihan	0%	0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	820.870,00	8.208.700,00	41.043.500,00	286.097.000,00	336.170.070,00
	Jumlah Investasi Non Permanen	165.072.235,00	199.588.722,81	90.003.502,61	92.086.920,21	6.060.857.775,10	6.607.609.155,72
	Jumlah Penyisihan Investasi Non Permanen	0,00	2.591.606,14	9.396.175,39	45.043.468,08	4.328.429.542,57	4.385.460.792,18
	Net Realizable Value (NRV)	165.072.235,00	196.997.116,67	80.607.327,21	47.043.452,13	1.732.428.232,53	2.222.148.363,54

Berdasarkan Tabel di atas, penyajian Investasi Dana Bergulir dalam kategori lancar sebesar Rp898.235,00 kategori dalam perhatian khusus Rp35.414.722,82, kategori kurang lancar sebesar Rp7.916.502,61, kategori diragukan sebesar Rp9.999.920,21 dan kategori macet sebesar Rp5.774.760.775,10 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Pasar Rp95.030.000,00
Dana bergulir tersebut dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian per 31 Desember 2018 dengan prosentase 100,00% macet atau sebesar Rp95.030.000,00.
- 2) Penyaluran Modal Kerja Pemberdayaan UKM Rp40.071.250,00
melalui BPR Jatim Cabang Blitar
Dana bergulir tersebut dikerjasamakan dengan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Blitar sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 3 Tahun 2013 Nomor 0486/KRD/BPR/Blt/2013 tanggal 1 Maret 2013 dan telah dilakukan perpanjangan Perjanjian tersebut diperpanjang pada tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Blitar Tentang Pengelolaan Kredit Modal Kerja Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Nomor : 08 Tahun 2017 atau Nomor : 91/KRD/BPR/BLT/2017.
Nilai Investasi dana bergulir pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Blitar per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.071.250,00 yang merupakan nilai pokok pinjaman yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
Adapun saldo pada rekening penampungan untuk pembayaran dana bergulir pada Bank BPR Jatim Cabang Blitar dengan nomor rekening 0101028020 atas nama Pemerintah Kota Blitar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp51.346,10, saldo ini tidak dimasukkan dalam nilai investasi. Nilai tersebut terdiri dari Rp50.000,00 merupakan dana pemeliharaan rekening dan Rp1.346,10 merupakan bunga tabungan yang belum disetor ke BUD pada tahun 2018.
Pada tahun 2018 belum ada pembayaran atas investasi dana bergulir sehingga saldo investasi dana bergulir sama seperti tahun lalu.
- 3) Penyaluran Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil Rp550.000.000,00
(KPUK) melalui Bank BNI
Dana bergulir tersebut dikerjasamakan dengan Bank BNI sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Terakhir Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pengelolaan Kredit Usaha Kecil. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dan pembaruan Perjanjian Penyaluran dan Pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil Nomor 1 A Tahun 2204 tanggal 2 Januari 2004 yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan sekaligus menjadi payung hukum terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil (KPUK) yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 Januari 2007 sampai dengan 19 Maret 2017 serta pelaksanaan selanjutnya.
Pengelolaan pinjaman KPUK dilaksanakan melalui dua rekening BNI, yakni rekening Nomor 0055308986 yang digunakan untuk menampung dana pokok dan pengembalian pokok pinjaman KPUK



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.689.339,00 serta rekening nomor 0053545590 yang digunakan untuk menampung pendapatan bunga pinjaman KPUK dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

Saldo dana bergulir KPUK pada awal Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.700.000.000,00, pada tanggal 30 April 2018 telah dilakukan penarikan saldo rekening 0055308986 sebesar Rp1.150.000.000,00. Nilai penarikan ini merupakan pelunasan dana bergulir dan belum dapat dirinci per nama pembayar dana bergulir. Sisa saldo pokok pinjaman KPUK – Bank BNI pada 31 Desember 2018 sebesar Rp550.000.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 66 Dana Bergulir melalui Bank BNI

(dalam Rupiah)

Uraian	2018	2017
Saldo di rekening 0055308986	7.689.339,00	1.167.582.326,00
Tunggakan pokok (baki debit)	549.101.765,00	549.101.765,00
Jasa Giro di rekening 0055308986	(5.490.676,00)	(16.444.091,00)
Penambahan saldo kredit di rekening 0055308986 (Biaya Kartu)	(1.300.428,00)	(240.000,00)
Jumlah	550.000.000,00	1.700.000.000,00

- 4) Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UM Rp5.143.888.905,72
Dana Bergulir tersebut dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana tabel berikut:

Tabel 67 Daftar Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

(dalam Rupiah)

No	Jenis Perguliran	Tahun 2018	Tahun 2017
1	UM	3.954.304.324,12	4.020.933.751,63
2	Koperasi	1.189.584.581,61	1.493.808.098,45
Jumlah		5.143.888.905,72	5.514.741.850,08

Saldo per 31 Desember 2018 adalah Rp5.143.888.905,72 atau turun 7,21% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.514.741.850,08. Pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat sisa dana di rekening penampungan dana bergulir sebesar Rp11.292.753,42 yang tidak dimasukkan dalam nilai investasi. Nilai tersebut terdiri dari:

- Rp6.491.500,00 yang merupakan angsuran pinjaman dana bergulir tahun 2018 tetapi disetorkan tahun 2019 (STS No.900/11/410.2017.2/2018 tanggal 30 Januari 2019);
- Rp605.788,67 merupakan bunga tabungan rekening penampungan dana bergulir Dinas Koperasi dan UM tahun 2018 yang belum disetorkan; dan
- Rp4.195.464,75 merupakan belanja untuk pemeliharaan rekening.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pinjaman kepada PDAM dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 06 Tahun 2001 dengan nilai pinjaman sebesar Rp532.000.000,00 dan Surat Perjanjian Nomor 23 Tahun 2002 dengan nilai pinjaman sebesar Rp820.870.000,00.

Nilai pinjaman sebesar Rp532.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 06 Tahun 2001 telah dilunasi sebesar Rp492.164.000,00 sehingga nilai pinjaman per 31 Desember 2018 sebesar Rp39.836.000. Pada tahun 2018, penyajian nilai tersebut direklasifikasi dari Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah menjadi Investasi Non Permanen (Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah) dikarenakan sudah jatuh tempo pada periode di atas 4 tahun dan dikategorikan macet.

Nilai pinjaman sebesar Rp820.870.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 23 Tahun 2002 belum ada pelunasan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan periode jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun sebesar Rp164.174.000,00, jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun sebesar Rp82.087.000,00, jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun sebesar Rp82.087.000,00, jatuh tempo pada periode di atas 4 tahun sebesar Rp246.261.000,00 dan belum jatuh tempo sebesar Rp82.087.000,00.

Perhitungan atas nilai bersih Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan dengan mengelompokkan investasi yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*) yaitu jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun sebesar Rp164.174.000,00, jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun sebesar Rp82.087.000,00, jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun sebesar Rp82.087.000,00, jatuh tempo pada periode di atas 4 tahun sebesar Rp286.097.000,00, dan belum jatuh tempo sebesar Rp82.087.000,00.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
2. Investasi Permanen	22.452.712.700,58	20.849.514.553,02

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen ini dinilai dengan menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*) untuk Penyertaan Modal pada PDAM dan PD BPR Artha Praja. Sedangkan Penyertaan modal pada PT Bank Jatim masih menggunakan metode biaya (*Cost Method*). Saldo Investasi permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.452.712.700,58 atau naik 7,14% dibandingkan dengan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2017 sebesar Rp20.849.514.553,02. Pada Tahun 2018 terdapat mutasi tambah atas Investasi Permanen yaitu Penyertaan Modal ke PDAM dan PD BPR Artha Praja sebesar Rp3.000.000.000,00 (PDAM Rp1.500.000.000,00 dan BPR Artha Praja Rp1.500.000.000,00), kenaikan nilai investasi pada BPR Artha Praja akibat laba yang diperoleh sebesar Rp511.499.951,48. Sedangkan mutasi kurang atas Investasi Permanen terdiri dari Bagian Laba PD BPR Artha Praja atas 2018 yang diterimakan 2019 sebesar Rp355.527.317,00 dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya - Penurunan nilai Investasi pada PDAM pada Laporan Operasional (LO) sebesar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Rp1.180.069.724,04), sehingga saldo akhir Investasi Permanen pada Neraca adalah Rp22.452.712.700,58.

Berikut disajikan rincian saldo Investasi Permanen dibandingkan dengan tahun lalu adalah sebagai berikut:

Tabel 68 Rincian Investasi Permanen Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Des 2018	31 Des 2017
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim - Metode Biaya	4.246.771.092,11	4.246.771.092,11
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dipisahkan pada PDAM - Metode Ekuitas	8.537.938.844,19	8.682.003.857,11
3	Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Praja -Metode Ekuitas	9.668.002.764,28	7.920.739.603,80
Jumlah		22.452.712.700,58	20.849.514.553,02

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim per 31 Desember 2018 sama dengan saldo per 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp4.246.771.092,11. Nilai tersebut merupakan penyertaan modal sebanyak 16.987.084 lembar saham sebagaimana tertera pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 22 tanggal 20 Februari 2018. Adapun Penilaian Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim menggunakan metode biaya;

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.537.938.844,19 dihitung dengan menggunakan Metode Ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar Rp 31.282.368.963,58
s/d tahun 2017

2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar Rp 1.500.000.000,00
pada tahun 2018

3) Penyertaan Hibah dari Pemerintah Pusat Rp 5.981.471.897,50

4) Hibah Pemerintah Provinsi Jatim Rp 1.033.276.800,00

5) Hibah Pemerintah Kota Blitar Rp 214.753.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Kota Blitar Rp 40.011.870.661,08

1) Pengukuran kembali imbalan pasca kerja Rp (192.169.964,00)

2) Rugi s.d 31 Desember 2017 Rp (30.138.042.105,85)

3) Rugi tahun 2018 Rp (1.143.719.747,04)

Jumlah Ekuitas pada PDAM Rp 8.537.938.844,19

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp40.011.870.661,08 terdiri dari modal pendirian dan pembangunan sarana prasarana pengelolaan air minum. Sedangkan tahun 2018 telah dicairkan penyertaan Modal kepada PDAM sebesar Rp1.500.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 20766/LS PEMBIAYAAN DAU tanggal 17 Desember 2018.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Atas nilai Rp31.282.368.963,58 dan Rp1.500.000.000,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai dengan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan PDAM tahun buku 2018. Sedangkan nilai penyertaan modal sebesar Rp7.229.501.697,50 belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sumber pencatatan penyertaan modal kepada PDAM diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyertaan modal dari Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp31.282.368.963,58, berdasarkan:
 - a) Hibah Non Kas dari Pusat atas utang PDAM sebesar Rp19.284.423.541,58 berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
 - b) Penyertaan modal dari penyeteroran ke PDAM sebesar Rp11.997.945.422,00.
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Kota Blitar ke PDAM pada Tahun 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00.
- 3) Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.981.471.897,50, berdasarkan:
 - a) Berita Acara Penyerahan Proyek Dari Walikota Blitar kepada Direktur Utama PDAM Nomor 024/26/422.021/2000 Tanggal 22 Juni 2000 nilai atas penyertaan modal pemerintah pusat sebesar Rp5.715.623.000,00;
 - b) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sarana Air Minum Jawa Timur Nomor 02/BAST/PK-PAM.JT/2010 Tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp167.917.200,00;
 - c) Dokumen lainnya yang masih ditelusuri dokumen berita acara serah terimanya sebesar Rp97.931.697,50.
- 4) Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.033.276.800,00, berdasarkan:
 - a) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sarana Air Minum Jawa Timur Nomor 29/BAST/PK-PAM.JT/2008 Tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp258.744.200,00;
 - b) BAST Pengelolaan Sementara Hasil Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Blitar Nomor 602.1/750/121/PP/2004 Tanggal 5 Oktober 2004 antara Kepala Sub Dinas Pengembangan Perkotaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembangunan Prasarana Perkotaan Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur TA 2004 kepada Plt. Direktur Utama PDAM sebesar Rp645.389.800,00;
 - c) Surat perintah mengeluarkan barang Tanggal 29 April dan 11 Mei 2011 atas pekerjaan SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur di Kota Blitar sebesar Rp31.142.800,00;
 - d) Dokumen lainnya yang masih ditelusuri dokumen berita acara serah terimanya sebesar Rp98.000.000,00.
- 5) Hibah dari Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp214.753.000,00, berdasarkan:
 - a) Dokumen bantuan instalasi perpompaan sesuai SK Walikota Blitar Nomor 188/249/HK/422.010/06 tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp38.500.000,00;
 - b) Proposal Bantuan Renovasi Gedung Kantor PDAM Pagar Pengaman, Pengadaan—Meubelair sebesar Rp176.253.000,00.
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Artha Praja per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.668.002.764,28 atau naik 18,07% dibandingkan dengan saldo



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.920.739.603,80. Kenaikan ini disebabkan adanya tambahan penyertaan modal BPR Artha Praja di Tahun 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 20765/LS PEMBIAYAAN DAU tanggal 17 Desember 2018 dan kenaikan laba Tahun 2018.

Perusahaan Daerah BPR Artha Praja Kota Blitar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar tanggal 21 Juli 2004. Perubahan anggaran dasar terakhir adalah Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/791/HK/410.010.2/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar. Kepemilikan modal Pemerintah Kota Blitar pada BPR Artha Praja adalah 100% sehingga penilaian investasi menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Nilai Penyertaan Modal s/d 31 Desember 2018	Rp	8.000.000.000,00
2) Akumulasi Laba/(Rugi) Tahun 2018	Rp	1.668.002.764,28
Nilai Investasi per 31 Desember 2018	Rp	9.668.002.764,28

Nilai Penyertaan Modal s/d 31 Desember 2018 dirinci sebagai berikut:

1) Investasi awal tahun 2004	Rp	1.000.000.000,00
2) Penambahan modal tahun 2010	Rp	250.000.000,00
3) Penambahan modal Tahun 2012	Rp	750.000.000,00
4) Penambahan modal tahun 2015	Rp	1.500.000.000,00
5) Penambahan modal tahun 2016	Rp	2.000.000.000,00
6) Penambahan modal tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
7) Penambahan modal tahun 2018	Rp	1.500.000.000,00
Jumlah	Rp	8.000.000.000,00

Sedangkan akumulasi Laba/(Rugi) Tahun 2018 dirinci sebagai berikut:

1) Cadangan Umum	Rp	617.476.723,14
2) Cadangan Tujuan	Rp	617.476.723,14
3) Laba bersih per 31/12/2018	Rp	788.576.635,00
4) Pembagian Dividen untuk Daerah	Rp	(355.527.317,00)
Jumlah	Rp	1.668.002.764,28

7.5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan.

Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah guna menjamin kepastian, ketepatan dalam pencatatan dan akurasi data sesuai ketentuan yang berlaku, Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah maupun



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah akan dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar.

Tabel 69 Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2017	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2018
1	Tanah	1.173.293.989.246,00	138.767.504,00	10.342.500.000,00	1.163.090.256.750,00
2	Peralatan dan Mesin	328.744.157.506,69	52.757.730.645,41	3.773.614.457,15	377.728.273.694,95
3	Gedung dan Bangunan	649.499.167.474,13	55.335.661.029,99	19.871.575.051,04	684.963.253.453,08
4	Jalan, irigasi dan Jaringan	632.906.748.635,97	58.938.117.744,26	1.623.899.140,81	690.220.967.239,42
5	Aset Tetap lainnya	31.585.849.785,80	3.453.855.815,00	13.491.000,00	35.026.214.600,80
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.189.132.700,00	2.380.683.000,00	2.541.782.800,00	14.028.032.900,00
7	Akumulasi Penyusutan	(783.201.587.881,19)	(102.777.899.599,27)	(35.979.091.994,89)	(850.000.395.485,57)
Jumlah Aset Tetap		2.047.017.457.467,40	70.226.916.139,39	2.187.770.454,11	2.115.056.603.152,68

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.115.056.603.152,68 atau naik sebesar 3,05% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.047.017.457.467,40.

Rincian Aset Tetap per jenis aset adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1. Tanah	1.163.090.256.750,00	1.173.293.989.246,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.163.090.256.750,00 atau turun 0,88% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.173.293.989.246,00. Rincian mutasi Tanah tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017 **Rp 1.173.293.989.246,00**

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal TA 2018 pada Dinas lingkungan Hidup Rp 138.767.500,00
2. Dampak kumulatif atas tindak lanjut temuan BPK tahun 2018 atas 4 bidang tanah yang belum tercatat pada :
 - a. Kelurahan Turi berupa tanah makam sebesar Rp1,00 dan tanah sawah sebesar Rp1,00
 - b. Kelurahan Gedog berupa tanah eigendom sebesar Rp1,00
 - c. Kelurahan Sananwetan berupa tanah eks bengkok sebesar Rp1,00

Jumlah **Rp 138.767.504,00**



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Mutasi Kurang:

Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Lain-lain berupa usulan penghapusan tanah yang dimutasikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Jumlah	Rp 10.342.500.000,00	
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Tanah		Rp (10.203.732.496,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2018		Rp 1.163.090.256.750,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	377.728.273.694,95	328.744.157.506,69

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp377.728.273.694,95 atau naik 14,97% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp328.744.157.506,69. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin tahun 2018 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017 **Rp 328.744.157.506,69**

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2018 Rp 50.229.575.194,41
2. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2018 Rp 1.325.335.150,00
3. Beban Atribusi Honorarium PPHP, Tim Pengadaan dan Tim Pelaksana Kegiatan, perjalanan dinas yang diatribusi ke Peralatan dan Mesin Rp 935.000,00
4. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi sebagai Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan berupa penambahan manfaat bus terdiri dari pembelian AC bus Rp65.300.000,00, baterai/aki Rp1.900.000,00 dan biaya pasang Rp10.200.000,00 Rp 77.400.000,00
5. Hibah Peralatan dan Mesin dari *Corporate Social Responsibility* Bank Jatim berupa bus pada Dinas Perhubungan Rp 685.200.000,00
6. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan pada :
 - a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (*spot selfie*) Rp 15.000.000,00
 - b. Kecamatan Sananwetan Rp 15.075.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

<i>(backdrop)</i>			
c. Kelurahan	Kepanjenkidul	Rp	5.300.000,00
<i>(running text)</i>			
d. Kelurahan	Kepanjenkidul	Rp	16.200.000,00
<i>(backdrop)</i>			
e. Kelurahan Blitar (papan data)		Rp	12.000.000,00
f. Dinas Sosial (motor)		Rp	29.700.000,00
7. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari Aset Tidak Berwujud berupa komputer pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			
		Rp	16.061.400,00
8. Hibah Peralatan dan Mesin dari APBN berupa Peralatan IPA, Matematika dan Lab TIK sebesar Rp274.871.000,00 pada:			
a. SMPN 3		Rp	214.426.000,00
b. SMPN 5		Rp	31.745.000,00
c. SMPN 6		Rp	28.700.000,00
9. Dampak kumulatif atas tindak lanjut temuan BPK, Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum tercatat pada pada Dinas Kesehatan berupa 1 buah mobil kijang dan 2 buah motor			
		Rp	3,00
10. Kapitalisasi Peralatan dan Mesin dari Belanja barang, antara lain:			
a. Dinas Pendidikan (SDN Rembang 1 - BOS) berupa Papan Gugus Depan		Rp	750.000,00
b. RSD Mardi Waluyo berupa alat peraga kesehatan		Rp	47.639.498,00
c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa Papan Himbauan Pedagang		Rp	1.500.000,00
d. Dinas Pendidikan (SDN Ngadirejo 1 - BOS) berupa Mic		Rp	997.000,00
e. Dinas Pendidikan (SDN Karangtengah 2 - BOS) berupa Kipas Angin		Rp	490.000,00
f. Dinas Pendidikan (SDN Bendogerit 1 - BOS) berupa Mic dan Stand Mic		Rp	730.000,00
g. Dinas Pendidikan (SDN Tlumpu - BOS) berupa Rice Cooker dan Drink Jar		Rp	651.400,00
h. Dinas Pendidikan (SDN Karang Sari 2 - BOS) berupa Wall Fan		Rp	720.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

i. Dinas Pendidikan (SDN Karangsari 3 - BOS) berupa Mic	Rp	400.000,00
j. Dinas Pendidikan (SDN Tanjungsari 2 - BOS) berupa Mic dan Stand Mic	Rp	1.200.000,00
Jumlah	Rp	52.757.730.645,41

Mutasi Kurang:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak diakui sebagai aset tetap karena nilai per unitnya di bawah ketentuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp500.000,00
 - a. APBD Rp 864.951.610,00
 - b. BOS Rp 53.832.900,00
 - c. APBN Rp 54.966.500,00
2. Reklasifikasi akun dari Peralatan dan Mesin BOS ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Rp 5.295.000,00
3. Reklasifikasi akun dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain sebesar Rp1.414.968.168,65 pada:
 - a. Dinas Pendidikan (usulan penghapusan alat lab) Rp 289.101.060,50
 - b. Dinas Perhubungan Rp 157.887.350,00
 - c. Dinas Kesehatan Rp 147.647.295,00
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Rp 307.959.532,15
 - e. Dinas Sosial (usulan penghapusan motor) Rp 8.000.000,00
 - f. Dinas Lingkungan Hidup (usulan penghapusan truk tanki) Rp 74.000.000,00
 - g. Dinas Pariwisata (usulan penghapusan motor) Rp 53.000.000,00
 - h. BPKAD (usulan penghapusan mobil katana) Rp 25.000.000,00
 - i. Bagian Umum (usulan penghapusan Kendaraan Dinas) Rp 221.763.901,00
 - j. Sekretariat DPRD Rp 126.359.030,00
 - k. Kecamatan Sananwetan Rp 4.250.000,00
4. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada :
 - a. Dinas Penanaman Modal berupa papan data sesuai dengan SK Nomor 188/432/HK/410.102.2/2018 Rp 7.500.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

b. Dinas Lingkungan Hidup berupa bak sampah sesuai dengan SK Nomor 188/142/HK/410.010.2/2018	Rp	4.517.500,00
5. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp79.500.000,00 antara lain :		
a. Review perencanaan pembangunan jaringan fiber optik	Rp	30.000.000,00
b. Penyusunan dokumen upaya pemantauan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup pemasangan jaringan fiber optik	Rp	49.500.000,00
6. Koreksi kurang Aset Tetap Peralatan Mesin ke Aset Lain-lain dikarenakan kondisi rusak berat pada:		
a. RSUD Mardi Waluyo	Rp	174.465.625,00
b. Dinas Kesehatan	Rp	328.652.000,00
c. Dinas Pendidikan	Rp	258.397.626,00
d. Sekretariat Daerah	Rp	497.463.827,50
7. Koreksi mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang ternyata teridentifikasi sebagai barang Persediaan dan telah dipergunakan sehingga tidak terdapat fisik barangnya per 31/12/2018 pada RSUD Mardi Waluyo	Rp	29.103.700,00
Jumlah	Rp	3.773.614.457,15

Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	Rp	48.984.116.188,26
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp	377.728.273.694,95

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	684.963.253.453,08	649.499.167.474,13
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp684.963.253.453,08 atau naik 5,46% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp649.499.167.474,13 Rincian mutasi Gedung dan Bangunan tahun 2018 sebagai berikut:		

Saldo per 31 Desember 2017 **Rp649.499.167.474,13**

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2018	Rp	45.914.811.929,99
2. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2018	Rp	63.283.500,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Reklasifikasi dari KDP TA 2018 ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.997.979.800,00 terdiri dari :		
a. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.892.196.800,00 berupa :		
1) Pembangunan tribun stadion supriyadi	Rp	1.200.949.100,00
2) Pembangunan Tribun GOR Supriyadi Kota Blitar	Rp	641.697.700,00
3) DED tribun stadion (kios produk unggulan)	Rp	49.550.000,00
4) Perencanaan Pembangunan Interior Kios Tribun SEBELAH SELATAN	Rp	9.680.000,00
b. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berupa Review DED RSUD Mardi Waluyo	Rp	50.238.000,00
c. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berupa DED lantai 2 pembangunan gedung Kominfo	Rp	45.865.000,00
4. Reklasifikasi akun ke Gedung dan Bangunan dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana berupa Kolam koi	Rp	20.000.000,00
5. Dampak Kumulatif Gedung Bangunan berupa Hibah Rehab RKB pada SMPN 4 pada tahun 2014	Rp	180.000.000,00
6. Hibah APBN berupa TPA pada Dinas Lingkungan Hidup	Rp	6.548.076.000,00
7. Utang Belanja Modal berupa jaminan pemeliharaan pada Pembangunan Gedung Bedah Sentral RSD Mardi Waluyo	Rp	587.669.800,00
8. Kapitalisasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa pada:		
a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa Pagar Pembatas	Rp	23.500.000,00
b. Dinas Pendidikan (SDN Tlumpu - BOS) berupa Traffic Cone	Rp	340.000,00
Jumlah	Rp	55.335.661.029,99



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Mutasi Kurang:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak diakui sebagai aset tetap:
 - a. APBD Rp 425.178.325,00
 - b. BOS Rp 28.390.000,00
2. Reklasifikasi akun Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin pada:
 - a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (*spot selfie*) Rp 15.000.000,00
 - b. Kecamatan Sananwetan (*backdrop*) Rp 15.075.000,00
 - c. Kelurahan Kepanjenkidul (*running text*) Rp 5.300.000,00
 - d. Kelurahan Kepanjenkidul (*backdrop*) Rp 16.200.000,00
 - e. Kelurahan Blitar (papan data) Rp 12.000.000,00
 - f. Dinas Sosial (motor) Rp 29.700.000,00
3. Reklasifikasi akun Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada:
 - a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa paving jalan Rp 1.821.926.000,00
 - b. Kelurahan Pakunden berupa paving jalan Rp 52.660.000,00
 - c. Kelurahan Tlumpu berupa paving jalan Rp 59.700.000,00
4. Reklasifikasi akun Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain pada Dinas Perhubungan berupa usulan penghapusan gedung yang dimutasikan ke Provinsi Jawa Timur pada Dinas Perhubungan Rp 15.904.938.512,74
5. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada:
 - a. Kelurahan Bendo berupa gedung sarasehan sesuai dengan SK Nomor 188/155/HK/410.010.2/2018
 - b. Dinas Lingkungan Hidup berupa tempat parkir Kebonrojo dan Monumen 1 Abad Kebonrojo sesuai SK nomor 188/433/HK/410.010.2/2018 Rp 157.954.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6. Pembayaran utang belanja modal tahun anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum atas pembangunan Tribun GOR Supriyadi Kota Blitar oleh CV Karya Makmur Kontrak Nomor 640.DAU/525/410.102/2018 sesuai SP2d Nomor 21970/LS DAU Rp 641.697.700,00
7. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp627.589.500,00 pada:
- a. Kelurahan Tanggung berupa Pondasi pagar Rp 18.000.000,00
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana berupa Detail engineering desain rehab gedung pada Rp 24.750.000,00
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berupa Perencanaan ruang hemodialisa Rp 49.600.000,00
 - d. Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp18.010.000,00 antara lain:
 - 1) Honor pembangunan pasar pahing pada Rp 3.060.000,00
 - 2) Honor pembangunan taman eks kelurahan bendo Rp 2.550.000,00
 - 3) Review perencanaan taman rembang Rp 12.400.000,00
 - e. Dinas Kesehatan berupa Perencanaan Pembangunan Puskesmas Sukorejo (gagal lelang) Rp 133.144.500,00
 - f. Dinas Pendidikan sebesar Rp99.780.000,00 antara lain:
 - 1) *Masterplan* pembangunan SMP 3 Rp 98.130.000,00
 - 2) Atribusi jasa konsultan pembangunan SMP 3 pada Rp 1.650.000,00
 - g. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp284.305.000,00 antara lain:
 - 1) Upaya pemantauan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup Pasar Legi Rp 184.955.000,00
 - 2) Upaya pemantauan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup Pasar Sayur Rp 99.350.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

8. Koreksi kurang Aset Tetap - Gedung dan Bangunan dan beban penyusutan AT - Gedung dan Bangunan karena kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Rp 39.912.013,30

Jumlah **Rp 19.871.575.051,04**

Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Rp35.464.085.978,95

Saldo Akhir per 31 Desember 2018 **Rp684.963.253.453,08**

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>690.220.967.239,42</u>	<u>632.906.748.635,97</u>

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp690.220.967.239,42 naik 9,06% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp632.906.748.635,97. Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017 **Rp632.906.748.635,97**

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2018 Rp 57.003.831.744,26
2. Reklasifikasi akun Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Gedung dan Bangunan pada:
 - a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa paving jalan Rp 1.821.926.000,00
 - b. Kelurahan Pakunden berupa paving jalan Rp 52.660.000,00
 - c. Kelurahan Tlumpu berupa paving jalan Rp 59.700.000,00

Jumlah **Rp 58.938.117.744,26**

Mutasi Kurang:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak diakui sebagai aset tetap Rp 12.093.800,00
2. Reklasifikasi akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana berupa kolam koi Rp 20.000.000,00
3. Reklasifikasi akun dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp690.796.000,00 pada :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp641.843.000,00 berupa:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1)	Perencanaan peningkatan jalan Sumatra	Rp	9.000.000,00
2)	Perencanaan peningkatan jalan palem - jalan cemara	Rp	9.000.000,00
3)	Perencanaan peningkatan jalan perempatan serayu	Rp	3.000.000,00
4)	Perencanaan peningkatan jalan merapi	Rp	15.800.000,00
5)	Perencanaan rehab saluran jalan kacapiring	Rp	11.850.000,00
6)	Perencanaan saluran irigasi di tulungrejo	Rp	20.310.000,00
7)	Perencanaan pembangunan Peningkatan jalan tahun 2019	Rp	48.000.000,00
8)	Perencanaan peningkatan jalan mahakam lanjutan	Rp	55.198.000,00
9)	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Rp	64.880.000,00
10)	Perencanaan kegiatan blk jalan di kecamatan sananwetan	Rp	95.170.000,00
11)	Perencanaan kegiatan blk jalan di kecamatan kepanjenkidul	Rp	95750000
12)	Perencanaan kegiatan pemeliharaan irigasi DAK	Rp	98.942.000,00
13)	Perencanaan peningkatan jalan kali brantas	Rp	114.943.000,00
	a. Dinas Perumahan Rakyat berupa perencanaan strain sungai lahar Kelurahan Sukorejo	Rp	17.888.000,00
	b. Dinas Perhubungan sebesar Rp31.065.000,00 berupa:		
	1) Perencanaan penerangan jalan umum	Rp	30.000.000,00
	2) Honor perencanaan penerangan jalan umum	Rp	1.065.000,00
4.	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Persediaan sebesar Rp788.196.000,00 pada:		
	a. Dinas Perhubungan berupa Lampu Penerangan Jalan Umum	Rp	190.217.000,00
	b. Dinas Pekerjaan Umum & PR berupa SR tambahan dan SPAM yang diserahkan ke Masyarakat	Rp	597.979.000,00
5.	Koreksi kurang Aset Tetap – Jalan, Irigasi Jaringan karena kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	16.263.091,08
6.	Koreksi mengurangi Aset Tetap Jalan Irigasi, dan Jaringan yang terdampak	Rp	96.550.249,73



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

temuan pemeriksaan jasa konsultansi
pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Jumlah	Rp 1.623.899.140,81
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 57.314.218.603,45
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp 690.220.967.239,42

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	35.026.214.600,80	31.585.849.785,80

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp35.026.214.600,80 naik 10,89% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp31.585.849.785,80. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017 **Rp31.585.849.785,80**

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2018	Rp 1.255.077.950,00
2. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2018	Rp 2.184.378.865,00
3. Reklasifikasi akun Aset Tetap Lainnya BOS ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan	Rp 5.295.000,00
4. Hibah Aset Tetap Lainnya dari APBN berupa Peralatan IPS sebesar Rp9.104.000,00 antara lain :	
a. SMPN 3	Rp 4.552.000,00
b. SMPN 5	Rp 4.552.000,00
Jumlah	Rp 3.453.855.815,00

Mutasi Kurang:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak diakui sebagai Aset Tetap	
a. APBD	Rp 3.622.000,00
b. BOS	Rp 845.000,00
2. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Persediaan, antara lain:	
a. Dinas Pendidikan (SDN Sananwetan 2 BOS) berupa Bibit Tanaman	Rp 9.000.000,00
b. Dinas Pendidikan (SDN Kauman 1 BOS) berupa canting membatik	Rp 24.000,00
Jumlah	Rp 13.491.000,00

Jumlah mutasi bersih Aset Tetap Lainnya	<u>Rp3.440.364.815,00</u>
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp35.026.214.600,80



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.028.032.900,00	14.189.132.700,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Saldo KDP per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.028.032.900,00 atau turun 1,15% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp14.189.132.700,00. Rincian mutasi KDP tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017

Rp14.189.132.700,00

Mutasi Tambah:

1. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp79.500.000,00 antara lain:
 - a. Review perencanaan pembangunan jaringan *fiber optic* Rp 30.000.000,00
 - b. Penyusunan dokumen Upaya pemantauan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup pemasangan jaringan fiber optic Rp 49.500.000,00
2. Reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp627.589.500,00 pada:
 - a. Kelurahan Tanggung berupa Pondasi pagar Rp 18.000.000,00
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana berupa *Detail Engineering Desain* rehab gedung pada Rp 24.750.000,00
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berupa Perencanaan ruang hemodialisa Rp 49.600.000,00
 - d. Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp18.010.000,00 antara lain:
 - 1) Honor pembangunan pasar pahing Rp 3.060.000,00
 - 2) Honor pembangunan taman eks kelurahan bendo Rp 2.550.000,00
 - 3) Review perencanaan taman rembang Rp 12.400.000,00
 - e. Dinas Kesehatan berupa Perencanaan pembangunan puskesmas sukorejo (gagal lelang) Rp 133.144.500,00
 - f. Dinas Pendidikan sebesar Rp99.780.000,00 antara lain:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1) Masterplan pembangunan SMPN 3	Rp	98.130.000,00
2) Atribusi jasa konsultan pembangunan SMPN 3	Rp	1.650.000,00
g. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp284.305.000,00 antara lain:		
1) Upaya pemantauan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup Pasar Legi	Rp	184.955.000,00
2) Upaya pemantauan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup Pasar Sayur	Rp	99.350.000,00
3. Reklasifikasi akun Konstruksi dalam Pengerjaan dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp690.796.000,00 pada:		
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp641.843.000,00 berupa:		
1) Perencanaan peningkatan jalan Sumatra	Rp	9.000.000,00
2) Perencanaan peningkatan jalan palem - jalan cemara	Rp	9.000.000,00
3) Perencanaan peningkatan jalan perempatan serayu	Rp	3.000.000,00
4) Perencanaan peningkatan jalan merapi	Rp	15.800.000,00
5) Perencanaan rehab saluran jalan kacapiring	Rp	11.850.000,00
6) Perencanaan saluran irigasi di tulungrejo	Rp	20.310.000,00
7) Perencanaan pembangunan peningkatan jalan tahun 2019	Rp	48.000.000,00
8) Perencanaan peningkatan jalan mahakam lanjutan	Rp	55.198.000,00
9) Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Rp	64.880.000,00
10) Perencanaan kegiatan blk jalan di kecamatan sananwetan	Rp	95.170.000,00
11) Perencanaan kegiatan blk jalan di kecamatan kepanjenkidul	Rp	95750000
12) Perencanaan kegiatan pemeliharaan irigasi DAK	Rp	98.942.000,00
13) Perencanaan peningkatan jalan kali brantas	Rp	114.943.000,00
b. Dinas Perumahan Rakyat berupa perencanaan strain sungai lahar Kelurahan Sukorejo	Rp	17.888.000,00
c. Dinas Perhubungan sebesar Rp31.065.000,00 berupa:		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1) Perencanaan penerangan jalan umum	Rp	30.000.000,00
2) Honor perencanaan penerangan jalan umum	Rp	1.065.000,00
4. Kapitalisasi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Belanja Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp535.473.500,00 antara lain:		
a. <i>Masterplan</i> Pasar Dimoro	Rp	75.006.000,00
b. <i>Masterplan</i> Pasar Legi	Rp	74.676.000,00
c. <i>Masterplan</i> Pengembangan Puskesmas Sukorejo	Rp	49.555.000,00
d. <i>Review Masterplan E-Governance</i>	Rp	78.534.000,00
e. Studi Kelayakan Relokasi Kantor Kelurahan Karangtengah	Rp	49.720.000,00
f. Studi Kelayakan Pasar Legi	Rp	81.290.000,00
g. Studi Kelayakan Pengembangan Pasar Dimoro	Rp	77.275.000,00
h. Studi Kelayakan Pengembangan Puskesmas Sukorejo	Rp	49.417.500,00
5. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tak berwujud Rp447.324.000,00 antara lain:		
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Karangtengah	Rp	42.582.000,00
b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Pasar Legi	Rp	404.742.000,00
Jumlah	Rp	2.380.683.000,00

Mutasi Kurang:

1. Reklasifikasi dari KDP TA 2018 ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.997.979.800,00 terdiri dari:		
a. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.892.196.800,00 berupa:		
1) Pembangunan tribun stadion supriyadi	Rp	1.200.949.100,00
2) Pembangunan Tribun GOR Supriyadi Kota Blitar	Rp	641.697.700,00
3) DED tribun stadion (kios produk unggulan)	Rp	49.550.000,00
4) Perencanaan Pembangunan Interior Kios Tribun SEBELAH SELATAN	Rp	9.680.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

b. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berupa review DED RSUD Mardi Waluyo	Rp	50.238.000,00
c. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berupa DED lantai 2 pembangunan Gedung Kominfo	Rp	45.865.000,00
2. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp532.331.000,00 pada:		
a. Dinas Pendidikan sebesar Rp98.130.000,00 yaitu Masterplan SMP	Rp	98.130.000,00
b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp99.350.000,00 yaitu Upaya pemantauan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Andalalin Pasar Sayur	Rp	99.350.000,00
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp334.851.000,00 antara lain:		
1) Perencanaan Peningkatan Jalan Sumatra	Rp	9.000.000,00
2) Perencanaan Peningkatan Jalan Palembang - Jalan Cemara	Rp	9.000.000,00
3) Perencanaan Peningkatan Jalan Perempatan Serayu	Rp	3.000.000,00
4) Perencanaan Peningkatan Jalan Merapi	Rp	15.800.000,00
5) Perencanaan Rehab Saluran Jalan Kacapiring	Rp	11.850.000,00
6) Perencanaan saluran irigasi di tulungrejo	Rp	20.310.000,00
7) Perencanaan Peningkatan Jalan Mahakam Lanjutan	Rp	55.198.000,00
8) Perencanaan kegiatan blk jalan di Kecamatan Kepanjenkidul	Rp	95.750.000,00
9) Perencanaan Peningkatan Jalan Kali Brantas	Rp	114.943.000,00
3. Koreksi mengurangi Aset Tetap KDP yang terdampak temuan pemeriksaan jasa konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	11.472.000,00

Jumlah	Rp 2.541.782.800,00	
Jumlah mutasi bersih Konstruksi Dalam Pengerjaan		Rp(161.099.800,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2018		Rp14.028.032.900,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.3.1.4 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1. Akumulasi Penyusutan	(850.000.395.485,58)	(783.201.587.881,19)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Blitar dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah. Akumulasi Penyusutan Tahun 2018 sebesar (Rp850.000.395.485,58) ini mengalami kenaikan sebesar 8,53% dibandingkan Tahun 2017 sebesar (Rp783.201.587.881,19).

Tabel 70 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Akumulasi Penyusutan	Saldo 31 Desember 2017	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang			Saldo 31 Desember 2018
			Beban Penyusutan	Dampak Kumulatif	Beban Penyusutan	Dampak Kumulatif	Penghapusan	
1	Peralatan dan Mesin	232.130.166.424,41	39.162.289.396,71	137.040.000,00	0,00	3.249.925.163,29	8.403.500,00	268.171.167.157,83
2	Gedung dan Bangunan	262.037.851.634,91	25.230.151.986,60	36.000.000,00	0,00	19.377.809.891,39	98.074.000,00	267.828.119.730,12
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	283.403.590.033,28	36.951.285.013,01	434.249.751,56	0,00	13.243.635.240,21	0,00	307.545.489.557,64
4	Aset Tetap Lainnya	5.629.979.788,59	826.883.451,40	0,00	1.244.200,00	0,00	0,00	6.455.619.039,99
Jumlah Akumulasi Penyusutan		783.201.587.881,19	102.170.609.847,72	607.289.751,56	1.244.200,00	35.871.370.294,89	106.477.500,00	850.000.395.485,58

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(268.171.167.157,83)	(232.130.166.424,41)

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar (Rp268.171.167.157,83) atau naik sebesar 16,92% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (Rp232.130.166.424,41). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017 **Rp (232.130.166.424,41)**

Mutasi Tambah:

1. Beban Penyusutan TA 2018	Rp (39.162.289.396,71)
2. Dampak Kumulatif Akumulasi Penyusutan Bus dari Hibah CSR tahun 2016-2017 pada Dinas Perhubungan	Rp (137.040.000,00)
Jumlah	Rp (39.299.329.396,71)

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada :	
a. Dinas Penanaman Modal dan	Rp (7.500.000,00)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

b. Dinas Lingkungan Hidup	Rp	(903.500,00)
2. Dampak Kumulatif Akumulasi Penyusutan dari Koreksi Kurang Catat	Rp	(3.249.925.163,29)
Jumlah	Rp	<u>(3.258.328.663,29)</u>

Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	(36.041.000.733,42)
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp	<u>(268.171.167.157,83)</u>

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	<u>(267.828.119.730,12)</u>	<u>(262.037.851.634,91)</u>

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar (Rp267.828.119.730,12) atau turun sebesar 3,38% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (Rp262.037.851.634,91). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	(262.037.851.634,91)
-----------------------------------	-----------	-----------------------------

Mutasi Tambah:

1. Beban Penyusutan 2018	TA	Rp	(25.230.151.986,60)
2. Dampak Kumulatif Akumulasi Penyusutan Rehab RKB dari APBN tahun 2014-2017 pada UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4		Rp	(36.000.000,00)
Jumlah		Rp	<u>(25.266.151.986,60)</u>

Mutasi Kurang:

1. Dampak Kumulatif Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan atribusi Gedung dan Bangunan ke induknya pada 3 OPD, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian		Rp	(19.377.809.891,39)
--	--	----	---------------------



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Penghapusan Aset Tetap

Peralatan dan Mesin pada :

a. Kelurahan Bendo	Rp	(5.506.200,00)
b. Dinas Lingkungan Hidup	Rp	(92.567.800,00)

Jumlah	Rp	(19.475.883.891,39)	
Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			Rp (5.790.268.095,21)

Saldo Akhir per 31 Desember 2018 **Rp (267.828.119.730,12)**

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(307.545.489.557,64)	(283.403.590.033,28)

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar (Rp307.545.489.557,64) atau naik sebesar 8,08% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (Rp283.403.590.033,28). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2018 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017 **Rp (283.403.590.033,28)**

Mutasi Tambah:

1. Beban Penyusutan TA 2018	Rp	(36.951.285.013,01)
2. Dampak Kumulatif atas kesalahan penghitungan Akumulasi Penyusutan pada 59 unit kerja	Rp	(434.249.751,56)
Jumlah	Rp	(37.385.534.764,57)

Mutasi Kurang:

Dampak Kumulatif atas kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan	Rp	(13.243.635.240,21)
Jumlah	Rp	(13.243.635.240,21)

Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp (24.141.899.524,36)

Saldo Akhir per 31 Desember 2018 **Rp (307.545.489.557,64)**



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(6.455.619.039,99)	(5.629.979.788,59)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar (Rp6.455.619.039,99) atau naik sebesar 8,78% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (Rp5.629.979.788,59). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017 **Rp (5.629.979.788,59)**

Mutasi Tambah:

Beban Penyusutan TA 2018	Rp (826.883.451,40)
Jumlah	Rp (826.883.451,40)

Mutasi Kurang:

Beban Penyusutan TA 2018	Rp (1.244.200,00)
Jumlah	Rp (1.244.200,00)

Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp (825.639.251,40)

Saldo Akhir per 31 Desember 2018 **Rp (6.455.619.039,99)**

Selain Aset Tetap tersebut diatas, Pemerintah Kota Blitar membukukan nilai Aset Tetap Ekstrakomptabel per 31 Desember 2018 pada OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp1.443.880.135,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71 Rincian Aset Tetap Ekstrakomptabel per 31 Desember Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No	Nama OPD/Unit Kerja	Peralatan dan mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Instalasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	646.246.100,00	28.390.000,00		845.000,00	675.481.100,00
2	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1					-
3	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2		12.500.000,00			12.500.000,00
4	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 3	6.801.600,00				6.801.600,00
5	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4					-
6	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 5	37.890.700,00				37.890.700,00
7	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 6	23.472.700,00				23.472.700,00
8	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7	18.925.000,00				18.925.000,00
9	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8					-
10	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 9	850.000,00				850.000,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga					-
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	660.000,00				660.000,00
13	Dinas Perhubungan	1.506.720,00	150.423.325,00			151.930.045,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro					-
15	Satuan Polisi Pamong Praja					-
16	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu SatuPintu					-



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama OPD/Unit Kerja	Peralatan dan mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Instalasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.116.000,00				7.116.000,00
18	Dinas Perumahan Rakyat	6.511.500,00				6.511.500,00
19	Dinas Kesehatan	1.839.100,00				1.839.100,00
20	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	21.470.490,00				21.470.490,00
21	UPT Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	16.398.018,00				16.398.018,00
22	UPT Puskesmas Kecamatan Sukorejo	17.308.959,00				17.308.959,00
23	UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan	27.823.023,00				27.823.023,00
24	Dinas Sosial					-
25	Dinas Lingkungan Hidup	16.500.500,00				16.500.500,00
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					-
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB					-
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.350.000,00				12.350.000,00
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					-
30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		23.500.000,00			23.500.000,00
31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			12.093.800,00		12.093.800,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					-
33	Inspektorat Daerah					-
34	Badan Kepegawaian Daerah					-
35	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah					-
36	Bagian Umum	10.000.000,00	176.694.000,00			186.694.000,00
37	Bagian Tata Pemerintahan					-
38	Bagian Hukum dan Organisasi					-
39	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat					-
40	Bagian Humas dan Protokol	1.250.000,00				1.250.000,00
41	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan					-
42	Sekretariat DPRD	45.602.000,00				45.602.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	4.050.000,00				4.050.000,00
44	Kecamatan Kepanjenkidul	23.125.000,00	14.950.000,00			38.075.000,00
45	Kecamatan Sukorejo	10.181.600,00			2.500.000,00	12.681.600,00
46	Kecamatan Sananwetan					-
47	Kelurahan Ngadirejo					-
48	Kelurahan Sentul					-
49	Kelurahan Kauman					-
50	Kelurahan Tanggung					-
51	Kelurahan Bendo	9.500.000,00				9.500.000,00
52	Kelurahan Kepanjenlor					-



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama OPD/Unit Kerja	Peralatan dan mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Instalasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
53	Kelurahan Kepanjenkidul		5.000.000,00			5.000.000,00
54	Kelurahan Pakunden					-
55	Kelurahan Blitar					-
56	Kelurahan Tlumpu					-
57	Kelurahan Turi		28.211.000,00			28.211.000,00
58	Kelurahan Karangsari	3.750.000,00				3.750.000,00
59	Kelurahan Sukorejo					-
60	Kelurahan Tanjungsari					-
61	Kelurahan Gedog					-
62	Kelurahan Plosokerep	712.000,00				712.000,00
63	Kelurahan Klampok	960.000,00	4.000.000,00			4.960.000,00
64	Kelurahan Sananwetan	950.000,00				950.000,00
65	Kelurahan Rembang		9.900.000,00			9.900.000,00
66	Kelurahan Karangtengah				1.122.000,00	1.122.000,00
67	Kelurahan Bendogerit					-
Total		973.751.010,00	453.568.325,00	12.093.800,00	4.467.000,00	1.443.880.135,00

7.5.3.1.5. Aset Lainnya

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Aset Lainnya	35.950.812.408,60	6.786.581.680,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp35.950.812.408,60 atau naik 429,73% dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.786.581.680,00. Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	500.000,00	500.000,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2018 sebesar Rp500.000,00. Tidak terdapat perubahan saldo dari tahun 2017.

Kondisi objek TGR ada yang sudah meninggal, dan beberapa telah melakukan upaya permohonan penghapusan TGR kepada Walikota Blitar. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi TGR, Pemerintah Kota Blitar sedang mengajukan proses penyerahan TGR ke KPKNL Malang untuk diterbitkan PSBDT (Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih) sebagai syarat penerbitan Keputusan Walikota Blitar tentang penghapusan bersyarat.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.114.000.000,00	3.114.000.000,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.114.000.000,00 merupakan nilai aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Blitar yang dikerjasamakan dengan metode Bangun Guna Serah (BGS) untuk *Blitar Square* berdasarkan perjanjian Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar diaddendum dengan perjanjian Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
3. Aset Tak Berwujud	10.229.115.280,00	9.354.959.450,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.229.115.280,00 atau naik sebesar 8,62% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.354.959.450,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset *software*, masterplan, dan kajian dengan rincian mutasi Aset Tak Berwujud tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017 **Rp 9.354.959.450,00**

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2018 Rp 1.912.838.380,00
2. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2018 Rp 6.500.000,00
3. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp532.331.000,00 pada:
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp98.130.000,00 yaitu *Masterplan SMP*
 - b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp99.350.000,00 antara lain:
 - 1) Upaya pemantauan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Andalalin Pasar Sayur Rp 98.130.000,00
 - 2) Upaya pemantauan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Andalalin Pasar Sayur Rp 99.350.000,00
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp334.851.000,00 antara lain:		
1) Perencanaan Peningkatan Jalan Sumatra	Rp	9.000.000,00
2) Perencanaan Peningkatan Jalan Palem - Jalan Cemara	Rp	9.000.000,00
3) Perencanaan Peningkatan Jalan Perempatan Serayu	Rp	3.000.000,00
4) Perencanaan Peningkatan Jalan Merapi	Rp	15.800.000,00
5) Perencanaan Rehab Saluran Jalan Kacapiring	Rp	11.850.000,00
6) Perencanaan saluran irigasi di tulungrejo	Rp	20.310.000,00
7) Perencanaan Peningkatan Jalan Mahakam Lanjutan	Rp	55.198.000,00
8) Perencanaan kegiatan blk jalan di Kecamatan Kepanjenkidul	Rp	95.750.000,00
9) Perencanaan Peningkatan Jalan Kali Brantas	Rp	114.943.000,00
4. Kapitalisasi Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud dari Belanja Barang sebesar Rp782.960.950,00 pada antara lain:		
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp734.349.950,00, antara lain:		
1) <i>Masterplan</i> Taman Kehati	Rp	75.493.000,00
2) <i>Masterplan Outbound</i> Gedog	Rp	78.800.000,00
3) <i>Masterplan</i> Pasar Sayur	Rp	75.625.000,00
4) <i>Masterplan</i> Pengembangan Waterpark Sumber Udel	Rp	74.525.000,00
5) Review Dokumen <i>Masterplan</i> Sirkuit Sentul	Rp	87.037.000,00
6) Studi Kelayakan Kantor Kelurahan Ngadirejo	Rp	49.555.000,00
7) Studi Kelayakan Taman Kehati Tanjungsari	Rp	77.907.500,00
8) Studi Kelayakan Pengembangan Waterpark Sumber Udel	Rp	81.768.000,00
9) Studi Kelayakan Pembangunan Pasar Sayur	Rp	67.634.000,00
10) Studi Kelayakan RTH Gedog (Taman Outbond)	Rp	49.775.000,00
11) Aplikasi SIPUAS (Sistem Informasi Pelayanan Umum dan Administrasi Sekretariat)	Rp	16.230.450,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

b. Dinas Perumahan Rakyat berupa Perencanaan FS Pembangunan Gedung Kantor Dispera	Rp	39.611.000,00
c. UPTD SMPN 9 - BOS berupa Aplikasi Pengembangan Evaluasi Pembelajaran bagi siswa	Rp	9.000.000,00
5. Hibah Aset Tak Berwujud dari APBN pada SMPN 3 berupa peralatan laboratorium TIK	Rp	22.039.000,00
Jumlah	Rp	3.256.669.330,00

Mutasi Kurang:

1. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari Aset Tidak Berwujud berupa komputer pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Rp	16.061.400,00
2. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tak Berwujud Rp447.324.000,00 antara lain:		
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Karangtengah	Rp	42.582.000,00
b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Pasar Legi	Rp	404.742.000,00
3. Koreksi mengurangi Aset Tak Berwujud yang terdampak temuan pemeriksaan jasa konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	2.920.400,00
4. Reklasifikasi Akun Aset Tak Berwujud ke Aset Lain-lain dikarenakan sudah tidak dimanfaatkan lagi sebesar Rp1.916.207.700,00 pada:		
a. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	312.250.000,00
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	413.115.200,00
c. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Rp	10.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 609.732.500,00

e. RSUD Mardi Waluyo Rp 571.110.000,00

Jumlah Rp 2.382.513.500,00

Jumlah mutasi bersih Aset Tak Berwujud Rp 874.155.830,00

Saldo Akhir per 31 Desember 2018 Rp 10.229.115.280,00

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
4. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(7.386.955.999,68)	(6.658.452.170,00)

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar (Rp7.386.955.999,68) atau naik sebesar 12,19% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (Rp6.658.452.170,00). Rincian mutasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017 Rp (6.658.452.170,00)

Mutasi Tambah:

Beban Amortisasi TA 2018 Rp (979.803.640,08)

Jumlah Rp (979.803.640,08)

Mutasi Kurang:

Dampak Kumulatif atas Koreksi Rp (251.299.810,40)

Penghitungan beban amortisasi dan koreksi untuk konsistensi penyajian beban amortisasi ATB berupa kajian

Jumlah Rp (251.299.810,40)

Jumlah mutasi bersih Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp (728.503.829,68)

Saldo Akhir per 31 Desember 2018 Rp (7.386.955.999,68)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
5. Aset Lain-lain	31.726.135.444,89	1.608.715.485,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp31.726.135.444,89 atau naik 1.774,77% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.608.715.485,00. Aset Lain-lain terdiri dari kumpulan usulan penghapusan atas Aset Tetap SKPD sebelum diterbitkan SK Penghapusan atas pengadaan sampai dengan tahun 2018 dan Aset Tetap yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat dengan rincian mutasi tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017 Rp1.608.715.485,00

Mutasi Tambah:

1. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Lain-lain berupa usulan penghapusan tanah pada Dinas Perhubungan yang dimutasikan ke Dirjen Perhubungan Darat Rp 10.342.500.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kementrian Perhubungan		
2. Reklasifikasi akun dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain sebesar Rp1.414.968.168,65 pada:		
a. Dinas Pendidikan	Rp	289.101.060,50
b. Dinas Perhubungan	Rp	157.887.350,00
c. Dinas Kesehatan	Rp	147.647.295,00
d. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	Rp	307.959.532,15
e. Dinas Sosial (usulan penghapusan motor)	Rp	8.000.000,00
f. Dinas Lingkungan Hidup (usulan penghapusan truk tanki)	Rp	74.000.000,00
g. Dinas Pariwisata (usulan penghapusan motor)	Rp	53.000.000,00
h. BPKAD (usulan penghapusan mobil katana)	Rp	25.000.000,00
i. Bagian Umum (usulan penghapusan Kendaraan Dinas)	Rp	221.763.901,00
j. Sekretariat DPRD	Rp	126.359.030,00
k. Kecamatan Sananwetan	Rp	4.250.000,00
3. Reklasifikasi akun Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain pada Dinas perhubungan berupa usulan penghapusan gedung yang dimutasikan ke Propinsi Jawa Timur pada Dinas Perhubungan	Rp	15.904.938.512,74
4. Reklasifikasi akun dari Aset Tetap Peralatan Mesin ke Aset Lain-lain dikarenakan kondisi rusak berat pada:		
a. RSUD Mardi Waluyo	Rp	174.465.625,00
b. Dinas Kesehatan	Rp	328.652.000,00
c. Dinas Pendidikan	Rp	258.397.626,00
d. Sekretariat Daerah	Rp	497.463.827,50
5. Reklasifikasi akun dari Aset Tidak Berwujud ke Aset Lain-lain dikarenakan sudah tidak dimanfaatkan pada:		
a. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	312.250.000,00
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	413.115.200,00
c. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Rp	10.000.000,00
d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	609.732.500,00
e. RSUD Mardi Waluyo	Rp	571.110.000,00
Jumlah	Rp	30.837.593.459,89



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp720.173.500,00 antara lain:		
a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berdasarkan SK Nomor 188/253/HK/410.010.2/2018 berupa Study Kelayakan Kantor BKD dan Balai Diklat	Rp	89.880.000,00
b. Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SK Nomor 188/142/HK/410.010.2/2018 berupa gerobak sampah	Rp	7.900.000,00
c. Dinas Pekerjaan Umum antara lain:		
1) Berdasarkan SK Nomor 188/253/HK/410.010.2/2018 berupa Perencanaan pengawasan pengurangan balai diklat	Rp	421.055.000,00
2) Berdasarkan SK Nomor 188/433/HK/410.010.2/2018 berupa Perencanaan masterplan dan perencanaan pembangunan Gedung BKD	Rp	201.338.500,00
Jumlah	Rp	720.173.500,00
Jumlah mutasi bersih Penyusutan Aset Lain-lain		Rp30.117.419.959,89
Saldo Akhir per 31 Desember 2018		Rp31.726.135.444,89

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1.731.982.316,61)	(633.141.085,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar (Rp1.731.982.316,61) atau naik sebesar 173,55% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (Rp633.141.085,00). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017 **Rp (633.141.085,00)**

Mutasi Tambah:

1. Beban Penyusutan TA 2018	Rp	(130.311.097,64)
2. Dampak Kumulatif Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap Peralatan Mesin yang Rusak Berat	Rp	(1.054.321.133,97)
Jumlah	Rp	(1.184.632.231,61)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Mutasi Kurang:

Penghapusan Aset Lain-lain
sebesar Rp85.791.000,00 pada:

1. Dinas Pekerjaan Umum	Rp	(84.211.000,00)
2. Dinas Lingkungan Hidup	Rp	(1.580.000,00)
Jumlah	Rp	(85.791.000,00)

Jumlah mutasi bersih Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	(1.098.841.231,61)
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp	(1.731.982.316,61)

7.5.3.2. Kewajiban

Esensi dari Kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa datang. Kewajiban dirinci menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.933.527.356,70 atau turun 12,20% dibandingkan dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp20.136.593.262,49.

7.5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang akan diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.933.527.356,70 atau turun 12,20% dibandingkan dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp20.136.593.262,49. Saldo Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6.246.741,91	28.294.880,31

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.246.741,91 atau turun sebesar 77,92% dibandingkan saldo PFK per 31 Desember 2017 sebesar Rp28.294.880,31. Saldo Utang PFK terdiri dari Utang Pemotongan Pajak Pusat yang merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara Dana BOS pada Tahun 2018 namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Negara (pajak lewat tahun). Berikut rincian dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2018:

Tabel 72 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	PPN	PPh 21	PPh 23	Total
1	SDN Sentul 2	2.664.089,91	555.000,00	516.240,00	3.735.329,91
2	SDN Kepanjenkidul 1	339.773,00	0,00	347.614,00	687.387,00
3	SDN Karangtengah 2	0,00	996.525,00	0,00	996.525,00
4	SMPN 2 Blitar	115.400,00	201.000,00	511.100,00	827.500,00
Total		3.119.262,91	1.752.525,00	1.374.954,00	6.246.741,91



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.078.384.229,79	6.403.646.217,91

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.078.384.229,79 naik 9,53% dibandingkan dengan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.403.646.217,91. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban kepada rekanan yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 pada RSUD Mardi Waluyo dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

SKPD	Nominal
Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo :	
- Utang beban bahan habis pakai pihak ketiga	423.090.650,00
- Utang beban Obat-obatan	3.662.199.858,71
- Utang beban bahan kimia	580.934.531,00
- Utang beban alat kesehatan bahan habis pakai	1.824.489.390,08
- Utang Belanja Modal Pembangunan Gedung Bedah Sentral RSUD Mardi Waluyo	587.669.800,00
Total Utang Kepada Pihak Ketiga	7.078.384.229,79

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
3. Utang Jangka Pendek Lainnya	15.693.464.367,00	13.621.828.697,60

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp15.693.464.367,00 naik 13,20% dibandingkan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.621.828.697,60. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Jangka Pendek pada BLUD RSUD Mardi Waluyo yang merupakan biaya yang masih harus dibayar dan Beban Belanja SKPD yang terdiri dari:

Tabel 74 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Seluruh SKPD	BLUD	Total
1	Beban listrik 2018	911.798.838,00	108.136.320,00	1.019.935.158,00
2	Beban air 2018	2.780.400,00	27.000,00	2.807.400,00
3	Beban telepon 2018	23.089.892,00	13.160.299,00	36.250.191,00
4	Beban internet 2018	118.247.520,00	0,00	118.247.520,00
5	Beban insentif pemungutan pajak daerah tribulan IV 2018	410.316.213,00	0,00	410.316.213,00
6	Beban insentif pemungutan retribusi daerah tribulan IV 2018	104.542.411,00	0,00	104.542.411,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Seluruh SKPD	BLUD	Total
7	Beban jasa kerja	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00
8	Beban jasa pelayanan kesehatan	132.857.574,00	13.760.408.247,00	13.893.265.821,00
9	Beban pelayanan yang ditanggung RSUD	0,00	50.710.033,00	50.710.053,00
10	Beban surat kabar	90.000,00	0,00	90.000,00
11	Beban bantuan sosial santunan kematian	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00
12	Beban bahan bakar minyak	0,00	2.899.600,00	2.899.600,00
Jumlah		1.758.122.848,00	13.935.341.519,00	15.693.464.367,00

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
4. Pendapatan Diterima di Muka	155.432.018,00	82.823.466,67

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 sebesar Rp155.432.018,00 atau naik sebesar 46,71% dibandingkan saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 sebesar Rp82.823.466,67. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang diterima pada Tahun 2018 namun manfaat yang diberikan kepada pengguna baru dilaksanakan pada Tahun 2019 yang terdiri dari:

**Tabel 75 Rincian Pendapatan Diterima di Muka
per 31 Desember 2018 dan 2017**

(dalam Rupiah)

No	OPD	2018	2017	Keterangan
1	RSUD Mardi Waluyo	15.000.000,00	10.666.666,67	Pendapatan sewa tanah Kantor & ATM Bank Jatim, ATM Mandiri, ATM BRI
2	BPKAD	32.942.250,00	29.947.500,00	Fasilitas Umum - Sewa Tanah Kawasan Kebonrojo
3	BPKAD	20.843.443,33	4.392.300,00	Fasilitas Umum - ATM BRI
		10.869.478,00	0,00	Fasilitas Umum - ATM BPD Jatim dan PIPP
		36.590.400,00	0,00	Fasilitas Umum - Menara Telekomunikasi pada Kelurahan Sananwetan
		20.377.280,00	0,00	Fasilitas Umum - Menara Telekomunikasi pada Kelurahan Bendogerit
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	16.041.666,67	27.047.000,00	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
5	Dinas Perhubungan	112.500,00	180.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Ijin Terop)
6	Dinas Lingkungan Hidup	2.625.000,00	10.500.000,00	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah (Sewa Tanah SUTT)
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	30.000,00	90.000,00	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (GOR Soekarno Hatta)
Total		155.432.018,00	82.823.466,67	



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika kewajiban tersebut jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan. Pemerintah Kota Blitar tidak mempunyai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2018.

7.5.3.2.3. Ekuitas

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas	2.418.486.225.592,99	2.242.790.461.147,35

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Blitar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Blitar. Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.418.486.225.592,99 meningkat sebesar 7,83% jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2017 sebesar Rp2.242.790.461.147,35.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

7.5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Blitar dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO. Realisasi Pendapatan Tahun 2018 LO sebesar Rp905.391.452.225,95. Adapun rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut.

Tabel 76 Rincian Pendapatan—LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	172.192.817.449,92	202.728.255.540,24	(15,06)
2	Pendapatan Transfer – LO	706.296.318.478,00	654.499.491.548,00	7,91
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	26.902.316.298,03	24.020.440.639,80	12,00
Jumlah		905.391.452.225,95	881.248.187.728,04	2,74

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 sebesar Rp172.192.817.449,92 mengalami penurunan sebesar 15,06% dibandingkan tahun 2017 Rp202.728.255.540,24. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 77 Rincian Pendapatan Asli Daerah—LO
Tahun Anggaran 2018 dan 2017**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	41.315.817.564,96	39.997.707.312,70	3,30
2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.685.731.875,33	8.634.844.837,00	12,17
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.382.992.321,19	610.785.705,80	126,43
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	119.808.275.688,44	153.484.917.684,74	(21,94)
Jumlah		172.192.817.449,92	202.728.255.540,24	(15,06)

1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		41.315.817.564,96	39.997.707.312,70

Pajak Daerah-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh BPKAD Kota Blitar yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2018, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2018 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2018. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA. Pendapatan Pajak Daerah - LO pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp41.315.817.564,96 mengalami kenaikan sebesar 0,03% dibandingkan Tahun 2017 Rp39.997.707.312,70. Berikut adalah perhitungan Pajak Daerah pada Laporan Operasional Tahun 2018.

Pajak Daerah – Laporan Realisasi Anggaran **Rp 40.501.229.760,26**

Mutasi Tambah:

1	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018	Rp	7.887.300.285,50
2	Pendapatan diterima di muka Pajak Daerah per 31 Desember 2017	Rp	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan Pajak Daerah per 31 Desember 2018	Rp	0,00
Jumlah		Rp	7.887.300.285,50

Mutasi Kurang:

1	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2017	Rp	7.064.009.620,00
2	Pendapatan diterima di muka Pajak Daerah per 31 Desember 2018	Rp	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan Pajak Daerah per 31 Desember 2017	Rp	0,80
4	Dampak Kumulatif atas kurang catat Piutang Pajak Daerah	Rp	8.702.860,00
Jumlah		Rp	7.072.712.480,80

Jumlah mutasi bersih Rp 814.587.804,70

Pajak Daerah- Laporan Operasional **Rp 41.315.817.564,96**

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 78 Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Hotel-LO	1.012.799.951,00	953.718.995,00	5,83
2	Pajak Restoran-LO	1.563.544.910,00	2.976.035.339,00	(90,34)
3	Pajak Warung-LO	20.250.000,00	0,00	100,00
4	Pajak Katering- LO	2.094.720.863,46	0,00	100,00
5	Pajak Hiburan-LO	1.186.459.754,00	342.184.450,00	71,16
6	Pajak Reklame-LO	642.904.915,50	526.152.478,70	18,16
7	Pajak Penerangan Jalan-LO	9.949.854.824,00	9.236.423.680,00	7,17
8	Pajak Parkir-LO	306.070.500,00	202.225.950,00	33,93
9	Pajak Air Tanah-LO	63.555.120,00	63.467.583,00	0,14
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	12.251.626.153,00	12.130.625.853,00	0,99
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	12.224.030.574,00	13.566.872.984,00	(10,99)
Jumlah		41.315.817.564,96	39.997.707.312,70	3,19

2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		9.685.731.875,33	8.634.844.837,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Pemerintah Kota Blitar dipungut dan dikelola oleh 20 SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Blitar didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Operasional Retribusi Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp9.685.731.875,33 mengalami kenaikan sebesar 10,85% dibandingkan tahun 2017 Rp8.634.844.837,00. Berikut adalah perhitungan atas Retribusi Daerah pada Laporan Operasional Tahun 2018.

Retribusi Daerah - Laporan Realisasi Anggaran		Rp 9.940.599.576,00
Mutasi tambah :		
1	Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2018	Rp 6.864.141.715,00
2	Pendapatan diterima di muka Retribusi Daerah per 31 Desember 2017	Rp 42.209.300,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Daerah per 31 Desember 2018	Rp 19.913.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp 6.926.264.015,00
Mutasi Kurang :		
1	Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2017	Rp 7.134.523.049,00
2	Pendapatan diterima di muka Retribusi Daerah per 31 Desember 2018	Rp 18.809.166,67
3	Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Daerah per 31 Desember 2017	Rp 11.462.000,00
4	Dampak Kumulatif atas kurang catat Piutang Retribusi Daerah	Rp 16.337.500,00
Jumlah Mutasi Kurang		Rp 7.181.131.715,67
Jumlah Mutasi Bersih		(Rp 254.867.700,67)
Retribusi Daerah- Laporan Operasional		Rp 9.685.731.875,33

Rincian penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 79 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	5.078.499.847,00	3.846.654.906,00	24,26
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.431.093.447,00	1.094.555.006,00	23,52
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	141.897.000,00	82.183.000,00	42,08
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.728.902.000,00	1.018.648.000,00	41,08
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.097.264.000,00	1.004.694.000,00	8,44
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	486.334.200,00	524.569.900,00	(7,86)
	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	16.420.000,00	5.505.000,00	66,47
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	11.555.000,00	10.500.000,00	9,13
	Sewa Alat-alat Berat/Walls	25.150.000,00	33.700.000,00	(34,00)
	Pelayanan Pemeriksaan Lab kesehatan Lingkungan	108.640.000,00	72.300.000,00	33,45
	Retribusi Tera Ulang	31.244.200,00	0,00	100,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	4.054.419.428,33	4.402.727.861,00	(8,59)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.546.409.595,00	2.487.344.294,33	(60,85)
	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	172.205.333,33	286.521.066,67	(66,38)
	Retribusi Terminal	140.860.500,00	120.582.000,00	14,40
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	706.718.000,00	436.970.000,00	38,17
	Retribusi Rumah Potong Hewan	181.967.000,00	92.919.000,00	48,94



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan (%)
	Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga	192.330.000,00	164.932.500,00	14,25
	Retribusi Jasa Informasi dan Penyiaran	0,00	57.459.000,00	0,00
	Retribusi Memasuki Kawasan Wisata	1.113.929.000,00	756.000.000,00	32,13
3	Retribusi Perijinan Tertentu-LO	552.812.600,00	385.462.070,00	30,27
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	551.259.600,00	375.765.450,00	31,84
	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	0,00	8.412.620,00	0,00
	Retribusi Ijin Trayek	1.553.000,00	1.284.000,00	17,32
	Jumlah (1+2+3)	9.685.731.875,33	8.634.844.837,33	10,85

Pendapatan Hasil Pengelolaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
3. Kekayaan Daerah yang	(Rp)	(Rp)
Dipisahkan – LO	1.382.992.321,19	610.785.705,8

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Blitar pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yaitu Penyertaan Modal pada PT Bank Jawa Timur dan PD BPR Artha Praja. Realisasi pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.382.992.321,19 mengalami kenaikan sebesar 126% dibandingkan Pendapatan LO 2017 sebesar Rp610.785.705,80. Perhitungan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Operasional Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Laporan Realisasi Anggaran	Rp	1.104.657.721,40
Mutasi tambah :		
1 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2018	Rp	394.288.318,00
2 Kenaikan laba atas investasi pada BPR Artha Praja	Rp	239.573.598,79
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	633.861.916,79
Mutasi Kurang :		
1 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2017	Rp	355.527.317,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	355.527.317,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	278.334.599,79
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Laporan Operasional	Rp	1.382.992.321,19

Rincian penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 80 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD-LO			
A	Bagian Laba atas penyertaan modal pada PT Bank Jawa timur	749.130.404,40	0,00	100,00
B	Bagian Laba atas penyertaan modal pada PD BPR Artha Praja	633.861.916,79	610.785.705,80	3,78
	Jumlah	1.382.992.321,19	610.785.705,80	126,43

Pemerintah Kota Blitar dalam menghitung pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan menggunakan metode ekuitas (kepemilikan diatas 50%) yaitu



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pendapatan diakui sebesar laba BUMD yang diperoleh untuk PD BPR Artha Praja dan proporsional untuk PT Bank Jawa Timur sesuai hasil RUPS (metode perolehan).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	119.808.275.688,44	153.484.917.684,74

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode tahun anggaran 2018. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp119.808.275.688,44, mengalami penurunan sebesar 28,11% dibandingkan Pendapatan LO Tahun 2017 sebesar Rp153.484.917.684,74. Perhitungan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Operasional Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Laporan Realisasi Anggaran **Rp 111.479.518.695,27**

Mutasi tambah :

1	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2018	Rp 33.448.804.706,72
2	Pendapatan diterima di muka Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2017	Rp 40.614.166,67
3	Kas di Bendahara Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2018	Rp 108.850.779,94
4	Dampak Kumulatif atas lebih catat Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan	Rp 1.590.100,00
5	Penyesuaian Kontraktual - Selisih pembayaran klaim dengan tagihan BPJS pada RSUD Mardi Waluyo dan JKN pada 3 puskesmas	Rp 36.440.475,00
6	Reklasifikasi beban administrasi pembayaran klaim BPJS ke beban jasa transaksi keuangan pada Dinas Kesehatan	Rp 10.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp 33.636.310.228,33

Mutasi Kurang :

1	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2017	Rp 25.066.404.044,91
2	Pendapatan diterima di muka Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2018	Rp 136.622.851,33
3	Kas di Bendahara Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2017	Rp 81.354.085,15
4	Dampak Kumulatif atas kurang catat Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan	Rp 15.572.253,77
5	Pembayaran Kas di Bendahara Pengeluaran PPKD	Rp 7.600.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		Rp 25.307.553.235,16

Jumlah Mutasi Bersih

Rp 8.328.756.993,17

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan - Laporan Operasional

Rp 119.808.275.688,44

Rincian Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah LO adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 81 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO	139.121.450,00	121.998.950,00	14,03
A	Penjualan hasil penebangan pohon	13.860.000,00	16.700.000,00	(17,01)
B	Penjualan hasil pertanian	80.651.450,00	81.098.950,00	(0,55)
C	Penjualan hasil perikanan	44.610.000,00	24.200.000,00	84,34
2	Penerimaan Jasa Giro-LO	2.623.390.931,03	2.758.844.096,96	(4,91)
3	Pendapatan Bunga –LO	758.261.596,63	678.552.392,92	11,75
A	Bank Jatim	291.404.109,53	307.260.273,92	(5,16)
B	Bank BNI 46	167.400.315,86	167.960.321,00	(0,33)
C	Bank Mandiri	175.694.506,60	189.971.208,00	(7,52)
D	Bank BRI	110.852.074,64	0,00	0,00
E	PDAM	12.910.590,00	13.360.590,00	(3,37)
4	Lain - lain/Pembulatan Gaji-LO	5.049,00	5.345,00	(5,54)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	286.939.220,09	657.262.484,98	(56,34)
A	Bidang Pendidikan	101.660.662,40	149.700.000,00	(32,09)
B	Bidang Pekerjaan Umum	175.089.542,89	448.812.047,41	(60,99)
C	Bidang Lingkungan Hidup	17.877,80	58.750.437,57	(99,97)
D	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	10.171.137,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak-LO	6.381.206,00	86.482.354,00	(92,62)
A	Denda Pajak Bumi dan Bangunan	6.381.206,00	86.482.354,00	(92,62)
7	Pendapatan Denda Retribusi-LO	140.275.000,00	154.802.000,00	(9,38)
A	Denda Retribusi Jasa Umum	134.675.000,00	120.275.000,00	11,97
B	Denda Retribusi Jasa Usaha	5.600.000,00	34.527.000,00	(83,78)
8	Pendapatan Denda Lain-Lain PAD Yang Sah-LO	14.750.000,00	361.070,00	3.985,08
9	Pendapatan dari Pengembalian –LO	964.868.990,59	130.844.608,14	637,42
A	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja	964.868.990,59	130.844.608,14	637,42
10	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum-LO	1.254.082.618,67	354.561.870,50	253,70
A	Fasilitas Umum	1.085.717.891,67	210.009.500,00	416,99
B	Fasilitas Rusunawa	168.364.727,00	144.552.370,50	16,47
11	Pendapatan dari BLUD-LO	108.644.330.202,20	126.184.889.931,74	(13,90)
12	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	852.690,50	45.965.833,00	(98,14)
A	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir UMKM/Koperasi	852.690,50	45.965.833,00	(98,14)
B	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir KPUK/BNI 46	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan (%)
C	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir BPR Cab Jatim	0,00	0,00	0,00
13	Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	4.472.179.350,00	4.337.892.600,00	3,10
A	Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjen Kidul	1.247.015.100,00	1.179.369.900,00	5,74
B	Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo	1.369.026.000,00	1.416.658.800,00	(3,36)
C	Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan	1.856.138.250,00	1.741.863.900,00	6,56
14	Pendapatan Bunga Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
A	Bunga Dana Bergulir Bank BPR Jatim	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran	24.249.666,00	3.344.047,50	625,16
	Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah	21.976.565,00	1.184.400,00	1.755,50
	Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah	4.000,00	48.600,00	(91,77)
	Kelebihan Pembayaran Pokok Dalir UMKM/Koperasi	0,00	0,00	0,00
	Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD yang sah	2.269.101,00	2.111.047,50	7,49
16	Lain Lain PAD yang sah Lainnya – LO	1.565.917,73	240.000,00	552,47
17	BPJS Kesehatan Non Kapitasi	416.367.800,00	489.950.100,00	(15,02)
18	Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah	0,00	17.478.920.000,00	(100,00)
19	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame-LO	2.642.000,00	0,00	0,00
20	Pendapatan atas Jasa Informasi dan Penyiaran	58.012.000,00	0,00	0,00
Jumlah 1 s/d 20		119.808.275.688,44	153.484.917.684,74	(21,94)

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2018 sebesar Rp.706.296.318.478,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perhitungan atas Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Pendapatan Transfer - Laporan Realisasi Anggaran	Rp 714.475.849.626,00
Mutasi tambah :	
Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember 2018	Rp 5.024.336.392,00
Mutasi Kurang :	
Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember 2017	Rp 13.203.867.540,00
Pendapatan Transfer - Laporan Operasional	Rp 706.296.318.478,00

Rincian Pendapatan Transfer - LO adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 82 Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	626.534.717.922,00	562.579.364.596,00	11,37
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya –LO	13.000.000.000,00	7.500.000.000,00	73,33
3	Transfer Pemerintah Provinsi – LO	66.761.600.556,00	84.420.126.952,00	(20,92)
Jumlah		706.296.318.478,00	654.499.491.548,00	7,33

7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO

Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	626.534.717.922,00	562.579.364.596,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO Tahun 2018 sebesar Rp626.534.717.922. Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 83 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Pajak	33.311.778.801,00	33.778.174.632,00	(1,38)
	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	3.995.603.608,00	3.769.381.242,00	6,00
	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri	15.634.320.193,00	15.921.476.769,00	(1,80)
	Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	13.681.855.000,00	14.087.316.621,00	(2,88)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	67.464.332.495,00	16.587.434.797,00	306,72
	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	62.568.101.586,00	13.675.201.526,00	357,53
	Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi	3.099.167.031,00	2.244.229.259,00	38,09
	Bagi Hasil Pertambangan Umum Royalty	814.447.240,00	58.865.576,00	1.283,57
	Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	31.203.994,00	18.057.860,00	72,80
	Bagi Hasil Sumber Daya Hutan	250.178.053,00	143.143.376,00	74,77
	Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	701.234.591,00	447.937.200,00	56,55
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	421.212.306.000,00	421.212.306.000,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK)	104.546.300.626,00	91.001.449.167,00	14,88
	DAK Bidang Pendidikan	4.723.986.880,00	14.049.791.796,00	(66,38)
	DAK Bidang Kesehatan	10.836.389.900,00	11.282.637.000,00	(3,96)
	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	25.060.350.000,00	17.338.351.695,00	44,54
	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	2.211.111.700,00	4.010.848.000,00	(44,87)
	DAK Bidang Air Minum	600.113.000,00	3.512.911.600,00	(82,92)
	DAK Bidang Sanitasi (reguler)	1.574.339.200,00	1.991.800.000,00	(20,96)
	DAK Bidang Pertanian	648.750.000,00	1.553.935.000,00	(58,25)
	DAK Bidang Lingkungan Hidup	475.840.150,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman	2.365.755.000,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	2.832.276.100,00	0,00	0,00
	DAK Bidang Sanitasi (penugasan)	1.819.500.150,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	0,00	925.929.000,00	(100,00)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata	1.821.926.000,00	1.339.500.000,00	36,02
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.967.695.350,00	4.896.142.900,00	(18,96)
	Dana Alokasi Khusus Tunjangan Profesi Guru	42.132.720.844,00	27.735.730.776,00	51,91
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan	2.038.496.050,00	877.547.400,00	132,29



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional KB	631.945.082,00	296.260.000,00	113,31
	Dana Alokasi Khusus Tambahan Penghasilan Guru	90.900.000,00	509.850.000,00	(82,17)
	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan	714.205.220,00	680.214.000,00	5,00
Jumlah		626.534.717.922,00	562.579.364.596,00	11,37

7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya	(Rp)	(Rp)
	13.000.000.000,00	7.500.000.000,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO Tahun 2018 sebesar Rp13.000.000.000,00 merupakan insentif daerah. Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 84 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya –LO	13.000.000.000,00	7.500.000.000,00	73,33
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK)			
	Insentif Daerah	13.000.000.000,00	7.500.000.000,00	73,33
Jumlah		13.000.000.000,00	7.500.000.000,00	73,33

7.5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi – LO

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Transfer Pemerintah Provinsi—LO	(Rp)	(Rp)
	66.761.600.556,00	84.420.126.952,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur – LO Tahun 2018 sebesar Rp66.761.600.556,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Provinsi - Laporan Realisasi Anggaran **Rp** **74.941.131.704,00**

Mutasi tambah :

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2018 **Rp** **5.024.336.392,00**

Mutasi Kurang :

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2017 **Rp** **13.203.867.540,00**

Transfer Pemerintah Provinsi - Laporan Operasional **Rp** **66.761.600.556,00**

Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 85 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.804.276.510,00	20.206.589.164,00	(0,12)
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.989.647.628,00	10.734.372.560,00	(0,16)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan (%)
3	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.695.167.985,00	14.238.539.995,00	(0,11)
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	165.789.474,00	208.069.049,00	(0,20)
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	25.354.188.959,00	27.510.626.184,00	(0,08)
6	Bantuan Keuangan Provinsi	1.752.530.000,00	11.521.930.000,00	(0,85)
	Jumlah	66.761.600.556,00	84.420.126.952,00	(26,45)

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO

Pendapatan Lainnya yang Sah—LO	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	<u>26.902.316.298,03</u>	<u>24.020.440.639,80</u>

Jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2018 Rp26.902.316.298,03 dengan perhitungan sebagai berikut.

Pendapatan Lainnya yang Sah - LRA	Rp	0,00
Mutasi tambah :		
Pendapatan Hibah	Rp	26.902.316.298,03
Mutasi Kurang:	Rp	0,00
Pendapatan Lainnya yang Sah - LO	Rp	26.902.316.298,03

Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 86 Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah—LRA
(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah	26.902.316.298,03	24.020.440.639,80	12,00
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	26.902.316.298,03	24.020.440.639,80	12,00

Sedangkan unsur Pendapatan Lain-lain yang Sah dari Pendapatan Lainnya sebesar Rp26.902.316.298,03 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 87 Rincian Pendapatan Lain-lain Yang Sah - LO
(dalam Rupiah)

No	Pendapatan Lainnya	2018
1	Pendapatan Hibah bahan obat obatan pada Dinas Ketahanan Pangan	5.548.820,00
2	Pendapatan hibah - bahan CetakanBrg/Jasa Selain Hibah Bansos yg diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan PBD)	360.178.500,00
3	Pendapatan hibah - bahan Cetakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.644.000,00
4	Hibah BOS	16.907.320.645,03
5	Hibah Propinsi Bahan Obat Obatan pada Dinas Kesehatan	1.110.352.036,00
6	Hibah Propinsi Bahan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.534.208.365,00
7	Hibah Propinsi Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	101.973.932,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Pendapatan Lainnya	2018
	Penduduk dan Keluarga Berencana	
8	Hibah Pada SMPN 5	36.297.000,00
9	Hibah Pada SMPN 6	28.700.000,00
10	Hibah Pada SMPN 3	241.017.000,00
11	Hibah TPA pada Dinas Lingkungan Hidup	6.548.076.000,00
	Jumlah	26.902.316.298,03

7.5.4.2 BEBAN LO

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	<u>274.121.482.101,00</u>	<u>262.585.302.709,59</u>

Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2018 sebesar Rp274.121.482.101,00 atau naik 4,39% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp262.585.302.709,59. Rincian Beban Pegawai tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 88 Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	231.608.655.859,00	231.101.266.865,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	29.679.775.219,00	17.189.410.828,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH-LO	4.402.333.500,00	3.314.924.000,00
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO	272.927.695,00	256.130.667,50
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO	1.662.206.897,00	1.374.881.334,68
6	Uang Lembur-LO	257.387.000,00	4.785.767.066,41
7	Beban Pegawai BLUD Rumah Sakit	6.238.195.931,00	4.562.921.948,00
	Jumlah	274.121.482.101,00	262.585.302.709,59

7.5.4.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	<u>102.333.032.111,64</u>	<u>119.439.587.673,11</u>

Beban Persediaan disajikan dengan basis akrual, yaitu Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode Harga Pembelian Terakhir. Jumlah Beban Persediaan pada tahun 2018 sebesar Rp102.333.032.111,64 atau turun 14,32% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp119.439.587.673,11. Rincian Beban Persediaan tahun 2018 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 89 Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Bahan Pakai Habis	11.769.447.782,84	11.869.519.238,68
2	Beban Bahan/Material	12.989.389.174,07	28.496.230.198,91
3	Beban Publikasi	5.505.057.541,36	4.707.310.485,00
4	Beban Cetak dan Penggandaan	10.950.938.844,07	10.741.611.229,09
5	Beban Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Atribut Dinas	447.194.660,00	2.707.492.350,00
6	Beban Pakaian Kerja	1.668.366.405,00	1.565.953.500,00
7	Beban Pakaian Khusus Hari hari Tertentu	4.227.997.900,00	3.653.017.400,00
8	Beban Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	631.026.000,00
9	Beban Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	340.000,00
10	Beban Barang/Jasa Yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.298.121.157,00	1.066.389.908,80
11	Beban Materi Pendidikan dan Perlengkapan Siswa	7.991.161.500,00	10.340.988.255,36
12	Beban Persediaan BLUD	44.485.357.147,30	43.659.709.107,27
Jumlah		102.333.032.111,64	119.439.587.673,11

7.5.4.2.3 Beban Jasa

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Jasa	(Rp)	(Rp)
	<u>171.658.774.458,41</u>	<u>159.783.495.756,64</u>

Jumlah Beban Jasa pada tahun 2018 sebesar Rp171.658.774.458,41 atau naik 7,43% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp159.783.495.756,64. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 90 Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Honorarium PNS	2.720.121.676,00	2.784.460.300,00
2	Honorarium Non PNS	4.747.839.311,00	3.377.582.461,84
3	Beban Jasa Kantor	65.007.483.685,66	62.927.150.774,90
4	Beban Premi Asuransi	7.156.600.822,00	6.548.251.967,33
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	3.483.477.039,00	3.398.192.743,00
6	Beban Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	706.868.500,00	683.193.943,00
7	Beban Sewa Sarana Mobilitas	538.936.400,00	438.054.856,00
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.510.372.211,67	4.795.621.838,00
9	Beban Makanan dan Minuman	24.020.965.685,00	21.234.652.727,12
10	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	6.993.150.743,96	3.247.498.100,00
11	Beban Jasa Konsultansi	4.754.954.168,00	4.087.805.350,00
12	Beban Klaim dan Kewajiban Lainnya Kepada	0,00	24.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
	Pihak Ketiga		
13	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	786.625.000,00	715.750.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.558.290.609,52	5.416.035.829,50
15	Beban Jasa BLUD	39.673.088.606,60	40.129.220.865,95
Jumlah		171.658.774.458,41	159.783.495.756,64

7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Pemeliharaan	(Rp)	(Rp)
	23.003.122.165,76	16.896.138.298,27

Jumlah Beban Pemeliharaan pada tahun 2018 sebesar Rp23.003.122.165,76 atau naik 36,14% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp16.896.138.298,27. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 91 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Pemeliharaan Jalan	741.957.500,00	698.477.550,00
2	Beban Pemeliharaan Jembatan	160.000.000,00	299.502.600,00
3	Beban pemeliharaan Gedung	6.846.332.798,00	4.397.863.304,79
4	Beban pemeliharaan Bangunan bukan Gedung	2.432.269.350,00	1.384.425.903,81
5	Beban pemeliharaan Mebeulair	354.353.350,00	277.015.650,00
6	Beban pemeliharaan Komputer dan Perlengkapannya	933.539.970,00	1.027.378.525,00
7	Beban Pemeliharaan <i>Software</i>	577.620.056,00	427.856.985,00
8	Beban Pemeliharaan Air Conditioner /AC	390.656.950,00	354.847.000,00
9	Beban pemeliharaan peralatan/mesin kantor	98.705.500,00	77.933.100,00
10	Beban pemeliharaan perlengkapan kantor	379.241.650,00	309.531.156,00
11	Beban pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	54.075.900,00	42.684.000,00
12	Beban pemeliharaan Alat - alat studio	94.788.750,00	89.707.900,00
13	Beban pemeliharaan Alat - Alat kedokteran/kesehatan	57.897.500,00	34.750.000,00
14	Beban pemeliharaan Alat - alat Berat	160.236.000,00	248.848.000,00
15	Beban pemeliharaan Alat - alat bengkel/mesin	86.166.000,00	117.211.500,00
16	Beban pemeliharaan alat - alat Kesenian/Kebudayaan dan Olahraga	39.237.100,00	61.038.400,00
17	Beban pemeliharaan alat - alat Pertanian dan Perkebunan	439.000,00	4.620.500,00
18	Beban pemeliharaan alat laboratorium	22.000.000,00	31.735.300,00
19	Beban pemeliharaan alat - alat ukur	500.000,00	500.000,00
20	Beban pemeliharaan buku/kepuustakaan	4.541.300,00	9.296.290,00
21	Beban pemeliharaan Jaringan Air (kanal,irigasi,reservoir,air bersih/minum,saluran drainase/gorong-gorong)	1.768.777.700,00	948.073.944,00
22	Beban pemeliharaan Jaringan Listrik penerangan jalan umum, taman dan hutan kota	388.157.900,00	64.402.000,00
23	Beban Pemeliharaan Rambu - rambu Lalu lintas	347.750.342,00	413.196.016,00
24	Beban pemeliharaan instalasi telepon, internet dan listrik gedung	240.080.950,00	157.395.436,67
25	Beban pemeliharaan peralatan dapur/rumah tangga	21.817.000,00	6.972.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
26	Beban pemeliharaan penghias ruangan rumah tangga	33.149.350,00	16.197.800,00
27	Beban pemeliharaan tugu/tanda batas	460.000,00	0,00
28	Beban pemeliharaan trotoar	299.093.000,00	298.805.000,00
29	Beban Pemeliharaan alat - alat angkutan darat tidak bermotor	12.148.000,00	45.248.100,00
30	Beban Pemeliharaan Alat-alat Persampahan	120.040.100,00	31.946.000,00
31	Beban pemeliharaan alat-alat peternakan dan perikanan	13.300.000,00	0,00
32	Belanja pemeliharaan alat - alat Persenjataan/Keamanan	127.976.200,00	51.500.000,00
33	Beban pemeliharaan jaringan komputer peralatan sistem teknologi informasi	105.082.000,00	111.065.800,00
34	Beban pemeliharaan alat-alat bantu (feeder,compressor,electric generating set,pompa,mesin bor,unit pemeliharaan lapangan,alat pengolahan air kotor)	355.484.500,00	6.118.000,00
35	Beban pemeliharaan peralatan pemancar	37.800.000,00	92.187.500,00
36	Beban pemeliharaan bangunan bersejarah	93.830.000,00	0,00
37	Beban pemeliharaan BLUD	5.603.616.449,76	4.757.807.037,00
Jumlah		23.003.122.165,76	16.896.138.298,27

7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas	33.226.179.375,99	30.634.402.109,50

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2018 sebesar Rp33.226.179.375,99 atau naik 8,46% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp30.634.402.109,50. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 92 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2018
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	22.749.000,00	18.146.000,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	28.071.666.209,99	26.460.130.198,50
3	Beban perjalanan dinas luar daerah untuk masyarakat	3.514.728.940,00	3.557.658.040,00
4	Beban perjalanan dinas BLUD	1.617.035.226,00	598.467.871,00
Jumlah		33.226.179.375,99	30.634.402.109,50

7.5.4.2.6 Beban Bunga

Tidak terdapat realisasi Beban Bunga pada TA 2018.

7.5.4.2.7 Beban Subsidi

Tidak terdapat realisasi Beban Subsidi pada TA 2018.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.4.2.8 Beban Hibah

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Hibah	(Rp)	(Rp)
	27.858.543.758,00	18.268.505.500,00

Jumlah Beban Hibah pada tahun 2018 sebesar Rp27.858.543.758,00 atau naik 52,49% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp18.268.505.500,00. Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 93 Rincian Beban Hibah Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	800.000.000,00	675.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi	7.461.618.000,00	8.348.145.500,00
3	Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	9.945.926.000,00	7.158.840.000,00
4	Beban Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.650.999.758,00	2.086.520.000,00
Jumlah		27.858.543.758,00	18.268.505.500,00

7.5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Bantuan Sosial	(Rp)	(Rp)
	22.706.968.905,00	2.264.534.920,00,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial pada tahun 2018 sebesar Rp22.706.968.905,00 atau naik 902,72% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2.264.534.920,00. Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 94 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	4.002.875.000,00	1.553.600.000,00
2	Beban Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya	0,00	242.179.920,00
3	Beban Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	18.704.093.905,00	468.755.000,00
Jumlah		22.706.968.905,00	2.264.534.920,00

7.5.4.2.10 Beban Penyusutan

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Penyusutan	(Rp)	(Rp)
	102.299.676.745,36	91.085.793.807,61

Jumlah Beban Penyusutan pada tahun 2018 sebesar Rp102.299.676.745,36 atau naik 12,31% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp91.085.793.807,61. Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 95 Rincian Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.118.378.527,61	34.332.504.806,84
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.230.151.986,60	306.742.786,40
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.951.285.013,01	56.409.304.364,37
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	825.639.251,40	5.207.400,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	174.221.966,74	32.034.450,00
Jumlah		102.299.676.745,36	91.085.793.807,61

7.5.4.2.11 Beban Amortisasi

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Amortisasi	(Rp)	(Rp)
	979.803.640,08	974.604.460,00

Jumlah Beban Amortisasi pada tahun 2018 sebesar Rp979.803.640,08 atau turun 0,53% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp974.604.460,00. Beban Amortisasi tersebut merupakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud.

7.5.4.2.12 Beban Transfer

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Transfer	(Rp)	(Rp)
	512.228.180,00	499.984.500,00

Jumlah Beban Transfer pada tahun 2018 sebesar Rp512.228.180,00 atau naik 2,45% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp499.984.500,00. Beban Transfer tersebut merupakan bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 96 Rincian Beban Transfer Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	224.404.000,00	224.404.000,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	76.200.000,00	76.200.000,00
3	Partai Kebangkitan Bangsa	47.817.000,00	47.817.000,00
4	Partai Persatuan Pembangunan	40.373.500,00	40.373.500,00
5	Partai Demokrat	32.800.000,00	32.800.000,00
6	Partai Nasional Demokrat	21.829.000,00	21.829.000,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat	19.206.000,00	19.206.000,00
8	Partai Golongan Karya	19.065.000,00	19.065.000,00
9	Partai Keadilan Sejahtera	18.290.000,00	18.290.000,00
10.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Malang	12.243.680,00	0,00
Jumlah		512.228.180,00	499.984.500,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.4.2.13 Beban Lain-lain

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Lain-lain	(Rp)	(Rp)
	3.621.984.379,69	3.752.949.137,45

Jumlah Beban Lain-lain pada tahun 2018 sebesar Rp3.621.984.379,69 atau turun 3,49% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp3.752.949.137,45. Rincian Beban Lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel 97 Rincian Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Modal Non Kapitalisasi	2.810.123.504,00	1.510.878.919,24
2	Beban Lain-lain BLUD	82.765.657,80	278.271.309,05
3	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	647.008.217,90	1.608.388.389,08
4	Beban Penyisihan (Investasi) Dana Bergulir Tak Tertagih	82.086.999,99	355.395.520,08
5	Beban Kliring BPJS	0,00	15.000,00
Jumlah		3.621.984.379,69	3.752.949.137,45

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional	(Rp)	(Rp)
	143.069.656.405,02	175.062.888.855,87

Surplus dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan Operasional -LO dan Beban Operasional – LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus dari Kegiatan Operasional TA 2018 adalah sebesar Rp143.069.656.405,02.

7.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp)	(Rp)
	(2.141.401.131,93)	(1.041.401.969,68)

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2018 sebesar (Rp2.141.401.131,93) terdiri dari:

1. (Rp908.143.371,35) atas penurunan nilai ekuitas PDAM.
2. (Rp81.848.000,00) atas penghapusan peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan tahun 2018.
3. (Rp634.382.500,00) atas penghapusan aset lain-lain tahun 2018.
4. (Rp267.131,66) atas penyesuaian nilai Investasi Dana Bergulir tahun 2018 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
5. Rp400.400 atas pengurangan beban penyisihan piutang TA 2018 karena adanya pelunasan piutang TA 2018.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6. Rp11.068.528,83 atas pengurangan beban penyisihan Investasi Dana Bergulir TA 2018 karena adanya pelunasan pinjaman Dana Bergulir TA 2018.
7. (Rp361.111.303,64) atas pengembalian belanja jasa publikasi yang berdampak pemeriksaan BPK-RI .
8. (Rp16.263.091,08) atas pengurangan Jalan,Irigasi dan Jaringan yang berdampak pemeriksaan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan.
9. (Rp39.912.013,30) atas pengurangan Gedung dan Bangunan yang berdampak pemeriksaan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan.
- 10.(Rp96.550.249,73) atas pengurangan Jalan Irigasi, dan Jaringan yang berdampak temuan pemeriksaan BPK-RI atas jasa konsultasi.
- 11.(Rp11.472.000,00) atas pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berdampak temuan pemeriksaan BPK-RI atas jasa konsultasi.
- 12.(Rp2.920.400,00) atas pengurangan Aset Tak Berwujud yang berdampak temuan pemeriksaan BPK-RI atas jasa konsultasi.

7.5.4.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	144.678.144,00	137.712.714.530,78

Jumlah Pos Luar Biasa pada tahun 2018 adalah sebesar Rp144.678.144,00. Pos luar biasa tersebut berupa Belanja Tak Terduga Kejadian Luar Biasa Difteri (KLB) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2018.

7.5.4.6 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit LO	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	140.783.577.129,09	36.308.772.355,41

Surplus merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus dari Kegiatan Non-Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus pada Laporan Operasional per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp140.783.577.129,09.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan salah satu jenis laporan pertanggungjawaban yang merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan Pemerintah Daerah meliputi transaksi anggaran dan non anggaran yang memuat perbandingan selisih antara penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi.

Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan kas, yaitu semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dan pengeluaran kas, yaitu semua aliran kas yang keluar dari BUD, termasuk dana operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari tiga Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan, Sukorejo, dan Kepanjenkidul serta Dana BOS di Dinas Pendidikan.

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasi Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah menghasilkan kas tanpa ada bantuan sumberdaya lain.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	894.409.176.023,96	850.942.358.240,98
Arus Keluar Kas	651.008.352.910,17	609.307.612.793,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasi	243.400.823.113,79	241.634.745.447,08

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 sebesar Rp243.400.823.113,79 atau naik 0,73% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2017 sebesar Rp241.634.745.447,08.

1. Arus Masuk Kas

Adalah kas masuk yang berasal dari Pendapatan APBD TA 2018 sebesar Rp894.409.176.023,96 terdiri dari arus masuk kas ke BUD dan termasuk Pendapatan yang dikelola BOSNAS, BLUD dan JKN FKTP. Pendapatan yang dikelola BLUD sebesar Rp100.820.369.771,53, FKTP JKN sebesar Rp4.472.179.350,00, dan dana BOS sebesar Rp16.907.320.645,03 sedangkan kas masuk ke BUD yaitu sebesar Rp772.209.306.257,40 yang terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Adalah kas masuk ke BUD yang berasal dari pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp40.501.229.760,26.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Adalah kas masuk BUD dari penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp9.940.599.576,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Adalah kas masuk ke BUD dari penerimaan dividen kas atas Penyertaan Modal sebesar Rp1.104.657.721,40.
- d. Lain-lain PAD yang Sah
Adalah kas masuk ke BUD, dana BLUD dari RSUD Mardi Waluyo dan dana JKN dari 3 FKTP yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp111.479.518.695,27. Lain-lain PAD yang Sah yang dikelola BLUD sebesar Rp100.820.369.771,53, dana FKTP JKN sebesar Rp4.472.179.350,00, dana BOS sebesar Rp265.271,57 sedangkan kas masuk ke BUD yaitu sebesar Rp6.186.704.302,17.
- e. Dana Bagi Hasil Pajak
Adalah kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp33.311.778.801,00.
- f. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Adalah kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp67.464.332.495,00.
- g. Dana Alokasi Umum
Adalah kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum sebesar Rp421.212.306.000,00.
- h. Dana Alokasi Khusus
Adalah kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Khusus sebesar Rp104.546.300.626,00.
- i. Dana Penyesuaian
Adalah kas masuk ke BUD yang berasal dari Dana Penyesuaian sebesar Rp13.000.000.000,00.
- j. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Adalah kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi hasil pajak sebesar Rp73.188.601.704,00.
- k. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Adalah kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp1.752.530.000,00.
- l. Pendapatan Hibah
Adalah kas masuk yang berasal dari Pendapatan Hibah Dana BOS 57 sekolah sebesar Rp16.907.320.645,03.

2. Arus Keluar Kas

Adalah kas keluar yang berasal dari belanja pegawai, barang dan jasa APBD TA 2018 sebesar Rp651.008.352.910,17 termasuk Belanja yang dikelola BLUD, BOS dan JKN FKTP. Belanja yang dikelola BLUD sebesar Rp95.596.299.318,78, FKTP JKN sebesar Rp4.280.316.311,00, dana BOS



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sebesar Rp13.171.711.528,10. Sedangkan kas keluar dari BUD yaitu sebesar Rp537.960.025.752,29, yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Adalah kas keluar dari yang digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp274.035.428.694,50. Belanja pegawai yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp267.529.845.763,50, dari dana BLUD RSUD Mardi Waluyo sebesar Rp6.238.195.931,00 dan dari dana BOS sebesar Rp267.387.000.

b. Belanja Barang dan Jasa

Adalah kas keluar dari BUD, dana BLUD RSUD Mardi Waluyo, dana JKN dari 3 FKTP dan dana BOS yang digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp329.255.542.203,67. Belanja barang dan jasa yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp222.702.797.976,79, dari dana BLUD RSUD sebesar Rp89.358.103.387,78 dari dana JKN dari 3 FKTP sebesar Rp4.280.316.311,00 dan dari dana BOS sebesar Rp12.914.324.528,10.

c. Belanja Hibah

Adalah kas keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Hibah sebesar Rp24.368.685.958,00.

d. Belanja Bantuan Sosial

Adalah kas yang keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22.691.789.730,00.

e. Belanja Bantuan Keuangan

Adalah kas yang keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp499.984.500,00.

f. Belanja Tidak Terduga

Adalah kas yang keluar BUD yang digunakan untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp144.678.144,00.

g. Belanja Bagi Hasil Retribusi

Adalah kas yang keluar BUD yang digunakan untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp12.243.680,00.

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	163.034.400.213,66	176.989.696.378,36
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(163.034.400.213,66)	(176.989.696.378,36)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2018 sebesar (Rp163.034.400.213,66) atau naik 7,88% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2017 sebesar (Rp176.989.696.378,36).

1. Arus Kas Masuk

Adalah kas masuk ke BUD sebesar Rp0,00.

2. Arus Kas Keluar

Adalah arus kas keluar dari BUD yang berasal dari Belanja APBD TA 2018 dan termasuk Belanja BLUD, dana BOS dan JKN dari 3 FKTP, yaitu sebesar Rp163.034.400.213,66 yang terdiri dari:

a. Belanja Tanah

Adalah kas keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp138.767.500,00.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Adalah kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.554.910.344,41. Belanja Peralatan dan Mesin yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp44.404.743.266,13, dari dana BLUD RSUD sebesar Rp5.326.263.453,28, dari dana JKN dari 3 FKTP sebesar Rp498.568.475,00 dan dana BOS sebesar Rp1.325.335.150,00.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Adalah kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp45.978.095.429,99. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp45.525.263.429,99, dan dari dana BLUD RSUD sebesar Rp226.858.500,00, dari dana JKN dari 3 FKTP sebesar Rp162.690.000,00 dan dari dana BOS sebesar Rp63.283.500,00.

d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Adalah kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp57.003.831.744,26. Seluruh Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikeluarkan dari BUD.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Adalah kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.439.456.815,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp1.255.077.950,00 dan dari dana BOS sebesar Rp2.184.378.865,00.

f. Belanja Aset Lainnya

Adalah kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp1.919.338.380,00. Belanja Modal Aset Lainnya yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp1.864.383.380,00, dari dana BLUD RSUD sebesar Rp48.455.000,00 dan dari dana BOS sebesar Rp6.500.000,00.

g. Penyertaan Modal

Adalah kas keluar dari BUD yang digunakan untuk investasi pada BUMD sebesar Rp3.000.000.000,00 yaitu PDAM sebesar Rp1.500.000.000,00 dan PD BPR Artha Praja sebesar Rp1.500.000.000,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan/pembiayaan Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	1.514.989.692,01	833.169.447,26
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari		
Aktivitas	1.514.989.692,01	833.169.447,26
Pembiayaan/Pendanaan		

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2018 sebesar Rp1.514.989.692,01 atau naik 81,83% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2017 sebesar Rp833.169.447,26.

1. Arus Kas Masuk

Adalah arus kas masuk ke BUD yang berasal penerimaan Dana Bergulir sebesar Rp1.514.989.692,01.

2. Arus Keluar Kas

Adalah arus kas keluar dari BUD sebesar Rp0,00.

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	65.051.853.901,16	58.681.877.585,46
Arus Keluar Kas	65.076.014.575,43	58.654.373.724,15
Arus Kas Bersih dari	(24.160.674,27)	27.503.861,31
Aktivitas Transitoris		

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 2018 sebesar (Rp24.160.674,27) merupakan penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2018 sebesar Rp54.300.823.627,54 dari BUD, BLUD RSUD sebesar Rp9.963.557.453,00, JKN dari 3 FKTP sebesar Rp340.228.221,00, dan BOSNAS sebesar Rp471.405.273,89.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 98 Rincian Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2018

(dalam Rupiah)

Jenis PFK	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
IWP 8%	10.572.327.136,00	10.572.327.136,00	-
IWP 2%	2.677.546.074,00	2.677.546.074,00	-
Taperum	255.678.000,00	255.678.000,00	-
Askes	4.016.319.335,00	4.016.319.335,00	-
PPh 21 gaji	538.461.964,00	538.461.964,00	-
PPh 21 BTL	7.888.947.382,00	7.888.947.382,00	-
PPN BL	22.572.481.035,72	22.572.921.554,72	(440.519,00)
PPh 21 BL	840.130.847,00	840.199.097,00	(68.250,00)
PPh 22 BL	1.531.735.084,82	1.531.735.084,82	-
PPh 23 BL	1.234.960.600,00	1.234.960.600,00	-
PPh Final BL	2.171.727.400,00	2.171.727.400,00	-
BLUD	9.963.557.453,00	9.963.557.453,00	-
JKN	340.228.221,00	340.228.221,00	-
BOSNAS	447.753.368,62	471.405.273,89	(23.651.905,27)
Jumlah	65.051.853.901,16	65.076.014.575,43	(24.160.674,27)

7.5.5.5 Saldo Akhir Kas

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	(Rp)	(Rp)
Saldo Akhir Kas	211.349.783.921,00	129.322.909.360,68

Nilai saldo akhir kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp211.349.783.921,00 perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 99 Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 2018	Saldo 2017
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	81.857.251.917,87	65.505.722.377,29
Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	105.168.681.738,89	60.750.269.277,68
Saldo Awal Kas BOSNAS	1.950.018.101,36	1.233.607.084,31
Saldo Awal Kas BLUD	21.299.699.428,25	593.317.390,45
Saldo Awal Kas JKN	834.582.065,00	1.138.786.126,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	508.769,00	282.250,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	104.682.000,00	8.108.769,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	134.359.900,63	92.816.085,95
Saldo Akhir Kas	211.349.783.921,00	129.322.909.360,68



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.1 Saldo awal ekuitas

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
1. Saldo awal ekuitas	2.242.790.461.147,35	2.207.392.936.877,11

Pada Tahun 2018 terdapat saldo awal ekuitas yang merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2017 sebesar Rp2.242.790.461.147,35.

7.5.6.2 Surplus/Defisit – LO

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
2. Surplus/Defisit-LO	140.783.577.129,09	36.308.772.355,41

Surplus/Defisit – LO Tahun 2018 Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp140.783.577.129,09 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Blitar Pada Tahun 2018.

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh koreksi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
1. Piutang	39.022.513,77	1.664.293.177,00

Koreksi nilai piutang atas nilai Saldo Awal piutang 2018 sebesar Rp39.022.513,77 yang terdiri dari:

- Koreksi kurang catat atas saldo awal piutang pajak air tanah atas Wajib Pajak Herlingga Jaya masa Nopember tahun 2017 sebesar Rp137.360,00 pada BPKAD.
- Koreksi kurang catat atas saldo awal piutang pajak restoran-katering pada BPKAD sebesar Rp8.565.500,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 100 Rincian Dampak Kumulatif atas Kurang Catat
Piutang Pajak Restoran-Katering

(dalam Rupiah)

No	Nama	Masa	Tahun	Nominal
1	Warung 25	Juli	2017	894.000,00
2	Mbak Feni	Desember	2017	288.000,00
3	Rejeki Catering	September	2017	640.000,00
4	Depot Kiroso	September	2017	450.000,00
5	Warung 25	Nopember	2017	546.500,00
6	Depot Kiroso	Nopember	2017	350.000,00
7	Depot Kiroso	Oktober	2017	730.000,00
8	Warung 25	Oktober	2017	50.000,00
9	Depot Bu Rini	Agustus	2017	345.000,00
10	Depot Kiroso	Agustus	2017	64.000,00
11	Rejeki Catering	Agustus	2017	72.000,00
12	Warung 25	Agustus	2017	575.000,00
13	Warung 25	April	2017	30.000,00
14	Rejeki Catering	April	2017	336.000,00
15	Depot Kiroso	April	2017	827.500,00
16	Depot Kiroso	Mei	2017	202.500,00
17	Rejeki Catering	Mei	2017	462.000,00
18	Depot Bu Rini	Mei	2017	235.000,00
19	Warung 25	Mei	2017	37.500,00
20	Depot Kiroso	Maret	2017	380.000,00
21	Warung 25	Maret	2017	194.000,00
22	Rejeki Catering	Maret	2017	160.000,00
23	Depot Kiroso	Februari	2017	180.000,00
24	Warung 25	Februari	2017	171.500,00
25	Depot Kiroso	Januari	2017	260.000,00
26	Rejeki Catering	Januari	2017	42.500,00
27	Warung 25	Januari	2017	42.500,00
Total				8.565.500 ,00

- Koreksi kurang saji atas saldo awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Wiji Patria Buah dengan masa Retribusi bulan September 2017 sebesar Rp1.000.000,00;
 2. Sigit Pramusanto dengan masa Retribusi bulan Oktober 2017 sebesar Rp1.000.000,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Koreksi kurang saji atas saldo awal Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.937.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Defi Antama, Sewa GOR Sasana Krida, Masa Retribusi Bulan Oktober Tahun 2017 sebesar Rp270.000,00;
 2. Defi Antama, Sewa GOR Sasana Krida, Masa Retribusi Bulan Nopember Tahun 2017 sebesar Rp270.000,00;
 3. Defi Antama, Sewa GOR Sasana Krida, Masa Retribusi Bulan Desember Tahun 2017 sebesar Rp240.000,00;
 4. Mudjiyanto, Sewa GOR Sasana Krida, Masa Retribusi Bulan Nopember Tahun 2017 sebesar Rp180.000,00;
 5. Mudjiyanto, Sewa GOR Sasana Krida, Masa Retribusi Bulan Desember Tahun 2017 sebesar Rp180.000,00;
 6. Sugeng Santoso, Sewa GOR Sasana Krida, Masa Retribusi Bulan Nopember Tahun 2017 sebesar Rp90.000,00;
 7. Sugeng Santoso, Sewa GOR Sasana Krida, Masa Retribusi Bulan Desember Tahun 2017 sebesar Rp67.500,00;
 8. Suwarsono, Sewa Lapangan Tenis, Masa Retribusi Bulan Nopember Tahun 2017 sebesar Rp80.000,00;
 9. Suwarsono, Sewa Lapangan Tenis, Masa Retribusi Bulan Desember Tahun 2017 sebesar Rp80.000,00;
 10. Zainal Alim, Sewa Lapangan Tenis, Masa Retribusi Bulan Oktober Tahun 2017 sebesar Rp200.000,00;
 11. Zainal Alim, Sewa Lapangan Tenis, Masa Retribusi Bulan Nopember Tahun 2017 sebesar Rp120.000,00;
 12. Latihan Rutin, Sewa Lapangan Tenis, Masa Retribusi Bulan Nopember Tahun 2017 sebesar Rp160.000,00.

- Koreksi kurang saji atas saldo awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp12.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Retribusi sewa kios stadion nomor 27, An. Chrisna Wijaya, Angsuran 12 bulan tahun 2017 Rp2.400.000,00;
 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pembayaran piutang kios no 25, An. Cicilia Yuliati H, angsuran tahun 2017 Rp3.600.000,00;
 3. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sewa kios Kebonrojo no. 7, An. Robert Hariyanto, pembayaran piutang tahun 2017 Rp1.600.000,00;
 4. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sewa kios Kebonrojo no. 5, An. Paini, pembayaran piutang tahun 2017 Rp2.400.000,00;
 5. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sewa kios Kebonrojo no. 49, An. Indiyahwati, pembayaran piutang tahun 2017 Rp2.400.000,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Koreksi lebih saji atas saldo awal Piutang BPJS pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.590.100,00. Koreksi dimaksud merupakan :
 - Lebih saji sebesar Rp100,00 karena kesalahan pencatatan nominal (saldo per 31 Desember 2017 *audited* disajikan sebesar 140.182.600,00, sedangkan pada dokumen sumber tertera 140.182.500,00) dan ;
 - Lebih saji sebesar Rp1.590.000,00 dikarekan merupakan utang pihak BPJS kepada Dokter Trianang atas biaya kegiatan promotif dan preventif prolans tipe pencegahan yang telah ditransfer ke rekening yang bersangkutan pada tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp825.000,00 + Rp765.000,00 = Rp1.590.000,00 dan tidak melalui Kas Umum Daerah Kota Blitar sehingga tidak termasuk kategori Piutang BPJS Non Kapitasi pada Pemerintah Kota Blitar.
- Koreksi kurang catat atas saldo awal piutang fasilitas umum Rp8.983.040 yaitu sewa tanah ATM PT BPD Jawa Timur di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar Rp5.324.000,00 dan PIPP Rp3.659.040,00 untuk besaran nilai sewa pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 011/2146/410.206.6/2018.
- Koreksi kurang saji atas saldo awal Piutang Bunga Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi sebesar Rp5.931.433,77 karena realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dari UMKM/Koperasi pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 (sebesar Rp125.790.327,15) tidak sama dengan pengurang piutang pada CaLK Neraca Piutang Lainnya Tahun 2017 (sebesar Rp131.721.760,92) yaitu selisih sebesar Rp5.931.433,77. Saldo Piutang Bunga Pinjaman Dana Bergulir yang seharusnya adalah yang tertera pada kertas kerja pada Dinas koperasi *audited* per 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp873.395.374,36 (terdiri dari bunga UKM sebesar Rp630.731.080,06 dan bunga koperasi sebesar Rp242.664.294,30). Pada Neraca *audited* Tahun 2017 masih tersaji Rp867.463.940,59 .
- Koreksi kurang catat Piutang Bunga PDAM sebesar Rp177.780,00.
- Koreksi kurang saji atas saldo awal Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp480.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Paini , denda sewa kios atas tahun 2017 sebesar Rp120.000,00;
 2. Cicilia Yuliati H, denda sewa kios atas tahun 2017 sebesar Rp72.000,00;
 3. Indiyahwati, denda sewa kios atas tahun 2017 sebesar Rp288.000,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
2. Penyisihan Piutang	4.931.205,00	0,00

Koreksi lebih catat Penyisihan Piutang Bunga PDAM sebesar Rp4.931.205,00

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
3. Penyisihan Investasi Tak Tertagih	148.143.230,00	0,00

Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyisihan Pinjaman Jangka Panjang PDAM tak tertagih dikarenakan penggantian metode penggolongan kualitas piutang berdasarkan kebijakan akuntansi Lampiran IX tentang Kebijakan Akuntansi Investasi Huruf C.3.c tentang penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali untuk investasi metode nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp148.143.230,00.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
4. Hutang	(255.122.346,00)	(555.844.756,95)

Koreksi nilai hutang karena kurang catat atas nilai saldo awal hutang 2018 sebesar (Rp255.122.346,00) pada RSUD Mardi Waluyo sebesar Rp255.122.346,00 karena adanya koreksi utang jasa pelayanan BPJS Bulan Nopember dan Desember tahun 2017 sebesar Rp3.775.232.845,00 dan terbayar pada tahun 2018 sebesar Rp4.030.355.191,00.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
5. Persediaan	213.230.975,00	160.529.363,00

Koreksi nilai persediaan atas nilai Saldo Awal Persediaan 2018 sebesar Rp213.230.975,00 yang terdiri dari:

- Koreksi kurang catat saldo awal atas barang-barang /savety box dan spuit (bahan kesehatan) dari hibah provinsi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp103.165.775,00.
- Koreksi kurang catat saldo awal atas alat kesehatan (bahan kesehatan) pada UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul sebesar Rp98.084.950,00.
- Koreksi kurang catat saldo awal atas bahan kimia pada UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo sebesar Rp3.220.000,00.
- Koreksi atas kurang catat pencatatan saldo awal *audited* hibah karena ada koreksi jumlah dari Calon induk lele Sangkuriang (Bibit Ternak) sebesar Rp5.250.000 dan Bantuan obat keswan dari Provinsi Jatim 2017 (bahan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

obat-obatan) sebesar Rp4.707.500,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp9.957.500,00.

- Koreksi atas kurang catat pencatatan saldo awal audited hibah karena ada koreksi jumlah dari Pemberi hibah/Provinsi - Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang awalnya Rp100.984.445,00 menjadi Rp101.174.695,00 sebesar Rp190.250,00.
- Koreksi lebih catat saldo awal atas bahan cetakan (karcis) pada UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo sebesar Rp1.387.500,00.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
6. Kas	30.996.827,77	3.533.791,42

Koreksi nilai Kas atas nilai Saldo Awal Kas 2018 sebesar Rp30.996.827,77 yang terdiri dari:

- Koreksi atas pajak Tahun 2017 yang dibayar di Tahun 2018 pada SDN Kepanjenkidul 1 sebesar Rp2.112.540,00.
- Koreksi nilai kas karena kurang catat atas nilai saldo awal kas BOSNAS 2018 pada 24 UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri dan SD Negeri sebesar Rp28.884.287,77 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 101 Rincian Dampak Kumulatif atas
Saldo Awal Kas BOSNAS**

(dalam Rupiah)

No	Nama Sekolah	Saldo akhir Kas BOSNAS 2017 (Audited)	Saldo akhir Kas BOSNAS 2017 (sesuai BA)	Selisih
1	SMP Negeri 5	18.805.024,20	12.963.524,20	(5.841.500,00)
2	SMP Negeri 6	140.032.413,03	141.152.413,03	1.120.000,00
3	SMP Negeri 8	189.489.863,85	189.729.362,21	239.498,36
4	SD Negeri Turi 2	1.867.983,98	1.868.761,98	778,00
5	SD Negeri Sukorejo 2	17.602,47	67.602,47	50.000,00
6	SD Negeri Turi 1	1.826.999,77	1.015.542,86	2.842.542,63
7	SD Negeri Pakunden 2	949.188,01	671.688,01	(277.500,00)
8	SD Negeri Karangsari 1	207.269,46	113.522,60	(93.746,86)
9	SD Negeri Tanjungsari 1	4.030.266,56	4.105.167,31	74.900,75
10	SD Negeri Sentul 2	7.845.026,42	9.987.435,42	2.142.409,00
11	SD Negeri Sentul 3	1.476.275,53	1.363.538,30	(112.737,23)
12	SD Negeri Bendo 2	3.066.082,39	6.336.061,80	3.269.979,41
13	SD Negeri Kepanjenkidul 2	430.990,25	372.776,85	(58.213,40)
14	SD Negeri Kepanjenkidul 1	719.812,92	765.700,55	45.887,63
15	SD Negeri Kauman 2	10.431.773,74	11.124.973,74	693.200,00
16	SD Negeri Sananwetan 3	132.855,93	1.023.055,93	890.200,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Sekolah	Saldo akhir Kas BOSNAS 2017 (Audited)	Saldo akhir Kas BOSNAS 2017 (sesuai BA)	Selisih
17	SD Negeri Sananwetan 2	7.003.468,20	6.588.468,20	(415.000,00)
18	SD Negeri Bendogerit 2	2.316.464,21	32.152.501,59	29.836.037,38
19	SD Negeri Gedog 2	993.133,38	580.833,38	(412.300,00)
20	SD Negeri Plosokerep 1	172.994,80	82.993,84	(90.000,96)
21	SD Negeri Plosokerep 2	282.454,90	193.985,86	(88.469,04)
22	SD Negeri Rembang 1	1.815.182,64	1.814.982,64	(200,00)
23	SD Negeri Rembang 2	291.406,03	279.528,13	(11.877,90)
24	SD Negeri Karangtengah 4	6.735.855,72	1.816.255,72	(4.919.600,00)
Total		400.940.388,39	426.170.676,62	28.884.287,77

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7 Aset Lainnya	0,00	7.466.929,67

Pada TA 2018, dampak kumulatif atas Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
8. Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,03

Pada TA 2018, dampak kumulatif atas Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
9. Utang Perhitungan Fihak Ketiga	(2.112.535,87)	0,00

Koreksi nilai Kas atas nilai Saldo Awal Utang Perhitungan Fihak Ketiga 2018 sebesar (Rp2.112.535,87) yang terdiri dari:

- Koreksi lebih catat atas nilai saldo awal Utang PFK 2017 pada SDN Bendogerit 2 sebesar Rp4,13 karena adanya koreksi Utang PFK BOS 2017 sebesar Rp 27.786.111,31 dan terbayar pada tahun 2018 sebesar Rp27.786.107,18.
- Koreksi kurang catat Utang kepada Fihak Ketiga Tahun 2017 di Dinas Pendidikan atas transaksi dana BOS pada SDN Kepanjenkidul 1 sebesar Rp2.112.540,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
10. Aset Tetap	836.096.307,00	(0,00)
Pada TA 2018, dampak kumulatif atas Aset Tetap sebesar Rp836.096.307,00 terdiri dari :		
1. Tindak lanjut temuan BPK 2018 atas aset tetap yang belum terinventarisasi nilainya sebesar Rp7,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Kelurahan Turi	: satu bidang tanah makam sebesar Rp1,00 dan satu bidang tanah sawah sebesar Rp1,00	Rp2,00
b. Kelurahan Gedog	: satu bidang tanah eigendom sebesar Rp1,00	Rp1,00
c. Kelurahan Sanananwetan	: satu bidang tanah bengkok sebesar Rp1,00	Rp1,00
d. Dinas Kesehatan	: satu unit mobil kijang sebesar Rp1,00 dan dua unit motor suzuki thunder sebesar Rp2,00	Rp3,00
2. Nilai sebesar Rp865.200.000,00 merupakan pencatatan atas dampak kumulatif bantuan hibah Peralatan dan Mesin berupa bus sekolah pada :		
a. Dinas Perhubungan yang diterima dari CSR Bank Jatim pada tanggal 28 November 2016 sesuai Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Dan/Biaya		Rp685.200.000,00
b. Rehab RKB pada SMPN 4 yang diterima sesuai BAST Nomor 027/866A/410.110.9.2/2014 tanggal 10 Januari 2018.		Rp180.000.000,00
3. Koreksi mengurangi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang ternyata teridentifikasi sebagai barang Persediaan dan telah dipergunakan sehingga tidak terdapat fisik barangnya per 31/12/2018 (Tercatat dalam KIB B, Tahun Perolehan 2002, 2003, 2011)		Rp29.103.700,00

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
11. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	34.209.759.409,36	0,00
1. Koreksi nilai Akumulasi Penyusutan pada :		
a. Dinas Perhubungan berupa Bus dari Hibah CSR tahun 2016-2017		(Rp137.040.000,00)
b. Rehab RKB dari APBN tahun 2014-2017 pada SMP Negeri 4		(Rp36.000.000,00)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

		c. Kesalahan pencatatan dikarenakan atribusi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke induknya pada Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Penataan Ruang, dan Dinas Ketahanan Pangan	(Rp434.249.751,56)
		2. Koreksi tambah dikarenakan atribusi AT Gedung dan Bangunan ke induknya pada 3 OPD, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan koreksi kurang akumulasi penyusutan Gedung Bangunan karena kesalahan perhitungan pada beberapa OPD	Rp19.377.809.891,39
		3. Koreksi akumulasi penyusutan karena kesalahan penghitungan pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp13.243.635.240,21
		4. Koreksi penyusutan karena adanya aset peralatan dan mesin yang teridentifikasi sebagai persediaan dan telah digunakan sehingga tidak terdapat fisik barangnya di RSD Mardi Waluyo	Rp29.103.700,00
		5. Koreksi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena kesalahan perhitungan	Rp2.166.500.329,32
		Jumlah Dampak Kumulatif atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp34.209.759.409,36
		31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
12.	Akumulasi Amortisasi		0,00
	Aset Tak Berwujud	251.299.810,40	
	1. Koreksi tambah beban amortisasi pada beberapa OPD karena salah penghitungan beban amortisasi, kurang pembebanan untuk perolehan TA 2018, dan koreksi untuk konsistensi penyajian beban amortisasi atas ATB berupa kajian dengan nilai total sebesar Rp34.395.804,57 dan koreksi kurang amortisasi karena kesalahan hitung sebesar Rp141.189.795,43.		Rp175.585.600,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Koreksi menambah Beban dan Akumulasi Amortisasi ATB dikarenakan pengatribusian ATB pada induknya di 3 SKPD, dengan rincian terlampir

Rp75.714.210,40

Jumlah Dampak Kumulatif atas Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud **Rp251.299.810,40**

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
13. Investasi Dana Bergulir	0,00	46.090.377,77

Pada TA 2018, dampak kumulatif atas Investasi Dana Bergulir adalah sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
14. Investasi Permanen	(728.232.079,88)	0,00

Pada TA 2018, dampak kumulatif atas Investasi Permanen sebesar Rp728.232.079,88 dikarenakan koreksi lebih catat atas ekuitas Neraca PDAM Tahun 2017 sebesar Rp728.232.079,88 pada Neraca Pemerintah Kota Blitar Tahun 2017 audited, dikarenakan kurang catat atas pengakuan kerugian tahun berjalan pada Neraca Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2017.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
15. Investasi NonPermanen	164.174.000,00	0,00

Koreksi atas kurang catat saldo awal Pinjaman Jangka Panjang PDAM Nomor 23 Tahun 2002 sebesar Rp164.174.000,00 dan reklasifikasi Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang per 31/12/2017 berupa pinjaman PDAM Nomor 6 Tahun 2001 yang tergolong macet ke Investasi Nonpermanen.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
16. Aset Ekstrakomptabel	0,00	(2.179.515.967,05)

Koreksi atas aset ekstrakomptabel adalah sebesar Rp0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada akhir periode pelaporan. Saldo Ekuitas akhir berasal dari:

Tabel 102 Perhitungan Ekuitas Akhir

(dalam Rupiah)	
Ekuitas Awal	2.242.790.461.147,35
Surplus Laporan Operasional	140.783.577.129,09
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	34.912.187.316,55
Ekuitas Akhir	2.418.486.225.592,99



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.7 Informasi Penting Lainnya Yang Diperlukan

Dalam BAB ini akan disampaikan informasi-informasi yang perlu untuk diketahui oleh pemakai terkait dengan laporan keuangan. Informasi-informasi dimaksud sebagai berikut:

7.5.7.1 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP)

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau Pemerintah Kota dan/atau Desa, serta dari pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah dan/atau Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Dalam Tahun Anggaran 2018 Kota Blitar mendapat Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6.734.720.000,00 dengan rincian yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 103 Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No.	OPD	Jenis Dana Pusat	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Dana Dekonsentrasi	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	39.620.000,00	38.512.419,00	Realisasi tidak mencapai 100%
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dana Dekonsentrasi	1. Kegiatan Penyuluhan dan Peningkatan	1.800.000,00	1.800.000,00	
			2. Kegiatan Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.200.000,00	4.200.000,00	
			3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	294.500.000,00	294.500.000,00	
			4. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan	18.000.000,00	18.000.000,00	



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	OPD	Jenis Dana Pusat	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tugas Pembantuan	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan (Pembangunan Pasar Templek)	6.000.000.000,00	0,00	Kegiatan tidak dilaksanakan
4	Dinas Pendidikan	Tugas Pembantuan	1. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SDN Karangtengah 1	14.400.000,00	14.400.000,00	
			2. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SDN Sananwetan 1	14.400.000,00	14.400.000,00	
			3. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SDN Turi 2	14.400.000,00	14.400.000,00	
			4. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SDN Rembang 2	14.400.000,00	14.400.000,00	
			5. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SDN Sukorejo 3	14.400.000,00	14.400.000,00	
			6. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SDN Kepanjenkidul 2	14.400.000,00	14.400.000,00	
			7. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SDN Sananwetan 3	14.400.000,00	14.400.000,00	
			8. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SDN Bendo 1	14.400.000 ,00	14.400.000 ,00	
			9. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SDN Bendogerit 1	14.400.000,00	14.400.000,00	
			10. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SDN Sentul 2	14.400.000,00	14.400.000,00	
			11. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SDN Pakunden 2	14.400.000,00	14.400.000,00	



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	OPD	Jenis Dana Pusat	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
			12. Pengembangan Unit Pelayanan Disabilitas Tahun 2018	175.000.000,00	175.000.000,00	
			13. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SMPN 3 Blitar	14.400.000,00	14.400.000,00	
			14. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SMPN 8 Blitar	14.400.000,00	14.400.000,00	
			15. Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan SMPN 9 Blitar	14.400.000,00	14.400.000,00	
Jumlah Dana Dekonsetrasi				358.120.000,00	357.012.419,00	
Jumlah Dana Tugas Pembantuan				6.376.600.000,00	376.600.000,00	
Jumlah Bantuan Dana Pusat				6.734.720.000,00	733.612.419,00	

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018.

7.5.7.2 Penerimaan Kas yang Tidak Diterima Melalui Kas Umum Daerah

Penerimaan Kas yang tidak diterima melalui RKUD yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana BLUD RSUD Mardi Waluyo, dan Dana Kapitasi JKN di 3 UPTD Kesehatan.

7.5.7.3 Penyelesaian Kerugian Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan kemajuan penyelesaian kerugian daerah sampai dengan tahun anggaran berjalan. Berikut ini pengungkapan informasi penyelesaian kerugian daerah pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) dibentuk Nomor 188/888/HK/410.010.2/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang kemudian dirubah dengan SK Walikota Blitar Nomor 188/148/HK/410.010.2/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan pedoman teknis pelaksanaan TP-TGR melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pedoman Teknis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Posisi kerugian daerah pada Pemerintah Kota Blitar sebanyak 191 kasus sebesar Rp4.123.841.111,61 terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan SK Pembebanan dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebanyak 58 kasus sebesar Rp1.114.592.983,23. Dari 58 kasus tersebut telah dilakukan pembayaran sekali lunas sebesar Rp535.797.436,15, pembayaran angsuran sebesar Rp353.179.318,08 dan penghapusan sebesar Rp222.100.000,00 sehingga kasus yang belum selesai sebesar Rp3.516.229,00 (Rp1.114.592.983,23 - Rp535.797.436,15 - Rp353.179.318,08 - Rp222.100.000,00).
- b. Tidak terdapat kasus kerugian yang sedang dalam proses pembebanan, baik yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lainnya, dan Pihak Ketiga.
- c. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari hasil pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebanyak 133 kasus sebesar Rp3.009.248.128,38. Dari 133 kasus tersebut, telah dilakukan pembayaran sekali lunas sebesar Rp1.189.385.862,50, pembayaran angsuran sebesar Rp1.548.724.625,70 sehingga sisa kasus yang belum selesai sebesar Rp271.137.640,18 (Rp3.009.248.128,38 - Rp1.189.385.862,50 - Rp1.548.724.625,70).

Tim MP TPTGR telah mengusulkan pembebasan dan penghapusan kerugian daerah sebanyak tiga kasus kerugian daerah yang telah diterbitkan SK Pembebanan/SKTJM Tuntutan ganti Rugi dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp225.116.229,00, atas usulan tersebut, Pemerintah Kota Blitar telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kasus kerugian daerah pegawai negeri non bendahara a.n. Drs. H.M.Suwito Kurnia Wijaya telah didukung SKTJM sebesar Rp37.000.000,00 dan telah diangsur sebesar Rp12.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp25.000.000,00. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2005. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kasus tersebut telah dihapus dengan diterbitkannya SK Walikota blitar Nomor 188/732/HK/410.010.2/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penghapusan Kewajiban Penggantian Kerugian Daerah a.n. Drs. H.M. Suwito Kurnia Wijaya sebesar Rp25.000.000,00
- 2) Kasus kerugian daerah pegawai negeri non bendahara a.n. Drs. Heru Juswadi, yang terjadi pada tahun 2007 telah didukung dengan SK Pembebanan sebesar Rp3.016.229,00 dan belum terdapat angsuran. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kasus tersebut telah dibebaskan dengan terbitnya SK Walikota Blitar Nomor 188/46/410.010.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Pembebasan Kerugian Daerah a.n. Sdr. Drs. Heru Juswadi.
- 3) Kasus kerugian daerah pegawai negeri non bendahara a.n. Drs. Agus Sularso telah didukung dengan SK Pembebanan sebesar Rp207.615.500,00 dan telah diangsur sebesar Rp197.100.000,00. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2009. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kasus tersebut telah dihapuskan dengan SK Walikota Blitar Nomor 188/731/HK/410.010.2/2013



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

tanggal 25 September 2013 tentang Penghapusan Kewajiban Penggantian Kerugian Daerah a.n. Drs. Agus Sularso sebesar Rp197.100.000,00.

Penghapusan kewajiban penggantian kerugian daerah atas nama Sdr. Suwito Kurnia Wijaya dan Sdr. Drs. Agus Sularso di atas telah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Blitar sesuai surat persetujuan tanggal 11 September 2013.

7.5.7.4 Pengungkapan Informasi Permasalahan Investasi

1. Investasi Dana Bergulir pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar

Pada tahun 2017 telah ditetapkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Blitar Tentang Pengelolaan Kredit Modal Kerja Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Nomor 08 Tahun 2017, Nomor 91/KRD/BPR/BLT/2017 sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan dana kredit modal kerja untuk pemberdayaan usaha kecil yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006 yang dikelola oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mensukseskan pelaksanaan Program Pemberdayaan Pengusaha Kecil yang meliputi pengembalian, pelaporan, dan evaluasi pemanfaatan dana. Perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan merupakan perpanjangan dari perjanjian kerjasama Nomor 07 Tahun 2006 Nomor 601/KDR/BLT/2006 yang telah diubah dengan perjanjian kerjasama Nomor 100 Tahun 2007, Nomor 061/KDR/BLT/2007 dan perjanjian kerjasama Nomor 3 Tahun 2013 Nomor 061/KDR/BLT/2013.

Pada tahun 2018 belum terdapat pembayaran atas investasi dana bergulir sehingga saldo investasi dana bergulir sama seperti tahun lalu yaitu sebesar Rp40.071.250,00. Pemerintah Kota Blitar memiliki rekening penampungan pada PT Bank BPR Jatim Cabang Blitar dengan nomor rekening 0101028020. Pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat sisa dana di rekening penampungan dana bergulir sebesar Rp51.346,10 yang tidak dimasukkan dalam nilai investasi. Nilai tersebut terdiri dari Rp50.000,00 merupakan pemeliharaan rekening dan Rp1.346,10 merupakan bunga tabungan yang belum disetor ke BUD pada tahun 2018.

2. Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 11 (sebelas) rekening penampungan dana bergulir pada PT Bank Jawa Timur dan 1 (satu) rekening penampungan dana bergulir pada PT Bank BPR Jatim dengan posisi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 104 Rekening Penampungan Dana Bergulir
pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

(dalam Rupiah)

No.	Nomor Rekening	Saldo Awal per 31 Desember 2017	Setoran atas Biaya Jasa Transaksi Keuangan	Pendapatan Bunga	Pembayaran pokok dan bunga dana bergulir belum disetor ke kas daerah	Biaya Administrasi	Saldo Akhir per 31 Desember 2018
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6-7)
1	0142167484 - Dalir UKM	73.452,83	400.000,00	20.888,94	0,00	112.177,79	382.163,98
2	0141038773 - Dalir UKM	0,00	400.000,00	28.083,02	0,00	53.616,60	374.466,42
3	0142186217 - Dalir UKM	90.314,73	400.000,00	140.087,78	6.491.500,00	121.017,55	7.000.884,96
4	0141036520 - Dalir UKM	0,00	450.000,00	1.276,42	0,00	40.255,28	411.021,14
5	0142136325 - Dalir UKM	0,00	500.000,00	1.712,40	0,00	63.342,48	438.369,92
6	0142136341 - Dalir UKM	72.511,72	400.000,00	477,18	0,00	80.988,90	392.000,00
7	0142172470 - Dalir UKM	0,00	400.000,00	0,00	0,00	8.000,00	392.000,00
8	0143003728 - Dalir UKM	0,00	400.000,00	0,00	0,00	7.500,00	392.500,00
9	0142132711 - Dalir UKM	0,00	400.000,00	0,00	0,00	8.000,00	392.000,00
10	0142136333 - Dalir Koperasi	67.988,57	400.000,00	0,00	0,00	75.988,57	392.000,00
11	10111000729 - Dalir UKM	21.706,63	400.000,00	413.262,93	0,00	109.622,56	725.347,00
12	0141030671-Giro - Dalir Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Rekening per 31 Desember 2018		325.974,48	4.550.000,00	605.788,67	6.491.500,00	680.509,73	11.292.753,42

Pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat sisa dana di rekening penampungan dana bergulir sebesar Rp11.292.753,42 yang tidak dimasukkan dalam nilai investasi. Nilai tersebut terdiri dari:

- Rp6.491.500,00 yang merupakan angsuran pinjaman dana bergulir tahun 2018 tetapi disetorkan tahun 2019 (STS No.900/11/410.2017.2/2018 tanggal 30 Januari 2019) yang dicatat pada Kas di Bendahara Penerimaan;
- Rp605.788,67 merupakan bunga tabungan rekening penampungan dana bergulir Dinas Koperasi dan UM tahun 2018 yang belum disetorkan yang dicatat pada Kas di Bendahara Penerimaan; dan
- Rp4.195.464,75 merupakan belanja untuk pemeliharaan rekening yang hanya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan karena bukan termasuk bagian dari Dana Bergulir.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.8. PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018 yang dapat kami sampaikan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Sal periode per 31 Desember 2018 . Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan Keuangan Negara dan Daerah. Semoga Laporan Keuangan dapat bermanfaat dan sebagai dasar akuntabilitas kepada para pengguna laporan dan *stakeholder*.

WAKIL WALIKOTA BLITAR

SANTOSO